



**IMPLEMENTASI PROGRAM PPA-PKH TAHUN 2016 UNTUK
MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL PEKERJA ANAK**
(Studi Terhadap Kegiatan Kepelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Pada Shelter Krai)

***IMPLEMENTATION OF PPA-PKH PROGRAM IN 2016 FOR RETURNING
THE SOCIAL CHILD WORKER'S PERFORMANCE***
(*Study on Conceling Activity of Manpower Office of Lumajang Regency At Shelter
Krai*)

SKRIPSI

Oleh

Azizah Khoirun Nikmah

140910301033

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**IMPLEMENTASI PROGRAM PPA-PKH TAHUN 2016 UNTUK
MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL PEKERJA ANAK**
(Studi Terhadap Kegiatan Kepelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Pada Shelter Krai)

***IMPLEMENTATION OF PPA-PKH PROGRAM IN 2016 FOR RETURNING
THE SOCIAL CHILD WORKER'S PERFORMANCE***
(*Study on Conceling Activity of Manpower Office of Lumajang Regency At Shelter
Krai*)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana sosial (S1) Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Azizah Khoirun Nikmah

140910301033

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan dipersembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta, Papakku Rasis, Ebukku Rumelah, Kakekku Maddar, Mak'e, Mak Mukri, dan Adikku Fariz Ramadan Elvany, atas motivasi, kasih sayang, pengorbanan serta senantiasa mendo'akan penulis untuk menjadi perempuan yang berilmu dan berbudi pekerti luhur, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Guru-guruku sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, penulis sampaikan terima kasih telah memberikan bekal berupa Ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup yang tak ternilai.
3. Almamaterku tercinta Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”

(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni. Disahihkan Al Albani dalam *As-Silsilah
AsShahihah*)¹

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/
diperbuatnya” (Ali Bin Abi Thalib)²



1 Shahih al-Jami' nomor 3289 www.dakwah.info diakses tanggal 24 September 2017

2 Departemen Agama Republik Indonesia, 2000. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azizah Khoirun Nikmah

NIM : 140910301033

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Pekerja Anak (Studi Terhadap Kegiatan Kepelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Pada Shelter Krai)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkannya sumber dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan hasil karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 14 Februari 2018

Yang menyatakan,

Azizah Khoirun Nikmah

NIM. 140910301033

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PPA-PKH TAHUN 2016 UNTUK
MENGEMBALIKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL PEKERJA ANAK**
(Studi Terhadap Kegiatan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang
Pada Shelter Krai)

Oleh

Azizah Khoirun Nikmah

NIM. 140910301033

Dosen Pembimbing Utama

Drs. Partono, M.Si

NIP. 195608051986031003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Pekerja Anak (*Studi Terhadap Kegiatan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Pada Shelter Krai*)” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Februari 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Budhy Santoso, Ph.D

NIP. 19701231997021001

Drs. Partono, M.Si

NIP. 195608051986031003

Anggota,

Drs. Sveh Hariyono, M.Si

NIP. 195904151989021001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si

NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

“Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Pekerja Anak (*Studi Terhadap Kegiatan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Pada Shelter Krai*)”. Azizah Khoirun Nikmah, 140910301033, 194, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sebuah usaha kesejahteraan anak penting untuk dilaksanakan, baik dari pemerintah maupun dari setiap elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan kondisi anak masih lemah secara fisik maupun psikologis, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa mendatang dalam sebuah masyarakat. Program PPA-PKH merupakan Program pemerintah yang dinaungi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai orientasi untuk menekan jumlah pekerja anak di Indonesia salah satunya pada Kabupaten Lumajang pada Shelter Krai. Pelaksanaan Program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang terdiri dari 3 tahapan yaitu pra shelter, shelter dan pasca shelter. Melalui tiga tahapan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang mempunyai orientasi dan berupaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan kepada anak putus sekolah yang bekerja, salah satunya dengan pemberian materi secara berkala selama satu bulan selama di shelter oleh tutor dan pemateri. Hal tersebut menunjukkan adanya usaha kesejahteraan sosial dari pemerintah untuk masyarakat yang hanya terfokus dengan pemberdayaan anak putus sekolah yang bekerja (pekerja anak) untuk meningkatkan kapasitas anak, dan memenuhi hak-hak anak yang bermuara pada Kesejahteraan anak. Kebermanfaatannya dari program PPA-PKH dapat dirasakan langsung oleh pekerja anak baik sebelum shelter, pada saat di shelter maupun setelah selesai shelter dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang sebagai organisasi pemerintah mempunyai tanggung jawab yang lebih atas permasalahan pekerja anak di Kabupaten Lumajang, sebab berkaitan dengan usia minimum seseorang dapat bekerja yaitu ada pada usia 18 tahun keatas.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembangkan Keberfungsian Sosial Pekerja Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian terletak pada Shelter Krai 1 dan Shelter Krai 2. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, didapatkan informan pokok berjumlah 9 orang dan tambahan berjumlah 6 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi tidak terstruktur, wawancara semi-struktur dan dokumentasi. Setelah terkumpul data yang hendak diteliti kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan Triangulasi sumber. Data yang dikumpulkan terkait dengan Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 untuk mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak selanjutnya dipaparkan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program PPA-PKH dimulai dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pasca program untuk dapat mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak. Pada tahapan persiapan, pelaksanaan program menyiapkan rencana stimulasi untuk memasuki shelter (pelaksanaan). Selain itu terdapat proses pendampingan terhadap anak untuk ditarik dari tempat mereka bekerja dan didaftarkan ke lembaga pendidikan sesuai dengan rekomendasi antara pendamping dan anak. Kendala yang diperoleh ketika pelaksanaan adalah sulitnya mengelola karakter anak yang awalnya sifat anak ialah pekerja dan diubah menjadi karakter anak-anak. Pelaksanaan Program PPA-PKH Tahun 2016 Pada Shelter Krai dapat dikatakan berhasil dibuktikan dengan masuknya semua anak dampingan ke lembaga pendidikan.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayahnya serta karunia-Nya kepada umat di seluruh alam semesta. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Pekerja Anak** (Studi Terhadap Kegiatan Kepelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Pada Shelter Krai)”. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak atas segala bantuan, kerjasama, dan kontribusi pemikiran yang diberikan. Penghargaan serta rasa terima kasih yang amat sangat banyak penulis sampaikan setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
3. Drs. Partono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
4. Atik Rahmawati, S.Sos, M.Si dan Dra. Wahjuningsih, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan
5. Budi Santoso, Ph.D dan Drs. Syech Hariyono, M.Si, Terima kasih kesediaannya untuk dapat menguji penulis dalam sidang skripsi
6. Para Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik dan memberikan pengalamannya kepada penulis selama proses perkuliahan
7. Seluruh staf Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya terutama kepada operator Jurusan Kesejahteraan Sosial yang telah sabar membantu melancarkan administrasi penulis
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan seluruh jajarannya serta Pelaksana Program PPA-PKH baik Tim Teknis, Pendamping maupun

Tutor yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam kelancaran penelitian dilapangan.

9. Keluargaku Papak Rasit dan Ebuk Rumelah, Ma'e Maddar, Mak Mukri, Adik Fariz Ramadan Elvany serta Ahmad Rizqi Andi yang telah memberikan dukungan, doa, semangat demi terselesainya skripsi ini
10. Teman-teman KOMFIS Kesejahteraan Sosial 2014, HIMAKES 2015-2016, PELITA yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Kakak-kakak dan adik-adikku (Rani, Kholif Fitriyani, MbK Fariha dan Mas Koyyin, Mas AlFadili, Mas Virman, Mas Zainul, Mas Dwi, MbK Azizah, MbK Aqma, MbK Isnaya, MbK Ayik, Ayu Pipih) dan seluruh teman-teman kesejahteraan sosial baik Angkatan 2014 maupun semua angkatan, Terima kasih telah memberikan pencerahan dan hiburan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini.
12. Teman-teman Kesejahteraan Sosial angkatan 2014 terima kasih sudah menemani dan memberikan keceriaan penulis dalam perkuliahan.
13. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam proses penelitian sampai akhir penelitian.
14. Semua Pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan rasa penuh syukur Alhamdulillah, Penulis juga menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan akademis bagi pembaca pada khususnya dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Jember, 14 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

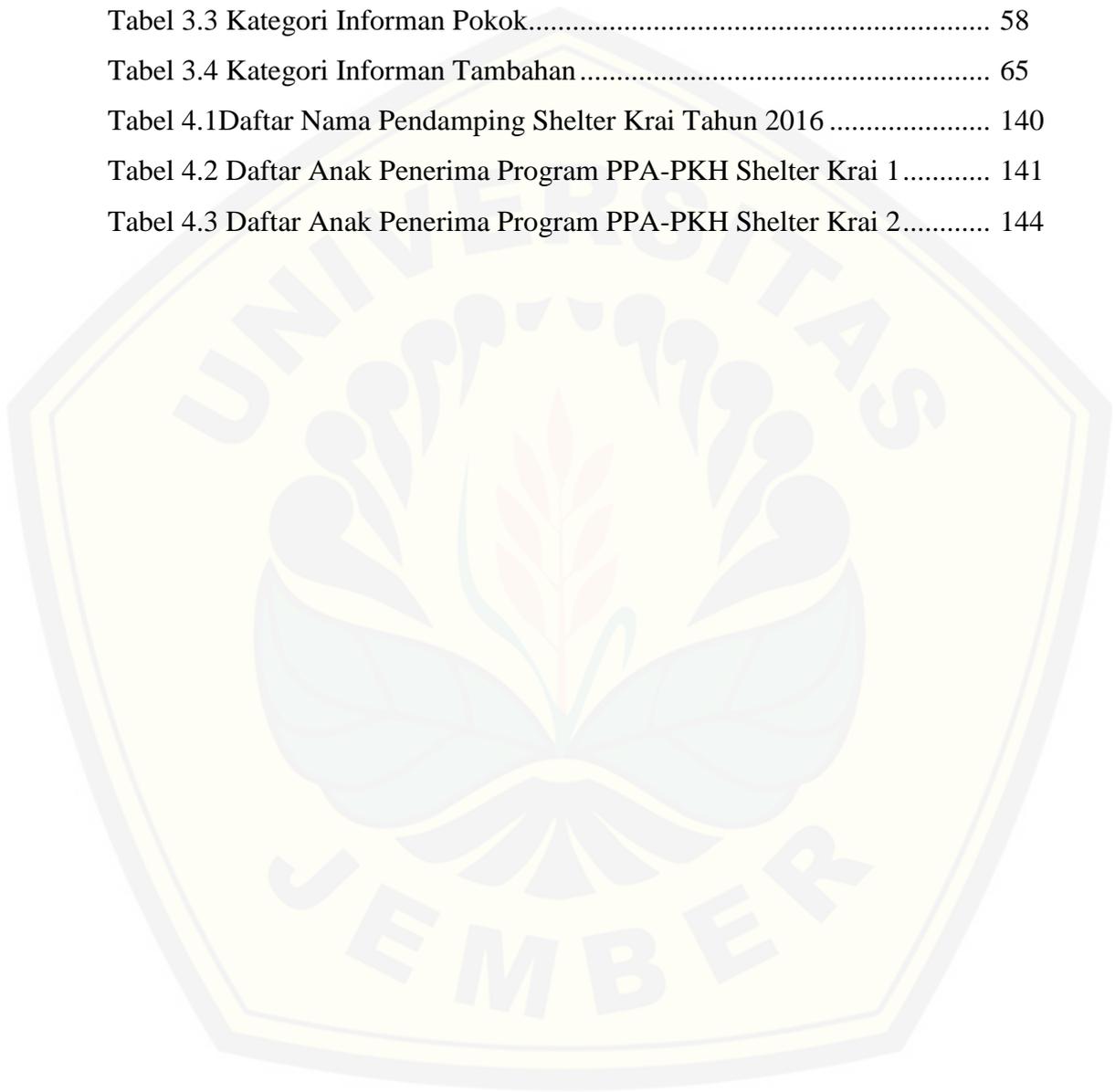
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep OAKS (Organisasi, Administrasi Kesejahteraan Sosial)	10
2.2 Konsep Usaha Kesejahteraan Sosial	14
2.3 Konsep Kebijakan Sosial	18
2.4 Konsep Implementasi Program	21
2.5 Konsep Kebutuhan dan Hak anak	25
2.5.1 Konsep Anak.....	26
2.5.2 Konsep Kebutuhan Anak	28
2.5.3 Konsep Hak Anak	30
2.6 Konsep PPA-PKH	34
2.7 Konsep Pemberdayaan	39
2.8 Konsep Kesejahteraan Sosial.....	42
2.8.1 Keberfungsian sosial	46

2.9 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	47
2.10 Alur Pikir Konsep Penelitian	50
BAB 3. METODE PENELITIAN	52
3.1 Pendekatan Penelitian	52
3.2 Jenis Penelitian	53
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	53
3.4 Teknik Penentuan Informan	54
3.4.1 Informan Pokok	56
3.4.2 Informan Tambahan	65
3.5 Teknik Pengumpulan Data	69
3.5.1 Observasi	69
3.5.2 Wawancara	71
3.5.3 Dokumentasi	75
3.6 Teknik Analisis Data	76
3.7 Teknik Keabsahan Data	79
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	83
4.1 Hasil Penelitian	83
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	83
a. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang	84
b. Gambaran Umum Shelter Krai	97
4.1.2 Keberfungsian Sosial Anak pada Shelter Krai	98
1. Rencana/ Stimulasi Untuk Pemberian Tugas dan Peranan Pekerja Anak	104
2. Ketersediaan Kebutuhan Dasar Pekerja Anak	109
3. Tugas-Tugas dan Peranan-Peranan Anak dalam Lingkungan ...	112
4. Pendampingan (Kembalinya Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan	115
4.2 Pembahasan	118
4.2.1 Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 pada Shelter Krai	122

1. Persiapan Program	123
a. Recruitment Pendamping	124
b. Persiapan Shelter	128
c. Validasi Data	131
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	134
2. Pelaksanaan Program	136
a. Kondisi Shelter	136
b. Aktivitas pendamping	139
c. Aktivitas Anak	152
d. Keterlibatan Anak	157
e. Materi-materi selama di Shelter	163
f. Stimulan-stimulan	167
g. Pendampingan	171
h. Penguatan Stake-Holder	175
3. Kegiatan Pasca Program	179
4. Kendala-Kendala	182
BAB 5. Penutup	188
5.1 Kesimpulan	188
5.2 Saran	190
DAFTAR PUSTAKA	192
LAMPIRAN	

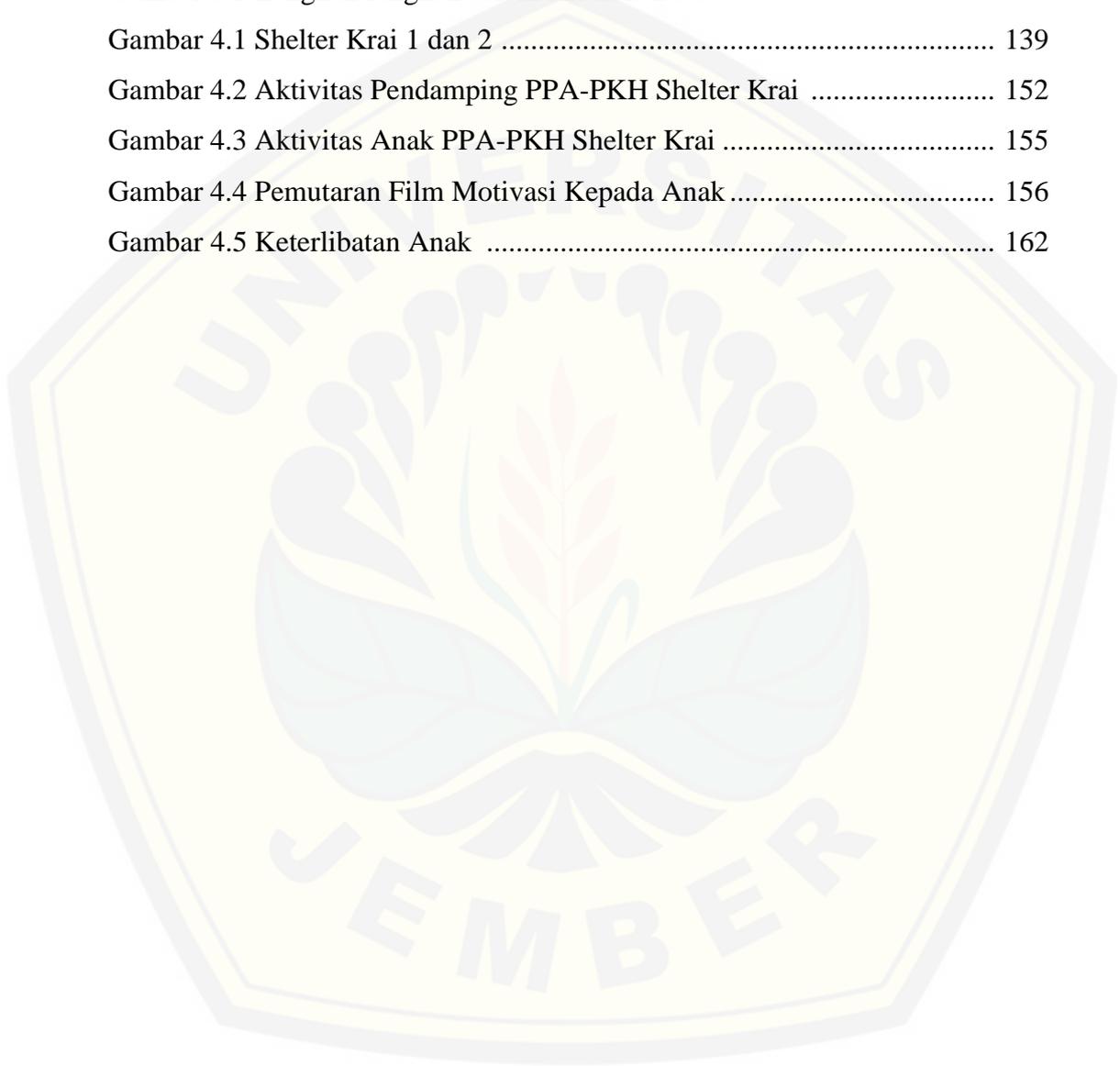
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Teknik Penentuan Informan	55
Tabel 3.2 Kriteria Penentuan Informan.....	56
Tabel 3.3 Kategori Informan Pokok.....	58
Tabel 3.4 Kategori Informan Tambahan	65
Tabel 4.1Daftar Nama Pendamping Shelter Krai Tahun 2016	140
Tabel 4.2 Daftar Anak Penerima Program PPA-PKH Shelter Krai 1	141
Tabel 4.3 Daftar Anak Penerima Program PPA-PKH Shelter Krai 2.....	144



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tujuan Sosial Kebijakan Sosial	19
Gambar 2.2 Mekanisme Penarikan Pekerja Anak Program PPA-PKH.....	37
Gambar 3.1 Langkah-langkah dalam Analisis Data	76
Gambar 4.1 Shelter Krai 1 dan 2	139
Gambar 4.2 Aktivitas Pendamping PPA-PKH Shelter Krai	152
Gambar 4.3 Aktivitas Anak PPA-PKH Shelter Krai	155
Gambar 4.4 Pemutaran Film Motivasi Kepada Anak	156
Gambar 4.5 Keterlibatan Anak	162



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi salah satunya ialah kebutuhan akan pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha berdasarkan atas kesadaran dan terencana yang dilakukan untuk memanusiakan manusia serta berfungsi untuk mengembangkan kemampuan manusia dan meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (Ramly, 2005: 142). Pendidikan umumnya dibagi menjadi 4 yaitu prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama maupun atas serta perguruan tinggi.

Pemerintah membuka ruang pendidikan untuk anak-anak Indonesia mulai dari lembaga pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta. Adanya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan lebih efektif lagi sehingga fasilitas yang diberikan pemerintah pula menjadi suatu motivasi baru bagi para orang tua untuk dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Namun kenyataannya sebagian besar anak-anak di negeri ini khususnya yang berada di daerah pedesaan atau kota-kota kecil belum mendapatkan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Pendidikan yang dianjurkan oleh pemerintah ialah pendidikan yang sesuai dengan program belajar sembilan tahun (9 tahun) (Kompasiana, 13 Juli 2017, diakses tanggal 4 oktober 2017). Namun dalam dekade ini banyak terjadi permasalahan anak yang putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga dan faktor anak tersebut.

Peristiwa pekerja anak banyak ditemukan di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik-International Labour (BPS-ILO) tahun 2009 terdapat sekitar 4 juta pekerja anak. Sedangkan pada tahun 2013 turun sebesar 1,7 juta, berarti pada tahun 2013 jumlah pekerja anak di Indonesia sebesar 2,3 juta. Jumlah pekerja anak tersebut berasal dari sector pertanian 60%, jasa 26%, Industri 75 anak dan sector lain sebesar 7%. Dari data tersebut artinya pekerja anak mayoritas berasal dari pedesaan berada pada sector pertanian dan 4 dari 5 pekerja anak tidak

dibayar. Sedangkan menurut UNICEF tahun 2016, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar dan 1,9 anak usia sekolah menengah pertama (SMP). Di Jawa Timur angka anak putus sekolah masih tergolong memprihatinkan. Pada tataran sekolah dasar (SD) terdapat 1.808, sekolah menengah pertama (SMP) 4.157, sekolah menengah atas (SMA) terdapat 3.319, dan sekolah menengah kejuruan (SMK) mencapai 11.067. Kondisi ini sangat memprihatinkan ditengah usaha pemerintah menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun (9 tahun). Sebagian besar dari mereka berusia sekolah menengah kejuruan yang meninggalkan bangku sekolah demi membantu perekonomian keluarganya.

Permasalahan pekerja anak merupakan tanggung jawab dari lembaga Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, karena berkaitan dengan tercabutnya hak dan kebutuhan anak. Usia minimum anak diperbolehkan bekerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Artinya, jika anak bekerja pada usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun tidak menjadi masalah asalkan tidak mengganggu pemenuhan hak anak seperti mendapatkan pendidikan dasar.

Pemerintah saat ini memberikan program bantuan berupa program Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung tercapainya Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). PPA-PKH merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terfokus pada pengembalian anak putus sekolah yang menjadi pekerja anak untuk mengenyam pendidikan dasar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dalam program ini para pekerja anak bakal ditarik dari tempat mereka bekerja dan ditempatkan sementara di rumah singgah (shelter) untuk mendapatkan pendampingan khusus dan masa pembinaan, sebelum akhirnya bersekolah kembali. Pelaksanaan Program kegiatan Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan ini dilaksanakan selama satu bulan.

PKH merupakan program nasional yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak serta meningkatkan partisipasi anak usia wajib belajar kependidikan. PPA-PKH adalah bagian dari PKH yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pekerja anak diseluruh propinsi di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur. Tidak semua kabupaten di Jawa Timur yang mendapatkan program PPA-PKH ini. Kabupaten/kota di Jawa Timur yang terpilih menjadi sasaran dari program PPA-PKH adalah kabupaten yang memiliki pekerja anak yang cukup tinggi baik dari tingkatan apapun. Pada tingkatan nasional PPA-PKH dinaungi oleh lembaga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedangkan pada tingkatan Kabupaten program PPA-PKH dinaungi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait. Upaya pemerintah memberikan program ini adalah sebagai langkah menciptakan bangsa indonesia pada tahun 2022 sebagai negara yang bebas tenaga kerja anak.

Lumajang merupakan kabupaten terkecil yang berada di Jawa Timur. Lumajang adalah Kabupaten yang mempunyai permasalahan sosial yang cukup banyak seperti masalah kemiskinan, pengemis, anak putus sekolah, pekerja anak dan yang lainnya. Lumajang merupakan salah satu Kabupaten yang terpilih menjadi tempat pengimplementasian Program PPA-PKH oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Dari observasi awal yang sudah dilakukan oleh peneliti, anak putus sekolah yang lantas menjadi pekerja anak di Kabupaten Lumajang yang tergolong dominan terdapat didaerah pedesaan seperti Kecamatan Klakah, Yosowilangun, Gucialit, Kunir, Blukon, Bayeman, dan Kabuaran. Sebelum Implementasi program dilakukan, pihak pelaksana program mendata kriteria-kriteria anak putus sekolah yang akan menjadi pekerja anak yang sekaligus menjadi penerima manfaat dari program PPA-PKH. Menurut Syaiful Rizal dalam web yang di tulis (<http://candrawiguna.com/mencari-anak-calon-penerima-bantuan-ppa-pkh-kabupaten-klungkung/>) bahwa,

"Penerima manfaat dari Program PPA-PKH merupakan anak yang bekerja, berusia anak-anak dan berasal dari keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)"

Namun dalam Program PPA-PKH di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang ini, penerima manfaat dari Program PPA-PKH merupakan

anak yang mempunyai kategori sebagai pekerja anak dan anak putus sekolah. Dalam hal ini terdapat kemudahan dalam menjaring penerima manfaat dari program PPA-PKH di Shelter Krai, dari yang pertama yaitu pekerja anak kemudian diturunkan menjadi anak putus sekolah namun tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan terkendala faktor ekonomi keluarga anak. Pelaksanaan Program PPA-PKH pada Shelter Krai terdiri dari dua shelter yang dilaksanakan disatu tempat dan pemberian materi yang sama.

Anak putus sekolah yang bekerja merupakan anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan dasar karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan dengan melakukan aktivitas pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai fungsi sosialnya sebagai abak karena kebutuhan dan hak mereka tidak terpenuhi. Menurut Huraerah (2012: 81) terdapat 6 (enam) kerugian yang didapat anak ketika bekerja sepanjang waktu, salah satu kerugiannya adalah terdapat penyangkalan hak-hak dasar anak misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Sehingga anak tidak mendapatkan fungsi sosialnya dikarenakan bekerja dan tercabutnya hak-hak dasar anak. Keberfungsian sosial anak terlihat ketika anak-anak mendapatkan hak dan kebutuhan dasarnya. Salah satunya ialah hak anak akan pendidikan.

Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan pada Shelter Krai mengupayakan pemberian kebutuhan kepada pekerja anak melalui kegiatan yang dilakukan didalam Shelter (tempat pelaksanaan Program) selama 30 hari. Untuk melancarkan program tersebut pelaksana Program yang terdiri dari pelaksana teknis, pendamping, dan tutor harus berpartisipasi aktif dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan program yang telah ditentukan. Program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang mulai dilaksanakan pada awal tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Tahun 2013 terdiri dari 4 Shelter, tahun 2014 terdapat penambahan Shelter menjadi 7 Shelter. Kemudian pada tahun 2015 jumlah Shelter yang diberikan mengalami penurunan menjadi 6 Shelter, serta pada tahun 2016 juga mengalami penurunan Shelter menjadi 4 Shelter.

Fenomena dilapangan menunjukkan Adanya penambahan Shelter pada tahun 2014 membuktikan bahwa terdapat peningkatan jumlah pekerja anak (anak putus sekolah yang bekerja). Pelaksanaan Program PPA-PKH pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah Shelter, dikarenakan jumlah pekerja anak pada tahun tersebut mengalami penurunan. Kabupaten Lumajang dapat melaksanakan Program PPA-PKH dalam jangka waktu 4 tahun yaitu dimulai tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Pada tahun 2017, Kabupaten Lumajang tidak mendapatkan Program PPA-PKH. Pada umumnya, suatu program dilaksanakan sepanjang waktu, akan tetapi di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 tidak melaksanakan Program PPA-PKH. Dalam ini terdapat usaha pemenuhan fungsi sosial anak melalui pelaksanaan Program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang pada Shelter Krai.

Pelaksanaan Program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun mengalami kemanfaatan baik terhadap pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja maupun terhadap pribadi anak dalam hal pemenuhan hak dan kebutuhan mereka. Keberhasilan dari Program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang, terlihat ketika terdapat 75 persen penerima manfaat (pekerja anak) bersedia untuk melanjutkan pendidikan dasarnya. Pada tahun 2013 penerima manfaat Program PPA-PKH berhasil untuk didaftarkan ke sekolah sejumlah 105 anak. Bertambahnya shelter pada tahun 2014 juga dapat meningkatkan partisipasi anak untuk melanjutkan pendidikan dasarnya yaitu sejumlah 193, tahun 2015 sejumlah 169 dengan pembagian 6 shelter.

Ditinjau dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial, kondisi pekerja anak adalah kondisi anak tidak mendapatkan kebutuhan dan hak dasarnya sehingga anak mengalami disfungsi sosial didalam lingkungannya. Adanya pelaksanaan program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang pada shelter Krai merupakan salah satu bentuk usaha kesejahteraan sosial dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar anak. Bentuk pemenuhan kebutuhan dan hak dasar anak dilakukan dengan cara memberikan pelayanan sosial yaitu dengan melaksanakan pembelajaran selama di shelter dengan jangka waktu 30 hari, dan mengarah kepada peningkatan kapasitas anak,

sehingga anak dapat berfungsi secara sosial dan mendapatkan kesejahteraannya. Dalam proses pelaksanaan tersebut, pelaksana program (pelaksana, pendamping, tutor) untuk memberikan pembelajaran dan rencana yang akan dilakukan selama di shelter.

Berdasarkan uraian dari fenomena atau gejala sosial yang berusaha peneliti tangkap dan dipaparkan, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses pengembalian keberfungsian sosial pekerja anak melalui pelaksanaan Program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang pada Shelter Krai. Untuk melihat proses keberfungsian sosial pekerja anak dalam Program PPA-PKH pada Shelter Krai, maka peneliti merumuskan judul penelitian yaitu "**Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Pekerja Anak**" (Studi Terhadap Kegiatan Kepelatihan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Pada Shelter Krai).

1.2 Rumusan Masalah

Pemenuhan kebutuhan dan hak dasar anak merupakan hal yang penting dilakukan oleh orangtua mengingat anak merupakan generasi yang harus dijaga, dirawat, demi kelangsungan kehidupan yang lebih baik pada generasi mendatang. Anak yang rentan baik secara psikologis dan fisik, menjadikan posisi mereka menghadapi/terlibat pada kondisi masalah sosial seperti anak putus sekolah, pekerja anak, anak terlantar. Kondisi pekerja anak merupakan kondisi dimana anak bekerja penuh waktu dan tidak mendapatkan kebutuhan dan hak dasarnya akan pendidikan dikarenakan bekerja, sehingga anak mengalami disfungsi sosial didalam lingkungannya. Untuk mengembalikan fungsi sosial terhadap anak putus sekolah yang bekerja adalah dengan cara memberikan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar anak dengan tujuan agar anak mendapatkan Kesejahteraan.

Adanya usaha kesejahteraan sosial yang di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang berupa pelaksanaan program PPA-PKH berupaya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar anak sehingga anak

mendapatkan fungsi sosialnya didalam lingkungannya. Oleh karena itu peneliti mempunyai ketertarikan yaitu melihat Implementasi Program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang pada Shelter Krai dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak. Berlandaskan fenomena yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Implementasi Program Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Pekerja Anak?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 untuk mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak di Kabupaten Lumajang pada Shelter Krai

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian ini terdapat 3 hal pokok, sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan bahan untuk penelitian yang akan dilakukan nantinya mengenai pelaksanaan program PPA-PKH dengan orientasi kepada keberfungsian sosi pekerja anak yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang.
2. Sebagai bahan referensi bagi lembaga pelayanan sosial anak mengenai pengembalian keberfungsian sosial pekerja anak.
3. Dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak yang mengalami disfungsi sosial dan cara-cara pemenuhannya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pekerja anak merupakan anak putus sekolah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Kondisi anak bekerja sepenuh waktu menyebabkan anak mengalami disfungsi sosial. Anak yang mengalami disfungsi secara sosial terlihat ketika anak tidak mendapatkan kebutuhan dan hak dasarnya seperti tidak dapat melanjutkan sekolah karena bekerja, anak yang kehilangan masa sosialisasi dan masa bermain serta belajar dengan teman sebayanya dan anak tidak mendapatkan asuhan yang baik dari orangtuanya karena bekerja. Pengembalian keberfungsian sosial anak putus sekolah yang bekerja dapat dilakukan dengan melaksanakan program PPA-PKH yaitu program yang berorientasi kepada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar anak, melakukan penarikan pekerja anak dari tempat bekerja serta mengembalikan anak ke dunia pendidikan.

Menurut Haerunisa et al dalam jurnalnya edisi 2 Tahun 2013 yang berjudul pemenuhan kebutuhan dasar anak oleh panti sosial asuhan anak (PSAA) menyatakan bahwa “ anak dapat berfungsi secara sosial didalam lingkungannya, ketika anak-anak mendapatkan kebutuhan dan hak dasarnya yang bisa didapatkan ketika memasuki masa anak-anak”. Haerunisa juga menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orangtua agar anak mengalami proses tumbuh kembang anak secara optimal, yakni kebutuhan fisik, emosi dan stimulasi. Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 pasal 2 tentang kesejahteraan anak, terdapat 4 hak dasar anak yang harus didapat anak, meliputi hak kesejahteraan, hak pelayanan, hak atas pemeliharaan dan hak atas perlindungan

Kebijakan mengenai permasalahan pekerja anak berupa pemberian program PPA-PKH merupakan sebuah usaha kesejahteraan sosial dari lembaga Dinas Tenaga Kerja, karena berkaitan dengan usia minimum anak diperbolehkan untuk bekerja. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 pada (bab 1 pasal 2 poin 2) Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua upaya, program

dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial..

Sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam permasalahan pekerja anak, tanggung jawab yang diberikan yaitu memberikan pembelajaran selama 30 hari didalam shelter sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi pemerintah yang mempunyai fokus menyelesaikan masalah sosial. Program PPA-PKH merupakan salah satu kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam tataran nasional dan dalam ruang lingkup regional ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kebijakan sosial mengarah kepada Pembangunan sosial dimana (Nugroho, 2014:111) menyatakan Pembangunan sosial terdiri dari pendidikan, kesehatan, keamanan sosial, dan kebijakan perumahan.

Adanya implementasi program PPA-PKH dalam shelter terdapat proses transfer ilmu (pemberdayaan) dari tutor kepada Pekerja anak. Proses pemberdayaan dilakukan dalam shelter (rumah singgah) selama 1 (satu) bulan. Friedman dalam Fakhrudin (2001: 95) pemberdayaan dimaknai sebagai mendapatkan kekuatan (power) dan mengaitkannya dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem atau organisasi untuk dipergunakan agar tercapai kemandirian dalam mengambil keputusan. Sebagai suatu upaya untuk mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak agar tercapai kesejahteraan bagi anak, pelaksana program melaksanakan rencana/ aksi kegiatan yang dilakukan baik sebelum pelaksanaan di dalam shelter, pada saat di shelter dan pasca shelter.

Upaya merencanakan rencana aksi untuk dilakukan pada saat pelaksanaan di dalam shelter, pelaksana program harus menggunakan teknik pengorganisasian (pembagian tupoksi) dari masing-masing stake-holder yang terkait. Menurut John C. Kidneigh (1950:105) dalam buku Social Work Administration mengemukakan pengertian pengorganisasian Administrasi Kesejahteraan Sosial adalah proses mentransformasi kebijakan sosial kedalam pelayanan-pelayanan sosial sehingga terjadi proses timbal balik (berkesinambungan), yaitu mentransformasikan kebijakan ke dalam pelayanan sosial secara kongkrit dan menggunakan

pengalaman-pengalaman untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi guna merubah dan memperbaiki kebijakan. Pengorganisasian dari masing-masing stakeholder sangat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan program PPA-PKH yaitu menarik pekerja anak dari tempat bekerja dan Mengembalikan ke dunia pendidikan agar tercapai keberfungsian sosial pekerja anak.

2.1 Konsep OAKS (Organisasi, Administrasi Kesejahteraan Sosial)

Menurut John C. Kidneigh (1950:105) dalam buku *Social Work Admiistratation*, Administrasi Kesejahteraan Sosial merupakan proses mentransformasi kebijakan sosial kedalam pelayanan-pelayanan sosial sehingga terjadi proses timbal balik (berkesinambungan), yaitu mentransformasikan kebijakan kedalam pelayanan sosial secara kongkrit dan menggunakan pengalaman-pengalaman untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi guna merubah atau memperbaiki kebijakan. Sedangkan pengertian Administrasi Kesejahteraan Sosial menurut *Skidmore* (1996) adalah suatu tindakan staf yang menggunakan proses-proses sosial untuk mentransformasikan pelayanan-pelayanan sosial dan Administrasi Kesejahteraan Sosial sebagai tindakan dari staff anggota yang memanfaatkan atau mentarnsformasikan kebijakan sosial kedalam pelayanan sosial. Unsur-unsur dalam Organisasi Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Program (*Programme*)

Pertanggung jawaban administrasi yang pertama adalah memelihara program lembaga pemerintah maupun sosial dalam perubahan kebutuhan dan nilai masyarakat dan perubahan nilai kontribusi pekerjaan sosial. Isi program lembaga pemerintah ditentukan oleh pernyataan tujuan yang luas dan tujuan pelaksanaan yang khusus (jelas tujuannya, orang yang dilayani jelas penanganan masalahnya).

2. Keuangan (*Finance*)

Persoalan perencanaan dan pelaksanaan keuangan secara langsung dengan perencanaan program dan keberhasilan keseluruhan pelaksanaan lembaga pemerintah. Keuangan sebaiknya ditentukan dengan seleksi prioritas program.

3. Personalia (*Personel*)

Analisis kebutuhan merupakan esensial untuk isi pekerjaan organisasi yang sebenarnya dan untuk identifikasi personalia yang diperlukan guna mengerjakan pekerjaan. Administrasi personalia yang baik dapat dilihat penggajian tingkatan kompetensi pekerja dalam menjalankan tugas.

4. Struktur Organisasi (*Structure Organization*)

Lembaga pemerintah yang besar perhatiannya lebih banyak diberikan pada struktur organisasional. Keprofesionalan dapat dilihat dari hubungan pekerjaan dengan struktur yang mudah dimengerti hubungan pelaksanaannya.

5. Milik dan peralatan (*Property and Equipment*)

Pencapaian perumahan dan peralatan yang cukup merupakan masalah utama dan terus menerus bagi lembaga pemerintah maupun lembaga sosial, (perumahan seleksi peralatan kantor).

6. Penelitian (*Research*)

Lembaga pemerintah maupun lembaga sosial hendaknya ikut serta dalam pengumpulan data yang cukup untuk dapat mengerjakan laporan pekerjaan pelayanan. Hasil penelitian dapat dibuat untuk penilaian tentang masalah, bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan lembaga pemerintah dan sosial.

7. Hubungan masyarakat (*Public Relation*)

Pelayanan sosial yang efektif seharusnya dipergunakan dan dimanfaatkan untuk dan oleh masyarakat. Tugasnya adalah memelihara hubungan yang efektif dan cooperative dengan lembaga pemerintah lain kelompok masyarakat.

8. Prosedur dan metode (*Methods and Prosedure*)

Pekerjaan penyederhanaan merupakan tujuan utama administrasi perjatian khusus seharusnya dicurhakan untuk isi pencatatan, pengelolaan pekerjaan yang berhubungan dengan secretariat efisiensi, pemeliharaan pencatatan.

Syarat-syarat Administrsi Kesejahteraan Sosial menurut Skidmore (1996) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya proses penyelenggaraan dan pelaksanaan usaha kerjasama sekelompok orang.
- b. Adanya usaha kerja sama sekelompok orang yang terorganisir dan terkoordinir.
- c. Pelaksanaan usaha kesejahteraan sekelompok dipahami oleh nilai-nilai pekerjaan sosial.
- d. Adanya sumber fasilitas dan dana.
- e. Adanya tujuan memberikan pertolongan/ pelayanan sosial kepada masyarakat yang menyangang masalah sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Sedangkan Karakteristik Administrasi Kesejahteraan Sosial adalah menurut Skidmore (1996) sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Lembaga pemerintah secara khusus berbentuk suatu badan/ lembaga umumnya mewakili kepentingan masyarakat.
3. Terdapat rangkaian yang besar dan beragam tentang ukuran skup, stuktur, jenis program dan administrasi / lembaga pemerintah dan sosial.
4. Administrasi mempunyai tanggung jawab untuk mengkaitkan kegiatan internal lembaga dengan masyarakat.
5. Terdapat keperluan yang terus menerus untuk membuat piihan –piihan tentang sumber-sumber .
6. Pelayanan yang ditampilkan oleh lembaga sosial mempunyai unsurpekerjaan sosial semakin besar.

Tugas umum dan peranan administrasi pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

a. Perumusan tujuan.

Pemimpin lembaga merupakan pejabat eksekutif yang bertanggung jawab kepada atasannya tentang pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan. Memberikan masukan keatas berdasarkan pengetahuan dan keahlian teknis professional, pengalaman.

b. Penyiapan struktur formal yang sesuai bagi pelaksanaan tugas lembaga.

Modifikasi perubahan organisasi struktur formal, kesinambungan proses perumusan tujuan dan perencanaan.

c. Menghimpun dan menyalurkan sumber-sumber.

Salah satu tugas pemimpin lembaga pemerintah ialah menghimpun sumber-sumber walaupun ada perbedaan diantara lembaga tergantung dari mana lembaga yang bersangkutan memperoleh sumber-sumbernya.

d. Supervise dan evauasi.

Supervise merupakan bagian utama dalam administrasi pekerjaan sosial. Peranan supervise adalah sebagai seorang yang memberikan dorongan motivasi, pemberian informasi, sebagai pendengar yang baik bagi pekerja.

e. Pembinaan usaha bersama.

Tugas utama administrator adalah memperkecil konflik antara kebutuhan para anggota, memelihara dan membina hubungan kerjasama yang baik diantara berbagai profesi.

Untuk dapat melancarkan kinerja dari sebuah organisasi diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan administrasi sosia adalah sebagai berikut:

1. Prinsip nilai-nilai pekerjaan social;
2. Prinsip kebutuhan masyarakat dan klien;
3. Prinsip tujuan lembaga;

4. Prinsip seting budaya;
5. Prinsip relasi yang bertujuan;
6. Prinsip totalitas lembaga;
7. Prinsip tanggung jawab profesional ;
8. Prinsip partisipasi;
9. Prinsip komunikasi;
10. Prinsip kepemimpinan;
11. Prinsip perencanaan;
12. Prinsip organisasi;
13. Prinsip pendelegasian;
14. Prinsip koordinasi;
15. Prinsip penggunaan sumber;
16. Prinsip perubahan;
17. Prinsip evaluasi;
18. Prinsip pertumbuhan.

Berdasarkan pengertian diatas terlihat bahwa organisasi/lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial harus dapat mentransformasikan kebijakan sosial ke dalam pelayanan-pelayanan sosial, sehingga tercipta kesejahteraan sosial penerima manfaat (pekerja anak). Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang sebagai organisasi pemerintah yang dalam ini memberikan program PPA-PKH yang diorientasikan kepada penarikan pekerja anak dari tempat bekerja untuk selanjutnya didaftarkan ke lembaga pendidikan dengan tujuan agar anak mendapatkan fungsi sosialnya.

2.2 Konsep Usaha Kesejahteraan Sosial

Undang-undang republik Indonesia Tahun 1974 pada (Bab 1 pasal 2 poin 2) Usaha Kesejahteraan Sosial adalah " semua upaya, program, dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial". Selain itu, usaha kesejahteraan sosial atau

social welfare service pada umumnya hanya disebut sebagai pelayanan sosial (*social service*). Friedlander dalam Fakhruddin (2014:14) mengatakan:

"Social welfare service sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan."

Sejalan dengan ini, mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan indikasi dari adanya usaha kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 pada (bab 1 pasal 1 poin 2) adalah "upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial".

Sedangkan untuk pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pada (pasal 1 ayat 6) UU No. 11 Tahun 2009 menjelaskan "pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial". Dan lembaga kesejahteraan sosial dijelaskan pada pasal 1 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2009, adalah organisasi pemerintah maupun sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sumarnonugroho (1982:39), usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan, dan berbagai kegiatan yang secara kongkret berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah-masalah yang dihadapi anggota masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial dapat diarahkan pada individu, keluarga, kelompok, ataupun komunitas. Beberapa contoh dari usaha kesejahteraan sosial yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah:

1. Beberapa tipe unit usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktivitas individu, kelompok ataupun masyarakat contohnya adalah pelayanan konseling pada generasi muda dan lain-lain.

2. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang berupaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan (beban) yang dapat dihadapi oleh para pekerja (yang masih produktif).
3. Jenis usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pencegahan dampak negatif urbanisasi dan industrialisasi pada kehidupan keluarga dan masyarakat atau membantu mereka agar dapat mengidentifikasi dan mengembangkan "pemimpin" dari suatu komunitas lokal.

Sehubungan dengan pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial dikenal adanya konsepsi social service delivery. Istilah delivery mengandung arti pemberian, penyerahan, pelaksanaan, dan distribusi. Dalam sistem "delivery" sasaran utama adalah penerima bantuan. Dilihat dari sasaran perubahan maka sasarannya adalah sumberdaya manusia dan sumber-sumber natural. Dengan melihat sasaran ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial, yaitu:

- a. Penyediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang cukup memadai dan dapat dipakai oleh yang membutuhkan.
- b. Pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial atau penggunaan sumber-sumber pemecahan masalah harus benar-benar dilaksanakan secara efisien dan tepat guna.
- c. Pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial harus tetap bersifat demokratik dan menggerakkan sebanyak mungkin para pelaku perubahan.
- d. Menghindarkan, mencegah dan menghilangkan akibat samping atau dampak yang buruk akibat pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Usaha Kesejahteraan Sosial ini adalah usaha pelayanan yang bersifat formal seperti dalam suatu lembaga yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan usaha kesejahteraan sosial usaha pemenuhan kebutuhan dasar dan hak anak sehingga pekerja anak nantinya bakal ditarik dari tempat mereka bekerja dan kemudian dikembalikan ke dunia pendidikan. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial menurut *Leonard* dalam Sumarnonugroho (1982: 38-39) secara terperinci

dirumuskan bahwa tujuannya antara lain *system maintenance*, *system control*, dan *system change*.

1. *System maintenance*

Tujuan dari sistem ini adalah mencakup pemeliharaan dan menjaga kesinambungan keberadaan serta tatanan nilai-nilai sosial.

2. *System control*

Tujuan dari sistem ini adalah mengadakan kontrol secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada.

3. *System change*

Schneiderman mengungkapkan bahwa tujuan dari sistem ini adalah mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

Gabungan daripada tujuan-tujuan yang telah diuraikan dapat ditemui dalam semua program kesejahteraan sosial. Misalnya program jaminan ekonomi, pengembangan masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan mental, kesejahteraan keluarga dan anak atau semacamnya yang semuanya itu secara langsung untuk menggapai sasaran pemeliharaan control dan perubahan. *Wilensky dan Lebeaux* dalam *Sumarnugroho* (1984: 44) mengemukakan lima kriteria untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat disebut sebagai "usaha kesejahteraan sosial" :

a. *Formal Organization*

Usaha-usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu organisasi yang formal.

b. *Social Sponsorship and Accountability*

Usaha Kesejahteraan Sosial diselenggarakan oleh masyarakat atas dukungan masyarakat.

c. *Absence of Profit Motive as Dominant Program Prupose*

Tidak ada motif mencari keuntungan sebagai tujuan yang menonjol dalam suatu program.

d. Funcional Generalization: An Integrative View Of Human Need

Memiliki fungsi yang bersifat umum yaitu ada kebulatan pandangan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia yang memerlukan bantuan dan perlu dipenuhi.

e. Direct Concern with Human Consumption Needs

Secara langsung berhubungan dengan konsumsi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Adanya pelaksanaan program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang Pada Shelter Krai menunjukkan adanya usaha kesejahteraan sosial dengan berbagai aktivitas yang diselenggarakan terutama pada proses pengasuhan dan pendampingan anak ke dunia pendidikan. Kegiatan yang dilakjkan dengan terorganisir, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah setempat. Proses pemenuhan kebutuhan dan hak ada melalui proses Pendampingan sebelum Shelter, pada saat didalam shelter maupun pendampingan pasca Shelter.

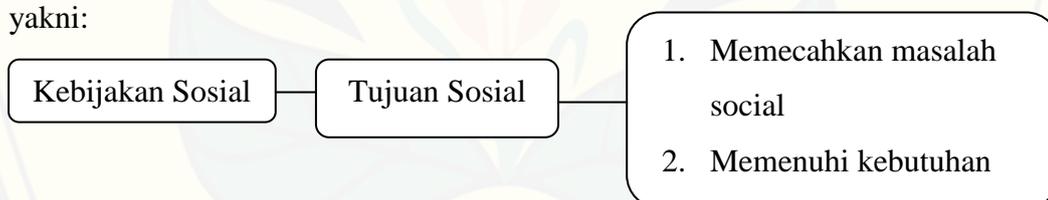
2.3 Konsep Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial dalam Suharto (2014:61) merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan sosial. Dalam Nugroho (2014:111) menyebutkan Pembangunan sosial terdiri dari pendidikan, kesehatan, keamanan sosial dan kebijakan perumahan. Kebijakan sosial menurut Kurniawan, dkk (2013) dalam Nugroho (2014: 113) adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Boulding (1976:11) dalam Nugroho (2014:23), memandang kebijakan sosial mencakup semua kebijakan yang diarahkan kepada pembuatan perubahan struktur masyarakat dan karena tidak ada kebijakan yang dapat diabaikan dari hal ini. Kebijakan sosial akan menjadi sekadar nama lain untuk kebijakan pemerintah.

Kebijakan Sosial adalah pemahaman tentang kesejahteraan sosial dan berhubungan dengan pendidikan masyarakat, perawatan kesehatan, perumahan,

dan keamanan sosial (Nugroho 2014:16). Pembangunan di Negara-Negara berkembang akan selalu menciptakan warga Negara marginal yaitu mereka yang tidak mempunyai akses terhadap proses perkembangan dan oleh karenanya tertinggal dalam proses pembangunan. Kebijakan sosial diperlukan untuk memecahkan masalah sosial. Masalah sosial dinegara – Negara berkembang berhubungan dengan keadilan sosial seperti pemerataan pendidikan keseluruhan wilayah.

Menurut T.H.Marshall (1965) dalam Nugroho (2014:24) mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara dengan menyediakan layanan dan pendapatan bagi mereka. Inti pokoknya terdiri dari jaminan sosial, bantuan publik, kesehatan dan pelayanan kesejahteraan serta kebijakan perumahan. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Tittmuss (1977) dalam Nugroho (2014:25) yang menyatakan bahwa kebijakan sosial dapat dipahami sebagai: Administrasi sosial, pelayanan sosial, kesejahteraan sosial, keamanan sosial dan negara. Menurut Suharto (2014:61) kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial mengandung dua pengertian yang saling terkait yakni:



Gambar 2.1 Tujuan sosial kebijakan sosial

Tujuan pemecahan masalah memiliki arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya, kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat misalnya (kenakalan remaja). Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan (mencegah terjadinya masalah, mencegah tidak berulang atau timbul lagi atau mencegah meluasnya masalah) atau pengembangan

(meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya).

Secara lebih rinci, tujuan-tujuan kebijakan sosial adalah :

1. Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi sendiri melainkan kolektif.
3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal personal maupun eksternal-struktural.
4. Meningkatkan situasi sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan pencapaian kebutuhan masyarakat.
5. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Menurut David Gil (1973) dalam Suharto (2014:62) untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan sosial, terdapat perangkat dan mekanisme kemasyarakatan yang perlu diubah, yaitu yang menyangkut :

1. Pengembangan sumber-sumber
Meliputi pembuatan keputusan-keputusan masyarakat dan penentuan pilihan-pilihan tindakan berkenaan dengan jenis, kualitas, kuantitas semua barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang ada dalam masyarakat.
2. Pengalokasian status
Menyangkut peningkatan dan perluasan akses serta keterbukaan kriteria dalam menentukan akses tersebut bagi seluruh anggota masyarakat.
3. Pendistribusian hak
Merujuk pada perluasan kesempatan individu dan kelompok dalam mengontrol sumber-sumber material dan non material.

Kebijakan sosial harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, berserikat, dan berkumpul dalam organisasi sosial, tanpa mempertimbangkan usia, jenis kelamin, status sosial

ekonomi, ras, suku bangsa dan agama. Kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi merupakan Kebijakan tentang penanganan terpadu untuk menekan angka anak putus sekolah dan menarik pekerja anak dari tempat mereka bekerja. Kebijakan tersebut adalah Program PPA-PKH (pengurangan pekerja anak untuk mendukung program keluarga harapan). Adanya kebijakan tentang program PPA-PKH didesa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang menunjukkan adanya usaha kesejahteraan sosial dari pemerintah dengan berbagai aktivitas didalam program dengan tujuan untuk mengembalikan anak putus sekolah dan pekerja anak ke dalam bangku sekolah melalui kegiatan didalam shelter.

2.4 Konsep Implementasi Program

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai faktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Implementasi kebijaksanaan banyak macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber (personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan diatas semuanya-uang) yang dibutuhkan agar implementasi berjalan dengan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan kongkret, regulasi, serta rencana-rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Artinya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan

pelayanan atau pembayaran batasan-batasan tentang kegiatan atau apapun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program (wirawan,2012:17). Jones dalam Gaffar (1997: 34) menyebutkan tiga macam aktivitas implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. *Organization: The establishment or rearrangement of resources, unit, and methods for putting a Policy into effect.*
2. *Interpretation: The translation of language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives.*
3. *Application: The routine provision of service, payments, or others agree upon objectives or instruments.*

Aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (resources), unit-unit (units), dan metode-metode (methods) yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan) kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan. Aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas interpretasi (penjelasan) substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Aktivitas aplikasi (application) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau yang lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada (routine provision of service, payment, or other agree upon objectives or instruments).

Berikut ini akan dijabarkan lebih operasional mengenai proses implementasi suatu kebijakan public yang mencakup tahap interpretasi (interpretation), tahap pengorganisasian (organization), dan tahap aplikasi (application).

1. Tahap Interpretasi (*Interpretation*)

Tahap Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (strategic policy) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (managerial policy) dan

kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (operational policy). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislative (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah (bupati atau walikota) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

Aktivitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (stakeholders) dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran (kelompok sasaran) kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan kebijakan tersebut.

2. Tahap Pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya: penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan): penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis): dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

3. Tahap Aplikasi (*Application*)

Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan

perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial (social intervention) untuk menyelesaikan masalah, problem, situasi, keadaan yang dihadapi masyarakat. Program juga diadakan untuk mengubah keadaan masyarakat yang dilayani. Program merupakan implementasi dari suatu kebijakan. Dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program (winarno,2012:147).

Menurut *Van Meter and van Horn* dalam Subarsono (2006:99) mengemukakan bahwa terdapat enam variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur.
2. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non manusia.
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementator sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi, variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementator yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki implementator.

Implementasi hendaknya dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, jika tidak maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Rencana atau rancangan yang sudah dibuat dengan baik tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan atau jika tidak maka akan dilaksanakan dengan asal-asalan. Ada banyak rencana yang sudah dibuat tetapi terkadang rencana tersebut tidak berwujud aksi nyata atau dengan kata lain berhenti ditengah jalan. Implementasi selain memerlukan aksi nyata juga membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya. Dalam mengimplementasikan suatu rancangan atau rencana tentu saja ada kendala atau hambatan yang dihadapi. Oleh karena itu dibutuhkan konsistensi agar seluruh rancangan dapat dijalankan dengan benar dan dapat diperoleh hasil yang memuaskan. Pendukung kebijakan memuat arahan dan struktur organisasi yang tepat sehingga memaksimalkan proses pelaksanaan sehingga dari rangkaian implementasi yang akan dilihat berjalan secara sistematis.

2.5 Konsep Kebutuhan dan Hak Anak

2.5.1 Konsep Anak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 poin pertama, disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari poin 12 hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) juga mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Maka, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 18 tahun. Penjelasan mengenai

batas usia 18 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicalai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dikarenakan anak diibaratkan sebuah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina, dan ditingkatkan Kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta ketrampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya. Sebelum membahas mengenai kesejahteraan anak, perlu terlebih dahulu disampaikan mengenai pengertian kesejahteraan sosial dimana akan memudahkan dalam mengkerangkai apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam kaitannya terhadap anak. Menurut *Friedlander* dalam Fakhruddin (2014:29), Kesejahteraan Sosial adalah:

"Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa kesejahteraan sosial mencakup pengertian yang luas, meliputi keadaan baik, sehat dan kepentingan sebagian besar manusia termasuk kebutuhan fisik, mental, perasaan, spiritual dan ekonomi. Begitu pula Kesejahteraan Sosial meliputi lembaga-lembaga utama, kebijakan, program dan proses-proses yang berhubungan dengan penanggulangan dan pencegahan masalah-masalah sosial, perkembangan sumber-sumber manusiawi dan peningkatan taraf hidup. Kesejahteraan Sosial sebagai suatu kondisi salam masyarakat, Midley dalam Adi (2013: 23) melihat Kesejahteraan Sosial sebagai :

"suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta ketika sebagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan".

Tidak jauh berbeda di Indonesia, pengertian mengenai Kesejahteraan Sosial tidak terlepas dari apa yang di rumuskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yakni, "Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (pasal 1 ayat 1).

Dalam Kesejahteraan Sosial ini tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana layaknya. Kesejahteraan anak sangat penting , karena mencakup usaha-usaha untuk mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak dan peningkatan kehidupan keluarga. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 " Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial " (Bab 1 pasal 1).

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, kesejahteraan anak merupakan bidang khusus dalam profesi kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan masalah-masalah Kesejahteraan anak, mengenai kurangnya serta ketidakmampuan orangtua untuk memenuhi kebutuhan anak sebagai akibat kemiskinan dan adanya interaksi yang kurang memadai didalam keluarga, maka perlindungan anak sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk Kesejahteraan anak, khususnya untuk anak-anak yang bekerja dan anak-anak dari pemukiman kumuh yang sangat rentan sekali untuk tereksplorasi secara ekonomi dan seksual. Dalam fenomena pemberdayaan pekerja anak melalui pemberian program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang Pada Shelter dapat menekan jumlah pekerja anak. Adanya pelaksanaan program PPA-PKH, menunjukkan adanya intervensi sosial atau usaha kesejahteraan sosial dari Lembaga Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait dengan pemberdayaan pekerja anak agar kebutuhan dan hak anak terpenuhi. Yang mana hal ini menjadikan peneliti perlu kiranya mengetahui tahapan-tahapan pelaksanaan program PPA-PKH yang memiliki kaitannya dengan Kesejahteraan bagi anak-anak yang bekerja.

2.5.2 Konsep Kebutuhan

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda karena kebutuhan manusia lebih bersifat subjektif, namun dalam kebutuhan dasarnya, manusia secara umum memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang sama. Maryam er, al. (2007:3) hierarki diartikan sebagai proses atau system yang menenpatkan materi (benda-benda) dan orang menurut derajat tingkat kepentingannya. Secara umum Maslow dalam (Setiawan, 2014:39) menguraikan kelima tingkat ini sebagai berikut:

- a. Tingkat pertama adalah kebutuhan fisik (*Physiological Needs*), yang merupakan kebutuhan paling mendasar dan mendominasi manusia. Kebutuhan ini bersifat kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan oksigen, makanan, air dan sebagainya, yang kalau tidak dipenuhi, maka manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang paling mendasar, oleh karenanya, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka organisme akan didominasi olehnya, dan kebutuhan lainnya akan tenggelam, tidak dapat muncul di permukaan. Contohnya orang miskin yang memiliki kelaparan berat, ia akan termotivasi sepenuhnya untuk mencari makanan, memuaskan rasa kebutuhan laparnya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak atau belum mempengaruhinya. Karena itu, orang yang kelaparan berat sulit untuk diajak berbicara tentang cinta, nilai-nilai, etika, dll., sebelum kebutuhan akan makanan dan minuman terpenuhi. Kekurangan kebutuhan fisik membuat potensi manusia yang tinggi menjadi tenggelam. Orang yang kelaparan dan kehausan berarti tidak memungkinkan untuk berkonsentrasi pada pekerjaan yang kompleks, belajar, berfilsafat, berprestasi olahraga, merenungkan nilai-nilai dan iman.
- b. Tingkat kedua, adalah kebutuhan akan rasa aman (*Safety Needs*). Setelah kebutuhan biologis *relative* terpenuhi, muncul kebutuhan lain yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan akan rasa aman, seperti kebutuhan akan: keamanan, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, kebebasan dari rasa takut dan kecacauan, kebutuhan akan struktur, keteraturan, hukum dan batasan, kuat dalam perlindungan, dan seterusnya. Maslow menunjukkan bahwa manusia

membutuhkan rasa aman dalam hidupnya, khususnya rasa aman terhadap bahaya dan ancaman. Manusia membutuhkan stabilitas rasa aman untuk dapat mengembangkan hidupnya lebih baik.

- c. Tingkat ketiga adalah kebutuhan akan kepemilikan dan cinta (*The Belongingness and Love Needs*). Jika kebutuhan fisik dan rasa aman telah terpenuhi dengan baik, akan muncul kebutuhan rasa cinta dan perhatian, dan kebutuhan rasa memiliki dan dimiliki. Kebutuhan cinta adalah termasuk kebutuhan untuk member dan menerima perhatian orang lain. Maslow berpandangan bahwa manusia dalam hidupnya selalu berusaha mengatasi perasaan kesendiriannya dan alienasi. Manusia adalah makhluk social yang hidup bersama orang lain. Manusia selalu membutuhkan orang lain sejak lahir.
- d. Tingkat keempat adalah kebutuhan untuk dihargai (*The Esteem Needs*). Apabila ketiga tingkat terdahulu telah terpenuhi dan terpuaskan, kebutuhan untuk dihargai akan muncul dan menjadi dominan. Maslow menyatakan bahwa semua orang dalam masyarakat (kecuali beberapa yang mengalami gangguan kejiwaan) dalam kondisi normal “punya keinginan untuk menghormati atau menghargai dirinya sendiri dan juga untuk dihormati oleh orang lain”. Kebutuhan ini menurut Maslow dapat di klasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, kebutuhan untuk dianggap kuat, mampu mencapai sesuatu, memadai, punya keahlian dan berkompetisi, percaya diri untuk menghadapi dunia, mandiri dan bebas. Kedua, manusia mempunyai keinginan untuk memiliki reputasi dan prestise tertentu (didefinisikan sebagai penghormatan atau penghargaan dari orang lain), yang berupa status, kebanggaan, martabat, atau apresiasi tertentu lainnya. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan penghargaan ini menghasilkan dampak psikologis berupa rasa percaya diri, bernilai kuat, mampu dan memadai, menjadi orang yang berguna dan dibutuhkan oleh dunia. Tetapi sebaliknya, tidak terpenuhinya kebutuhan ini dapat menghasilkan perasaan minder, lemah, putus asa, atau bahkan resiko ketakutan atau bentuk nerosis lainnya.
- e. Tingkat kelima ialah pada hierarki berupa kebutuhan untuk aktualisasi diri (*Self Actualization*). Kebutuhan puncak ini mulai aktif dan muncul setelah empat kebutuhan lain yang mendasarnya terpuaskan. Maslow menggambarkan

aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kelahiran atau penciptaannya. Ungkapan yang digunakan Maslow untuk menggambarkan hal ini adalah “seseorang anak yang ingin berkreatifitas atau mempunyai bakat seni melukis maka dia harus melukis dan mempunyai bakat nari maka ia harus menari”. Apa yang harus manusia lakukan, ia harus lakukan. Manusia harus benar-benar menjadi apa yang menjadi sifat aslinya. Kebutuhan untuk mewujudkan hal tersebut disebut aktualisasi diri.

Menurut Haerunisa, D et al (Tanpa tahun), Ada tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang anak secara optimal, yaitu :

1. Kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan umumnya, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat dan lain-lain.
2. Kebutuhan emosi meliputi segala bentuk hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya.
3. Kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian seorang anak (Hurlock, 1978 : 257).

2.5.3 Konsep Hak Anak

Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian anak adalah:

“Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Menurut Yuditia et al (2015) menyebutkan bahwa posisi anak akan lebih inferior dibandingkan orang dewasa sehingga kecil kemungkinan mereka

berani melawan ataupun membantah perintah dan keputusan orang dewasa. Menurut konvensi hak anak (KHA), anak merupakan individu yang usianya belum mencapai 18 tahun. Dari pengertian diatas dapat dijadikan fikiran bersama bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang membutuhkan pendidikan, perawatan, pemgasaan baik kesehatan, perumahan dan semua hal yang menyangkut kebutuhan perumahan dan hak anak harus dipenuhi oleh orangtuanya. KHA dalam perserikatan bangsa-bangsa 1989 merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud ialah hak asasi manusia untuk anak.

KHA memuat prinsip-prinsip dasar hak anak yang diadopsi menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002. Empat prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. Non-diskriminasi dan kesempatan yang sama

Setiap anak mempunyai hak yang sama. Konvensi ini berlaku untuk semua anak, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya, atau jenis kelamin. Tidak peduli dari mana mereka datang, dari mana mereka tinggal, apa pekerjaan orangtua mereka, apakah mereka memiliki keterbatasan fisik, atau mereka kaya atau miskin. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.

b. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama ketika membuat keputusan yang mungkin berdampak besar pada anak ketika orang dewasa membuat keputusan mereka harus mempertimbangkan apakah ada dampak buruk yang mungkin dialami anak.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan

Anak mempunyai hak untuk hidup. Anak juga harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi mereka. Selain itu mereka berhak atas perkembangan intelektual, sosial dan kultural.

d. Hak partisipasi

Anak memiliki hak untuk mengekspresikan diri dan didengar. Mereka harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada mereka dan pandangan mereka harus dipertimbangkan. Berkaitan dengan ini, usia anak tingkat kematangan dan kepentingan terbaik mereka harus selalu diingat dalam mempertimbangkan ide atau gagasan anak.

Menurut Yuditia et al (2015) perlindungan anak merupakan upaya untuk mencegah dan merespon kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. Selain itu ia mengatakan bahwa perlindungan anak juga salah satu bentuk usaha agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilaksanakan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri. Sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak menimbulkan akibat negative. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala hal untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Kebijakan tersebut didukung dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang mengatur tentang “Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup , tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Hak merupakan sesuatu hal yang dituntut harus terpenuhi setelah melakukan atau melaksanakan kewajibannya. Anak merupakan generasi bangsa dan negeri yang mempunyai hak. Hak anak menurut Sidang PBB pada tanggal 20

Nopember 1959 yang dikutip dari Huraerah (2014:32) adalah hak yang mempunyai sepuluh prinsip tentang hak anak adalah sebagai berikut :

1. Prinsip 1: setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Prinsip 2: setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hokum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Prinsip 3: setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Prinsip 4: setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.
5. Prinsip 5: setiap anak baik secar fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Prinsip 6: setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Prinsip 7: setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Prinsip 8: Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Prinsip 9: setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
10. Prinsip 10: setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentukbentuk lainnya.

Sedangkan menurut pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pada tataran ketiga hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan sosial yang merupakan kebutuhan seperti kebutuhan dihargai termasuk kebutuhan akan pendidikan. Pekerja Anak merupakan anak yang tidak terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu pembelajaran yang harus didapat bagi anak untuk dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Pendidikan tidak hanya didapat dalam lembaga lembaga formal saja melainkan pendidikan dapat diperoleh melalui kegiatan-kegiatan kepelatihan, kursus-kursus yang mempunyai orientasi yang sama dengan pendidikan formal.

Konteks permasalahan yang diangkat adalah tentang penanganan terencana untuk anak putus sekolah dan pekerja anak agar terpenuhinya kebutuhan akan pendidikannya melalui kegiatan PPA-PKH (Pengurangan pekerja anak untuk mendukung program keluarga harapan) di desa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang. Berdasarkan gambaran diatas, Aspek kebutuhan dan hak anak harus dipenuhi dan didapatkan oleh anak sebagai suatu bekal bagi anak untuk menjalani kehidupan dimasa depannya yaitu tentang pendidikan dasarnya.

2.6 Konsep PPA-PKH

Program PPA-PKH merupakan Program Nasional yang tertuang dalam RPJMN periode tahun 2015 sampai 2019. Program ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai instansi terkait baik Pemerintah maupun Non Pemerintah termasuk Komite Aksi Nasional Penghapusan bentuk-

bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (KAN-PBPTA) Dasar Pelaksanaan: Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi ILO Nomor 138 Tahun 1973 Mengenai Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Disamping itu program PPA-PKH diharapkan dapat mendukung keberhasilan program keluarga harapan (PKH) terutama dalam meningkatkan angka partisipasi belajar bagi anak usia wajib belajar yang putus sekolah dan bekerja agar mereka tetap berada pada sistem persekolahan.

Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) adalah kegiatan menarik pekerja anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang putus sekolah untuk dikembalikan ke pendidikan melalui pendampingan di shelter dan dikembalikan ke pendidikan dalam rangka menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Untuk mengurangi jumlah pekerja anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA), pemerintah sejak tahun 2008 telah melakukan kegiatan PPAPKH. Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan adanya kesamaan persepsi dari tim pelaksana PPA-PKH baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota diperlukan pedoman operasional PPA-PKH tahun 2016. Kegiatan PPA-PKH ini bersinergi dengan program keluarga harapan yang dalam pelaksanaannya melibatkan stakeholder terkait antara lain kementerian pendidikan nasional, kementerian sosial, kementerian agama dan instansi atau lembaga yang terkait lainnya baik pemerintah maupun non pemerintah termasuk LSM.

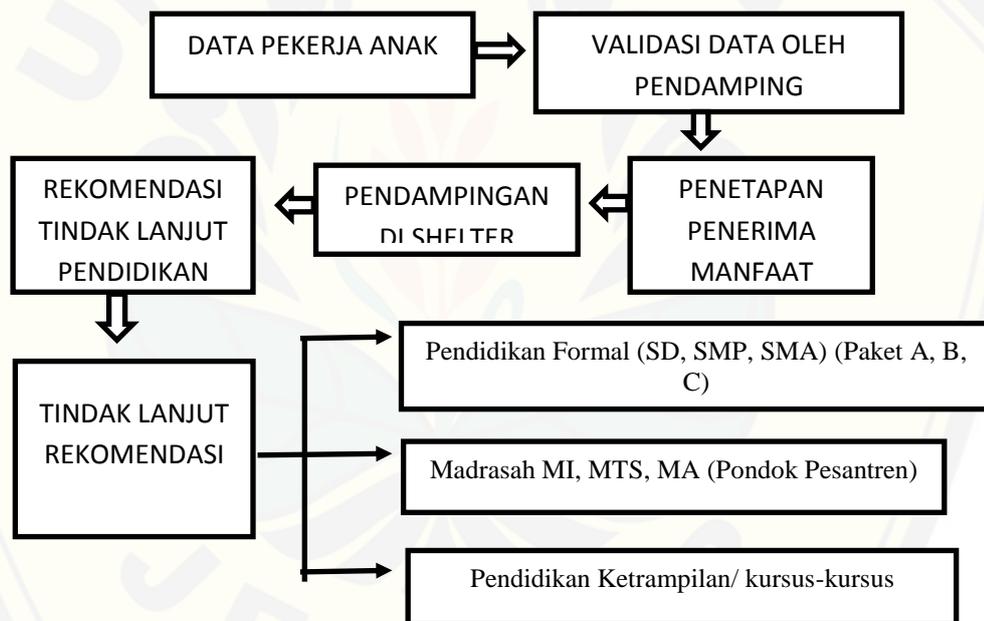
Program PPA-PKH dilaksanakan selama empat bulan berturut-turut dan mulai pelaksanaannya dua bulan sebelum ada pendaftaran pendidikan formal (SD, SMP, SMA, dan SMK). Pada bulan pertama dilakukan perekrutan peserta, pada bulan kedua dilakukan karantina (shelter) selama satu bulan. Pada bulan ketiga anak dikembalikan kembali ke dunia pendidikan dan pada bulan terakhir dilakukan pendampingan kepada peserta yang telah kembali ke dunia pendidikan. Kriteria anak penerima program adalah sebagai berikut:

- a. Anak berusia 13-17 tahun
- b. Anak berasal dari keluarga miskin
- c. Anak putus sekolah dan sedang bekerja

Adapun pedoman dasar dari pelaksanaan program PPA-PKH adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pelaksanaan program PPA-PKH
 - a. Meningkatnya angka partisipasi sekolah pada usia wajib belajar.
 - b. Mengembalikan anak ke dunia pendidikan, baik yang tidak sekolah maupun yang putus sekolah.
 - c. Mengurangi jumlah pekerja anak.
2. Manfaat pelaksanaan program PPA-PKH
 - a. Anak mempunyai motivasi untuk kembali ke dunia pendidikan.
 - b. Anak mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitar dengan baik.
 - c. Anak mempunyai rasa percaya diri untuk mewujudkan cita-citanya.
3. Dasar hukum pelaksanaan program PPA-PKH ditahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. UU No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Nomor 138 Tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).
 - b. UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.
 - c. UU No, 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor.39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
 - d. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran Negara republic Indonesia nomor 5606).
 - e. Peraturan presiden nomor 165 tahun 2014 tentang Penataan tugas dan fungsi cabinet kerja.
 - f. Peraturan presiden nomor 2 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.

- g. Peraturan presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
 - h. Keputusan presiden nomor 59 tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan bentukbentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
 - i. Surat keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI nomor 125 tahun 2016 tentang pelaksanaan kegiatan pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH).
4. Visi/Misi Program PPA-PKH adalah sebagai berikut :
“Menjadikan Anak Indonesia maju, cerdas, dan sukses”.
 5. Tujuan PPA-PKH adalah sebagai berikut :
Mengembalikan Anak Putus Sekolah dan Pekerja Anak ke bangku sekolah.



Gambar 2.2 Mekanisme penarikan pekerja anak

6. Sumber Data Pekerja Anak

Kebijakan PPA-PKH 2016 dalam menetapkan sumberdata untuk mendapatkan pekerja anak sebagai calon penerima manfaat diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebagai pelaksana PPA-PKH didaerah. Sumber data dapat dipilih dari:

- a. Data rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang diterbitkan oleh TNP2K yang teridentifikasi memiliki kartu perlindungan sosial (KPS).
 - b. Data rumah tangga sangat miskin yang mengikuti program keluarga harapan (PKH).
 - c. Data pekerja anak dari sumber data lain.
7. Penetapan penerima manfaat
- Usulan calon penerima manfaat dari kabupaten/kota ditetapkan sebagai penerima manfaat dengan surat keputusan Dijen Binwasnaker selaku penanggung jawab PPA-PKH.
8. Indikator keberhasilan dari program PPA-PKH ditahun 2016 kabupaten Lumajang adalah :
- a. Jika anak memahami pentingnya untuk bersedia sekolah kembali/ pendidikan dasar.
 - b. Program dikatakan berhasil apabila 75% dari penerima manfaat bersedia kembali ke bangku sekolah.
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lengkap.
 - d. Pendamping dan tutor kapasitasnya memadai.
 - e. Jika materi yang telah dipersiapkan telah diberikan secara berkesinambungan.
 - f. Pemenuhan hak dan kebutuhan selama mengikuti program PPA-PKH.
 - g. Kerjasama dengan stake-holder yang terkait.
9. Adapun materi-materi yang diberikan oleh tutor kepada penerima manfaat :
- a. Pemberian materi pendidikan formal (Bahasa, Matematika, IPA, IPS, dll)
 - b. Pemberian Motivasi (Stimulan Semangat)
 - c. Pemberian Pendidikan Vokasional
10. Sarana yang telah dipersiapkan oleh dinas tenaga kerja kabupaten Lumajang.
- a. Lokasi adalah shelter terletak dalam kabupaten/ kota lokasi penerima manfaat kegiatan PPA-PKH yang kondisi dan lingkungan aman dan nyaman bagi anak.

- b. Perlengkapan/ sarana meliputi perlengkapan tidur, perlengkapan makan, perlengkapan belajar, fasilitas listrik, air bersih (MCK), perlengkapan P3K, fasilitas olahraga (tempat bermain), fasilitas tempat ibadah, televisi (hiburan).
- c. Kapasitas satu shelter dapat menampung 30 orang anak dan 3 orang pendamping.
- d. Status dan waktu selama 1 bulan di shelter adalah sewa.
- e. Jenis shelter adalah balai latihan kerja (BLK) baik milik pemerintah maupun swasta, BLKLN, madrasah, pesantren, SKB, PKBM, dan lembaga pendidikan swasta memiliki NPWP.

2.7 Konsep Pemberdayaan

Menurut Sakroni dalam Fakhruddin (2001: 5), Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat kemanusiaannya. Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan individu dan masyarakat untuk menghadapi masa depan. Titik berat pendidikan non formal ada pada aspek afeksi yang diikuti, ketrampilan dan kognisi. Hal tersebut juga diperkuat oleh Milly Mildawati dalam Fakhruddin (2001: 5), pendidikan orang dewasa merupakan penguatan kapasitas (*capacity building*) orang agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat memberdayakan diri dan pada gilirannya memberdayakan masyarakat.

Menurut Ajat Sudiajat Kurnia dalam Fakhruddin (2001: 7), pengembangan kelembagaan sebagai proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga yang mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dengan keuangan yang tersedia. Individu yang tanpa memiliki kapasitas diyakini tidak akan dapat berfungsi sosial yang pada gilirannya tidak berdaya. Bambang dalam Fakhruddin (2001: 7) mengatakan bahwa pengembangan kapasitas dan kapabilitas individu, keluarga ataupun masyarakat merupakan bagian dari proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien yaitu sebagai strategi untuk

meningkatkan daya dukung kelembagaan dalam mengantisipasi masalah dan kebutuhan yang dihadapi.

Ife (1995) dalam Fakhruddin (2001: 95) mengemukakan dua konsep pemberdayaan. Pertama yaitu, pemberdayaan dapat dilihat dari pemberian kekuasaan kepada individu atau kelompok. Pemberian peluang kepada mereka menentukan kekuatan pada tangan mereka sendiri. Kedua, pemberdayaan dilihat dari keberuntungan, ini lebih dilatarbelakangi pada struktur sosial yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di wilayahnya. Struktur sosial merupakan keseluruhan komponen dalam membangun masyarakat yang diarahkan guna memenuhi kebutuhan individu anggota masyarakat terhadap kehidupannya. Friedman dalam Fakhruddin (2001: 95) pemberdayaan dimaknai sebagai mendapatkan kekuatan (power) dan mengaitkannya dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu system atau organisasi untuk dipergunakan agar tercapai kemandirian dalam mengambil keputusan. Menurut Fakhruddin (2001: 96) pemberdayaan adalah upaya (dapat berupa proses, strategi, program, atau metode) ditujukan untuk membantu masyarakat lokal menuju pada kondisi sosial yang lebih baik melalui pendistribusian kembali kekuatan yang dibutuhkan, dan men-setting-nya menjadi symbol-simbol yang mensejahterakan mereka. Dalam hal ini Fakhruddin (2001: 96) mengatakan bahwa pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui kebijakan yang mengacu terhadap 3 hal pokok:

1. *Enabling*, yaitu menciptakan iklim yang mendukung agar potensi berkembang. Iklim yang ada dapat mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan sumberdaya yang dimiliki agar dapat berupaya mengembangkannya.
2. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi yang mereka miliki. Peningkatan kapasitas ini ditujukan untuk membuka akses pada peluang dan penyediaan berbagai masukan yang berkaitan dengan pasar in put dan out put.
3. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan system perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

System ini diarahkan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan praktek-praktek eksploitasi.

Seligman dalam Fakhruddin (2001: 15) dalam penelitiannya menemukan bahwa ketidakberdayaan yang dipelajari memiliki 4 ciri utama yaitu:

a. Keadaan pasif (kekurangan motivasi)

Keadaan pasif ini dapat terjadi dalam situasi positif dimana organisme memperoleh hadiah tak terkendali. Sebagaimana Engerberg, hensen, welker dan thomas (1972) menyimpulkan bahwa hadiah yang tak terkendali menyebabkan organisme kurang mampu belajar bertingkah laku dalam rangka penerimaan hadiah atau penguatan dimasa datang (kemalasan yang dipelajari).

b. Keterbelakangan belajar

Keadaan tidak berdaya dalam mengendalikan situasi yang dihadapi, organisme akan menunjukkan kelambanan atau keterbelakangan belajar.

c. Sikap mengalah

Ketidakterdayaan menurut seligman (1976) pada umumnya bersikap mengalah dan kurang agresif dalam situasi kompetitif dibanding orang yang berdaya.

d. Ketidakterdayaan berkurang sejalan dengan waktu.

Seligman juga menemukan ketidakberdayaan yang dipelajari mengalami penurunan atau berkurang sejalan dengan waktu.

Tore dalam Fakhruddin (2001: 16) mengidentifikasi tiga dimensi yang berkaitan dengan konsep empowerment, yaitu:

1. Suatu proses perkembangan yang dimulai ketika individu tumbuh dan mungkin dapat mencapai puncak dalam perubahan sosial yang lebih besar.
2. Suatu keadaan psikologis yang ditandai dengan keyakinan diri, efikasi diri, dan kontrol diri.
3. Keterbatasan sebagai hasil dari suatu gerakan sosial dimana bermula dengan pendidikan dan partisipasi kekuasaan rakyat dan secara kolektif dengan

kekuasaannya untuk memperoleh kekuatan dan untuk merubah struktur-struktur sosial yang timpang dan menekan (parson, et al., 1994:106).

Suzanne Kindervatter (1979) dalam Fakhruddin (2001: 76) mengemukakan lima strategi pendekatan yang perlu ditempuh dalam rangka pelaksanaan proses pemberdayaan yaitu :

1. *Need Oriented* yaitu pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan.
2. *Endogenous* yaitu pendekatan yang berorientasi pada kondisi dan kenyataan yang ada dimasyarakat.
3. *Self Reliance* yaitu pendekatan yang berorientasi pada terciptanya rasa mampu diri, percaya diri, dan mandiri.
4. *Ecologically Sound* yaitu pendekatan yang tidak mengabaikan aspek lingkungan.
5. *Based On Structural Transformation* yaitu pendekatan yang berorientasi pada perubahan struktur sistem.

Konsep pemberdayaan yang telah dipaparkan, akan digunakan dalam mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pemberdayaan Anak Putus Sekolah melalui program PPA-PKH di Desa Krai kecamatan yosowilangun kabupaten Lumajang. Dimana didalam program PPA-PKH, anak putus sekolah diberikan pembinaan intelektual selama 1 (satu bulan) di Shelter (rumah singgah) dengan tujuan untuk mencapai keberfungsian sosial anak putus sekolah.

2.8 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial adalah salah satu unsur yang berperan penting dalam penelitian ini, sebagaimana kesejahteraan adalah bagian dari tujuan hidup manusia. Menurut James Midgley dalam Huda (2008: 72) kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama, yakni sebagai berikut:

1. Ketika masalah sosial dapat dimanajemen dengan baik
2. Ketika kebutuhan terpenuhi
3. Ketika peluang-peluan sosial terbuka secara maksimal

Kemudian berdasarkan hasil *Pre-Conference Working for the 15th International Conference Working of Social Welfare* Sulistiati dalam Huda (2008: 73) menyatakan bahwa:

“Social Welfare all the organized social arrangements which have as their direct and primary objective the well being of people in social context. It includes the broad range of policies and services which are concerned with various aspects of people live their income , security, healt, housing, education , recreation, cultural tradition, etc.

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan masyarakat, seperti: pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi budaya dan lain sebagainya.

Selain itu kesejahteraan dalam konteks Negara Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan:

“Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Pertanyaan diatas menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang ideal dimana menunjuk terhadap keseimbangan antara aspek sosial, material dan spiritual yang harus dipenuhi oleh individu, kelompok, maupun masyarakat serta keadaan tersebut dapat dipenuhi dalam berbagai cara, seperti melalui pelayanan maupun kebijakan sosial.

Menurut Adi (2013:34) Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dari 4 sudut, sebagai berikut :

1. Kesejahteraan Sosial Sebagai Suatu Kondisi

Berbagai upaya dicanangkan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya, dimana dalam periode kerjanya ada beberapa program kerja yang menjadi target pencapaian yang keseluruhan dari program tersebut tujuan utamanya yakni memberikan pelayanan maksimal

untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berbagai inovasi dan kreasi dilakukan pemerintah agar mendapat jawaban jawaban terbaik untuk tercapainya tujuan. Sebagaimana indikator kesejahteraan dapat terpenuhi dengan beberapa unsur dalam masyarakat yakni dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial disebutkan bahwa dalam pasal 1 ayat 1, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Definisi lain mengenai kesejahteraan sosial dikemukakan Midley dalam Adi (2013:35) adalah suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta karena berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

2. Kesejahteraan sosial dalam kaitannya dengan pembangunan sektoral

Dalam arti sempit kesejahteraan dapat diartikan dalam pengertian yang bersifat sektoral yaitu salah satu sektor pembangunan. Yang mencakup kesejahteraan sosial sering dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh kementerian sosial. Dalam arti luar kesejahteraan sering dikaitkan dengan bidang kesejahteraan rakyat dimana pelayannya terdapat pada kementerian sosial dan beberapa kementerian terkait lainnya (Adi, 2013:35). Kesejahteraan sosial dalam hubungannya dengan institusi dijelaskan Khan dalam (Fakhrudin, 2014:23) bahwa kesejahteraan sebagai sebuah institusi terdiri atas kebijakan dan program-program pemerintah untuk menjamin suatu tingkat minimum tertentu untuk pelayanan-pelayanan sosial, uang dan hak-hak konsumsi, dengan menggunakan kriteria akses atau kriteria distribusi selain mkriteria pasar.

3. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan (praktik)

Sebagai suatu kegiatan kesejahteraan sosial dapat terlihat antara lain dari definisi yang dikembangkan oleh Friedlander dalam Adi (2013:36) yaitu kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dari berbagai institusi-institusi dan usaha-usaha kesejahteraan

sosial yang dirancang guna membantu individu ataupun kelompok agar mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan.

4. Kesejahteraan sosial sebagai Ilmu

Berbagai definisi dapat dikembangkan dalam upaya menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu diantaranya Adi dalam (Adi, 2013:37) menyatakan bahwa: “Ilmu kesejahteraan sosial adalah suatu ilmu yang mencoba mengembangkan pemikiran, strategi dan teknik untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, baik itu itu dilevel mikro, mezzo, maupun makro”. Yang kemudian dalam perkembangan lebih lanjut dalam Adi dalam (Adi, 2013:37) Ilmu kesejahteraan sosial adalah ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang. Berbagai perspektif kesejahteraan sosial tersebut digunakan dalam konteks yang berbeda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan penggunaan dalam tataran teori maupun kehidupan sehari-hari.

Kondisi masyarakat pedesaan yang marginal kurangnya aksesibilitas dan yang bermuara pada ketidakberdayaan masyarakat dimana mengakibatkan lingkaran kemiskinan sulit untuk diputuskan adalah wujud dari ketidakadilan sosial dan kesenjangan sosial antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Untuk mencapai kondisi *well-being* (sejahtera) ada beberapa indikator dalam menilai masyarakat tersebut sejahtera apa tidak. Dimana secara umum kondisi sejahtera dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan *materiil* dan *non-materiil*. Kemudian jika masyarakat tidak dapat mencapai hal tersebut pemerintah maupun pihak swasta memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat yang tidak sejahtera atau tidak berdaya dalam mengembalikan keberfungsian sosial masyarakat. Program Pengurangan Pekerja Anak merupakan wadah atau sarana bagi Anak Putus Sekolah untuk dapat mengaktualisasikan dirinya dan memenuhi kebutuhan dibidang pendidikan.

2.8.1 Keberfungsian Sosial

Setiap manusia ingin menjalankan peran dan fungsinya masing-masing akan tetapi tidak setiap manusia ingin menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara menumbuhkan keberfungsian sosial. Menurut Huraerah (2005) Keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi sosialnya atau kapasitas seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Menurut Achis (2011:21) keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas dan peranannya dalam berinteraksi dalam situasi sosial tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan nilai dirinya demi pencapaian kebutuhan hidup. Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya. Pendekatan keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kehidupan sosial yang lebih realistis dan komprehensif. Pendekatan ini juga menjelaskan bagaimana keluarga merespon dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan situasi lingkungan sekitarnya.

Peningkatan keberfungsian sosial dapat terlihat melalui indikator-indikator keberfungsian sosial. Menurut Achis (2011:21) Indikator-indikator peningkatan keberfungsian sosial adalah :

1. Individu mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan dan fungsinya.
2. Individu intens menekuni hobi serta minatnya.
3. Individu memiliki sifat afeksi pada dirinya dan orang lain atau lingkungannya.
4. Individu menghargai dan menjaga persahabatan.
5. Individu mempunyai daya kasih sayang yang besar serta mampu mendidik.
6. Individu semakin bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.

7. Individu memperjuangkan tujuan hidupnya.
8. Individu belajar disiplin dan manajemen diri
9. Individu memilih persepsi dan pemikiran realistis.

Anak Putus Sekolah yang menjadi pekerja anak merupakan anak yang memiliki permasalahan dalam hal pendidikan karena kebutuhan dan haknya tidak terpenuhi serta rentan untuk mendapatkan keberfungsian sosialnya. Kemudian adanya program sosial Pengurangan pekerja anak yang kemudian berasal dari latar belakang anak putus sekolah membuat anak menemukan Fungsi dan tujuan hidupnya yaitu mendapatkan kebutuhan dan haknya kembali yaitu mendapatkan pendidikan dasar mereka.

2.9 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan suatu bentuk telaah pustaka yang mempunyai peranan penting dalam sebuah penelitian. Salah satu fungsi dari kajian penelitian terdahulu adalah sebagai acuan kerangka berfikir dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Kajian penelitian terdahulu dapat juga digunakan sebagai alat pembanding berupa persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian terhadap penelitian terdahulu harus mempunyai hubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Setelah melakukan penelusuran penelitian terdahulu, penulis menemukan dan menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yang berkaitan dengan konteks penelitian ini. Kedua penelitian tersebut kemudian akan menjadi tambahan wacana pemikiran untuk mengembangkan pola berfikir penelitian. Penjelasan mengenai 2 (dua) penelitian terdahulu yang hendak digunakan, akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Faktor penyebab Anak Putus Sekolah pada tingkat SMP di desa Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tahun 2014

Penelitian dengan judul Faktor penyebab Anak Putus Sekolah pada tingkat SMP di desa Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tahun 2014 yang diterbitkan melalui Universitas Lampung dengan

program studi Pendidikan Geografi pada tahun 2015. Dalam penelitian ini, peneliti melihat permasalahan yang terjadi Sebanyak 86,4 % orangtua Anak Putus Sekolah pada tingkat SMP tergolong kategori berpendapatan rendah. Peneliti juga menjelaskan sebanyak 86,4 % kepala keluarga Anak Putus Sekolah pada tingkat SMP memiliki jumlah anak dalam keluarga tergolong banyak.

Dalam penelitian ini juga di jelaskan sebanyak 77,3 % kepala keluarga Anak Putus Sekolah tergolong dalam kriteria memiliki pendidikan yang rendah dan jarak antara tempat tinggal Anak Putus Sekolah SMP ke sekolah keseluruhan lebih dari 5 (lima) km. Pada metodologi penelitian, pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Keunggulan dari penelitian ini adalah Menggambarkan faktor penyebab Anak Putus Sekolah pada tingkat SMP sehingga hasil penelitiannya tersebut dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Dari penjelasan pada penelitian ini dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Judul "Implementasi program PPA-PKH tahun 2016 untuk mengembalikan keberfungsian Anak Putus Sekolah (Studi terhadap kegiatan Kepalatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang pada Shelter Yosowilangun)".

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menggambarkan faktor penyebab Anak Putus Sekolah sehingga tercipta sebuah kebijakan tentang Anak Putus Sekolah yang nantinya akan mempengaruhi Kesejahteraan sosial Anak Putus Sekolah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus pada faktor penyebab Anak Putus Sekolah tanpa adanya penanganan yang komperhensif.

2. Pelatihan sumberdaya manusia bagi Anak jalanan dalam upaya membentuk perilaku di rumah singgah dan belajar diponegoro Yogyakarta, daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010

Pada penelitian kedua diterbitkan oleh lembaga Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Manajemen Dakwah. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan pendidikan vokasional kepada anak jalanan. Selain itu, hasil dari penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan yang terfokus pada kewirausahaan anak jalanan dalam rumah singgah. Kemudian ada Anak jalanan diponegoro mempunyai kemandirian dari meminta-minta dan mengamen menjadi dapat mencari uang sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Keunggulan dari penelitian ini adalah menggambarkan kebutuhan yang khusus yang harus dimiliki oleh anak jalanan seperti wirausaha dan pendidikan vokasional. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah menggambarkan upaya pemberian kebutuhan akan pendidikan kepada anak dalam bentuk pelatihan sumberdaya manusia.

Selain ada persamaan, penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Perbedaannya adalah Penelitian ini terfokus pada penanganan kepada anak jalanan. Sedangkan penelitian dengan judul Implementasi program PPA-PKH di tahun 2016 untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak putus sekolah terfokus pada Peningkatan kapasitas anak putus sekolah agar mereka dapat berfungsi secara sosial.

Dari pemaparan kedua penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, dapat dijadikan bahan rujukan oleh peneliti untuk menganalisis Implementasi program PPA-PKH di tahun 2016 untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak putus sekolah. Sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan temuan-temuan dilapangan yang sesuai dengan rumusan masalah serta dalam mengambil kesimpulan dan saran pada Penelitian. Selain menjadi referensi penulisan, kedua penelitian yang dipilih dapat membantu dalam memberikan batasan-batasan penelitian sehingga terhindar dari penelitian sebekumnya yang dipilih.

2.10 Kerangka Berfikir Konsep Penelitian

Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian merupakan salah satu hal yang diperlukan agar mencapai tujuan yang diinginkan serta menarik kesimpulan akhir sebagai hasil dari penelitian yang hendak dilakukan. Kerangka pemikiran dapat dimaknai sebagai uraian tentang bagaimana penelitian mengalirkan jalan pikiran secara logis dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Usman (2002: 34) bahwa kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap objek permasalahan. Kerangka berfikir konsep penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi program PPA-PKH di tahun 2016 untuk mengembalikan keberfungsian sosial Pekerja Anak (Studi terhadap kegiatan kepelatihan dinas tenaga kerja kabupaten lumajang pada shelter Krai).

Peneliti melihat banyaknya jumlah pekerja anak yang mengalami disfungsi sosial karena bekerja. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kondisi pekerja anak adalah anak yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar baik untuk dirinya maupun keluarganya, sehingga hak dasar pekerja anak seperti bersekolah, bermain, belajar tidak dapat dipenuhi karena kondisi anak yang bekerja. Dalam hal ini anak mengalami disfungsi sosial karena bekerja. Anak yang mengalami disfungsi sosial apabila anak tidak dapat melanjutkan sekolah karena bekerja, anak kehilangan masa sosialisasi anak seperti masa bermain dan belajar dengan teman sebanyanya serta anak yang tidak mendapatkan asuhan yang baik dari orangtuanya karena bekerja.

Kondisi anak yang mengalami disfungsi sosial dapat mengakibatkan kesejahteraan anak sulit diperoleh anak. Pemberian kebijakan berupa program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang oleh Dinas Tenaga Kerja berusaha mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar anak melalui pembinaan karakter baik sebelum shelter dimulai, pada saat di shelter dan pasca shelter. Melalui pembinaan karakter anak dalam kondisi yaitu pra shelter, shelter dan pasca shelter memberikan kemudahan bagi anak untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak terutama dibidang pendidikan. Tujuan dilaksanakan program PPA-PKH

adalah menarik pekerja anak dari tempat bekerja dan mengembalikan anak ke dunia pendidikan sehingga anak dapat melanjutkan pendidikan.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, penelitian itu merupakan upaya untuk menemukan teori, dan hal itu dilakukan secara baik justru dengan pendekatan induktif. Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam penulisan memecahkan masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan fenomena, latar belakang, dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2007:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena pendekatan ini mampu menjelaskan fenomena dan gejala sosial dengan lebih jelas secara naratif tanpa adanya batasan pengukuran seperti dalam penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami, mencari makna di balik fakta untuk menemukan kebenaran (Sujarweni,2014:21).

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif, sebagaimana beberapa ahli memberikan pengertian yang beragam. Dan beberapa pengertian dalam moleong (2010: 5) memaparkan bahwa:

“Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.”

Hal tersebut juga searah dengan apa yang telah disampaikan oleh Denzim dan Lincoln dalam (Moleong, 2010: 5) menyatakan bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berdasarkan ide penelitian ini yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dirasa tepat oleh peneliti untuk menggunakan metode pendekatan kualitatif. Didalam penelitian ini peneliti cenderung akan menjelaskan atau

mendeskripsikan berbagai fakta yang ada dilapangan dengan murni yaitu dengan cara mengeksplorasi berbagai realitas sosial atau fakta-fakta sosial baik itu terwujud dalam perilaku, tulisan, dan perkataan yang tercermin atau terlihat pada subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Metode pendekatan kualitatif pada penelitian ini akan dijadikan sebagai alat dalam subjek penelitian terkait dengan Program PPA-PKH pada shelter Yosowilangun di Desa Krai kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya untuk menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2012:68). Penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan upaya untuk menggambarkan kondisi, situasi fenomena sosial yang di temukan dilapangan secara mendalam terkait penelitian secara menyeluruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang Implementasi Program PPA-PKH Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Putus Sekolah di Desa Krai Kecamatan yosowilangun kabupaten Lumajang.

3.3 Metode Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian merupakan setting atau konteks sebuah penelitian (Afrizal,2014:128). Lokasi penelitian menjadi penting dalam sebuah penelitian karena menyangkut pencarian data-data yang diperlukan dalam penelitian. Ketepatan dalam menentukan lokasi penelitian menjadi sangat urgent dalam

penelitian ilmiah. Karena berkaitan dengan kebenaran suatu temuan yang digali dan diuji dilapangan. Penulis menggunakan teknik purposive dalam menentukan lokasi penelitian. Oleh karena itu penelitian ini berlokasi di Desa Krai kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang pada program PPA-PKH yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja kabupaten Lumajang, karena di dalamnya terdapat fenomena dan permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian yang ditentukan.

Alasan memilih Shelter Krai yang berada di kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang, karena pelaksanaan pada shelter Krai terdiri dari 2 Shelter dan pemberian materinya sama. Selain itu, pelaksanaan program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) tahun 2016, peserta programnya berasal dari pekerja anak yang tingkat kenakalan anak tinggi. Kemudian peneliti sangat tertarik untuk meneliti program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) pada shelter Krai, karena materi yang diberikan tidak hanya materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan formal seperti bahasa Indonesia, matematika, namun anak-anak diberikan materi yang berkaitan dengan bakat dan minat mereka (pendidikan vokasional). Terakhir, peneliti tertarik untuk meneliti program ini pada shelter Krai, karena pada pelaksanaan program PPA-PKH tahun 2016 pada shelter Krai, terdapat kefleksibelan dalam penjangkangan peserta program dari awalnya pekerja anak kemudian dikembangkan lagi menjadi anak putus sekolah. Di lokasi ini peneliti dapat menemukan fenomena-fenomena yang dapat menjelaskan penelitian ini yaitu mengenai Implementasi Program PPA-PKH tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Putus Sekolah di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan menurut moleong (2007:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Kemudian menurut Bungin (2012:111) Informan adalah subjek yang diwawancarai, dimintai informasi yang di

perkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Peranan penting informan sebagai subjek yang dimintai keterangan mengenai penelitian, menjadi alasan untuk pemilihan informan yang tepat. Sehingga peneliti akan mudah memahami fenomena dalam mendapatkan keabsahan data yang akurat.

Satu-satunya instrument terpenting dalam penelitian kualitatif dalam Irawan (2006:17) adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada objek/ subjek penelitiannya. Penentuan informan dalam penelitian ini, menggunakan metode penentuan informan *purposive*. Bungin (2012:107) menyatakan mengenai pengertian *purposive* yaitu :

“salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu”.

Pernyataan lain mengenai *purposive* yaitu (Irawan,2006:17) sampel *purposive* adalah sampel yang dipilih peneliti dengan cara sengaja, karena sampel ini dianggap memiliki ciri – ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian. Terkait dengan teknik penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive* yang dipaparkan dalam tabel ini:

Tabel 3.1 Teknik Penentuan Informan

Informan Pokok	1. Pelaksana Program (Pelaksana, Tutor, Pendamping)
Informan Tambahan	1. Penerima Manfaat 2. Institusi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lumajang)

Adapun pembagian informan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua kelompok informan berdasarkan masing-masing fungsinya, yaitu:

3.4.1 Informan Pokok

Informan pokok (primary informan) merupakan mereka yang memiliki pengetahuan dan informasi terkait data penelitian yang secara langsung terlibat dalam fenomena penelitian, yaitu sebagai fungsi utama dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012:56) sebagai sumber utama atau informan pokok harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah :

- a. Subjek yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
- b. Subjek yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan-kegiatan yang telah diteliti.
- c. Subjek yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.
- d. Subjek yang cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
- e. Subjek yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Kriteria informan adalah identitas yang dimiliki oleh masing-masing informan, tujuannya untuk mengetahui siapa yang menjadi informan dalam suatu penelitian ilmiah guna mengetahui latar belakang informan. Penyajian karakteristik dan latar belakang informan ini diharapkan mampu membantu peneliti dalam menjelaskan dan menggambarkan tentang Implementasi Program PPA-PKH tahun 2016 untuk mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak. Dari kriteria yang dikemukakan oleh Sugiyono, maka peneliti menyederhanakan kriteria informan pokok dan informan tambahan sehingga memudahkan peneliti dalam memilih informan. Dengan harapan informan yang dipilih tepat dan sesuai serta membantu dalam pemenuhan data penelitian ini. Adapun kriteria informan pokok dan sekunder yang lebih terperinci akan dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kriteria Penentuan Informan

No.	Kriteria Informan Pokok	No.	Kriteria Informan Tambahan
1.	Orang yang melaksanakan program PPA-PKH di	1.	Orang yang merencanakan dan menyiapkan kegiatan awal sampai

kabupaten Lumajang.

akhir namun tidak terlibat aktif pada saat pelaksanaan berlangsung.

2. Orang yang mendampingi penerima manfaat program PPA-PKH yang mempunyai pengalaman melakukan pendampingan selama 2 tahun.
 3. Orang yang menyiapkan rencana pembelajaran dan memandu penerima manfaat selama pelaksanaan program.
 4. Orang yang memberikan informasi tidak cenderung diolah dan dikemas terlebih dahulu.
 5. Orang yang bertempat tinggal di kabupaten Lumajang
2. Orang yang bertempat tinggal di kabupaten Lumajang.
 3. Orang yang memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.
 4. Orang yang menerima manfaat program PPA-PKH yang terlibat aktif dalam mengikuti program.
 5. Orang yang menerima manfaat yang mempunyai niat yang tinggi untuk mengikuti program awal sampai akhir shelter.

Teknik Penentuan Informan	Kategori Informan	Jumlah	Nama Informan
	Pelaksana program PPA-PKH	4	1. YA 2. RI 3. VF 4. EH

Purposive	Pendamping Anak	3	1. WU 2. HH 3. DF
	Tutor Shelter Krai 1 dan Krai 2	2	1. IH 2. NY

Tabel 3.3 Kategori Informan Pokok

Berdasarkan kriteria dari penentuan informan pokok diatas, maka informan yang termasuk kedalam kriteria tersebut berjumlah 9 orang informan pokok yaitu informan Yudo, informan Rur, informan Venti, informan Endang, informan Wahid, informan Husen, informan Devi, informan Imron Huda, informan Nur Yasin. Untuk profil informan pokok yang telah terpilih sesuai dengan kriteria tersebut, akan dijelaskan sebagaimana berikut :

a. YA

YA yang akrab di panggil P. Yudho adalah Laki-laki kelahiran Lumajang 28 Maret 1964. Informan yudho merupakan orang yang berperan penting dalam program PPA-PKH di kabupaten Lumajang, dikarenakan informan yudho menjabat sebagai bendahara pada program PPA-PKH di kabupaten Lumajang. Informan yudho bekerja sebagai badan pengawas ketenagakerjaan dalam ruang lingkup provinsi yang ditugaskan di kabupaten Lumajang. Informan yudho dipilih menjadi informan karena mengetahui alur dari awal sampai akhir pelaksanaan dari program PPA-PKH di seluruh shelter di kabupaten Lumajang. Wawancara dengan informan yudho dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017 dengan durasi dua puluh tujuh menit pada pukul 09.00 sampai dengan 09.45 yang bertempat di Unit Pelayanan Teknis Dinas Pendapatan Provinsi sector Lumajang. Tujuan dilakukan wawancara dengan informan yudho dapat dijadikan tahap awal dalam melakukan penelitian yaitu untuk pengumpulan data mentah. Proses wawancara dengan informan yudho berjalan dengan lancar, karena suasana dalam proses wawancara berlangsung suasana hening. Hasil wawancara dengan informan yudho yang secara

langsung terlibat dalam program PPA-PKH yaitu menjelaskan mulai dari proses persiapan yang dilakukan oleh pelaksana program, pelaksanaan program serta paska program dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. WU

WU yang akrab di panggil wahid adalah laki-laki kelahiran Lumajang, 21 april tahun 1988 yang bertempat tinggal di Jl. Seruni No. 2 Desa Krai RT.5, RW.6 Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Wahid Uddin dipilih sebagai informan pokok karena memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program PPA-PKH di Shelter Yosowilangun yang bertempat di desa Krai serta Wahid Uddin mengetahui proses awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan. Informan Wahid Uddin merupakan pendamping anak program PPA-PKH pada Shelter Yosowilangun. Wawancara dengan informan Wahid Uddin berlangsung pada tanggal 22 November 2017 dengan durasi empat puluh tiga menit pada pukul 19.25 sampai dengan 20.35 WIB. Wawancara bertempat di kediaman informan Wahid Uddin. Sebelumnya peneliti telah mengetahui informan Wahid Uddin dari Observasi awal peneliti pada kegiatan Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan yang bertempat di rumah Wahid Uddin (pemilik tempat/shelter) pada tahun 2016. Tujuan wawancara dengan Wahid Uddin tersebut untuk mengumpulkan data penelitian. Proses wawancara dengan informan Wahid Uddin berjalan dengan lancar, karena informan wahid bersedia untuk diwawancarai serta informan tidak sedang menjalani kesibukan yang padat atau dalam waktu luangnya. Situasi pada saat wawancara berlangsung adalah tidak ramai karena dilakukan pada saat malam hari. Hasil wawancara dengan informan Wahid Uddin (Pendamping Anak) sebagai pendamping anak yang menagalami secara langsung dan mengetahui perkembangan anak awal sampai akhir kegiatan PPA-PKH mulai dari home-visit sampai anak kembali ke bangku sekolah dan mempersiapkan bahan ajar yang akan dilakukan oleh pendamping yang lainnya serta tutor, menjelaskan tentang bagaimana perekrutan pendamping, latar belakang program di Shelter Yosowilangun,

bagaimana pendamping/ pelaksana mempersiapkan sarana dan prasarana pada pra, shelter, dan pasca shelter, bagaimana keterlibatan anak serta output yang akan dilaksanakan pada kegiatan PPA-PKH.

c. HH

HH yang akrab di panggil Husen adalah laki-laki kelahiran Lumajang, 9 Agustus Tahun 1980 yang bertempat tinggal di Jl. Blok Selatan Pantai Krai Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Husen Hanafi dipilih sebagai informan pokok karena memiliki peranan penting dalam pelaksanaan program PPA-PKH di Shelter Yosowilangun yang bertempat di desa Krai serta Husen Hanafi mengetahui proses awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung Program Keluarga Harapan. Informan Husen Hanafi merupakan pendamping anak program PPA-PKH pada Shelter Yosowilangun. Wawancara dengan informan Husen Hanafi berlangsung pada tanggal 23 November 2017 dengan durasi tiga puluh tiga menit pada pukul 18.14 sampai dengan 19.00 WIB. Wawancara bertempat di kediaman informan Husen Hanafi. Sebelumnya peneliti belum mengetahui informan Husen Hanafi dikarenakan peneliti hanya mengetahui informan Wahid Uddin. Tujuan wawancara dengan Husen Hanafi tersebut untuk mengumpulkan data penelitian. Proses wawancara dengan informan Husen Hanafi berjalan dengan lancar, karena informan Husen bersedia untuk diwawancarai serta informan tidak sedang menjalani kesibukan yang padat atau dalam waktu luangnya. Situasi pada saat wawancara berlangsung adalah ramai karena dilakukan pada saat malam hari dan anggota rumah informan membunyikan sound system karena pada saat wawancara berlangsung selang beberapa menit memasuki waktu isya'. Hasil wawancara dengan informan Husen Hanafi (Pendamping Anak) sebagai pendamping anak yang mengalami secara langsung dan mengetahui perkembangan anak awal sampai akhir kegiatan PPA-PKH mulai dari home-visit sampai anak kembali ke bangku sekolah dan mempersiapkan bahan ajar yang akan dilakukan oleh pendamping yang lainnya serta tutor, menjelaskan tentang bagaimana perekrutan pendamping, latar belakang program di Shelter Yosowilangun, bagaimana pendamping/ pelaksana mempersiapkan sarana

dan prasarana pada pra, shelter, dan pasca shelter, bagaimana keterlibatan anak serta output yang akan dilaksanakan pada kegiatan PPA-PKH.

d. RI

RI yang akrab di panggil bu Rur merupakan perempuan kelahiran Sidoarjo pada tanggal 4 februari tahun 1966 yang bertempat tinggal di jalan raya alun-alun Lumajang blok C No. 13 kabupaten Lumajang. Informan Rur dipilih menjadi informan pokok karena memiliki peranan penting dalam program PPA-PKH. Informan Rur mengetahui proses awal sampai akhir pelaksanaan program Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung terlaksananya Program Keluarga Harapan. Informan Rur merupakan salah satu pelaksana program PPA-PKH dikabupaten Lumajang yang mempunyai tugas yaitu mengelola data awal sampai akhir pelaksanaan program. Wawancara dengan Informan Rur berlangsung pada tanggal 29 November 2017 dengan durasi empat puluh dua menit pada pukul 11.00 sampai dengan 11.43 WIB. Wawancara bertempat di kantor Badan Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPRD kabupaten Lumajang). Tujuan wawancara dengan informan Rur tersebut untuk mengumpulkan data penelitian. Proses wawancara dengan informan Rur berjalan dengan lancar, karena informan Rur bersedia untuk diwawancarai serta informan tidak sedang menjalani kesibukan yang padat atau dalam waktu luangnya. Situasi pada saat wawancara berlangsung adalah ramai karena dilakukan pada pagi menjelang siang dan wawancara dilakukan pada kantor informan serta di kantor tersebut banyak orang-orang yang menjalankan aktivitas kantor. Hasil wawancara dengan informan Rur (Pengelola Data) sebagai pengelola Data yang menagalami secara langsung dan mengetahui proses persiapan awal sampai dengan akhir kegiatan PPA-PKH mulai dari perekrutan pendamping, kemudian pendamping harus melakukan atau mencari anak dampungannya yang akan di bawa ke shelter. menjelaskan tentang bagaimana perekrutan pendamping, latar belakang program di Shelter Yosowilangun, bagaimana pelaksana mempersiapkan sarana dan prasarana pada pra, shelter, dan pasca shelter, bagaimana keterlibatan anak serta output yang akan dilaksanakan pada kegiatan PPA-PKH.

e. VF

Informan VF yang akrab di panggil MbK Venti merupakan perempuan kelahiran Sidoarjo pada tanggal 16 november tahun 1990 yang bertempat tinggal di jalan pulosari depan SMKN 1 Lumajang kabupaten Lumajang. Informan Venti dipilih menjadi informan pokok karena memiliki peranan penting dalam program PPA-PKH. Informan Venti mengetahui proses awal sampai akhir pelaksanaan program Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung terlaksananya Program Keluarga Harapan. Informan Venti merupakan salah satu pelaksana program PPA-PKH dikabupaten Lumajang yang mempunyai tugas yaitu membantu pengelolaan data awal sampai akhir pelaksanaan program. Wawancara dengan Informan Venti berlangsung pada tanggal 29 November 2017 dengan durasi empat puluh empat menit pada pukul 12.30 sampai dengan 13.45 WIB. Wawancara bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lumajang. Tujuan wawancara dengan informan Venti tersebut untuk mengumpulkan data penelitian. Proses wawancara dengan informan Venti berjalan dengan lancar, karena informan Venti bersedia untuk diwawancarai serta informan tidak sedang menjalani kesibukan yang padat atau dalam waktu luangnya. Situasi pada saat wawancara berlangsung adalah hening karena dilakukan pada siang hari dan wawancara dilakukan pada kantor informan serta di kantor tersebut sepi dengan orang-orang. Hasil wawancara dengan informan Venti (Pembantu Pengelola Data) sebagai Pembantu Pengelola Data yang menagalami secara langsung dan mengetahui proses persiapan awal sampai dengan akhir kegiatan PPA-PKH mulai dari perekrutan pendamping, kemudian pendamping harus melakukan atau mencari anak dampungannya yang akan di bawa ke shelter. menjelaskan tentang bagaimana perekrutan pendamping, latar belakang program di Shelter Yosowilangun, bagaimana pelaksana mempersiapkan sarana dan prasarana pada pra, shelter, dan pasca shelter, bagaimana keterlibatan anak serta output yang akan dilaksanakan pada kegiatan PPA-PKH.

f. EH

Informan EH yang akrab di panggil Bu Endang merupakan perempuan kelahiran Lumajang pada tanggal 10 April tahun 1960 yang bertempat tinggal di jalan Perum Sukodono Indah No. 14 A Kabupaten Lumajang. Informan Endang dipilih menjadi informan pokok karena memiliki peranan penting dalam program PPA-PKH. Informan Endang mengetahui proses awal sampai akhir pelaksanaan program Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung terlaksananya Program Keluarga Harapan. Informan Endang merupakan salah satu pelaksana program PPA-PKH di kabupaten Lumajang yang mempunyai tugas yaitu Ketua Tim Pelaksana pelaksanaan program. Wawancara dengan Informan Endang berlangsung pada tanggal 4 Desember 2017 dengan durasi empat puluh lima menit pada pukul 11.45 sampai dengan 12.30 WIB. Wawancara bertempat di kantor Dinas Koperasi kabupaten Lumajang. Tujuan wawancara dengan informan Endang tersebut untuk mengumpulkan data penelitian. Proses wawancara dengan informan Endang berjalan dengan lancar, karena informan Endang bersedia untuk diwawancarai serta informan tidak sedang menjalani kesibukan yang padat atau dalam waktu luangnya. Situasi pada saat wawancara berlangsung adalah hening karena dilakukan pada siang hari dan wawancara dilakukan pada kantor informan serta di kantor tersebut sepi dengan orang-orang. Hasil wawancara dengan informan Endang sebagai Ketua Tim Pelaksana yang menagalami secara langsung dan mengetahui proses persiapan awal sampai dengan akhir kegiatan PPA-PKH mulai dari perekrutan pendamping, kemudian pendamping harus melakukan atau mencari anak dampungannya yang akan di bawa ke shelter. menjelaskan tentang bagaimana perekrutan pendamping, latar belakang program di Shelter Yosowilangun, bagaimana pelaksana mempersiapkan sarana dan prasarana pada pra, shelter, dan pasca shelter, bagaimana keterlibatan anak serta output yang akan dilaksanakan pada kegiatan PPA-PKH.

g. DF

Informan DF yang akrab di panggil MbK Devi merupakan perempuan kelahiran Lumajang pada tanggal 17 Februari 1989 yang bertempat tinggal di kedungrejo kecamatan Yosowilangun kabupaten Lumajang. Informan Devi

dipilih menjadi informan pokok karena memiliki peranan penting dalam program PPA-PKH, karena informan Devi menjadi pendamping anak. Wawancara dengan Informan Devi berlangsung pada tanggal 8 Desember 2017 dengan durasi empat puluh lima menit pada pukul 09.00 sampai dengan 09.45 WIB. Wawancara bertempat di kediaman informan. Tujuan wawancara dengan informan Devi tersebut untuk mengumpulkan data penelitian. Proses wawancara dengan informan Devi berjalan dengan lancar, karena informan Devi bersedia untuk diwawancarai serta informan tidak sedang menjalani kesibukan yang padat atau dalam waktu luangnya.

h. IH

Informan IH yang akrab di panggil Pak Imron merupakan laki-laki kelahiran Sidoarjo pada tanggal 10 Mei tahun 1965 yang bertempat tinggal di Jl. Seruni no 45 Krai Yosowilangun Lumajang. Informan Imron dipilih menjadi informan pokok karena memiliki peranan penting dalam program PPA-PKH. Informan Imron mengetahui proses awal sampai akhir pelaksanaan program Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung terlaksananya Program Keluarga Harapan. Informan Imron merupakan salah satu peranan penting dalam program PPA-PKH dikabupaten Lumajang yang mempunyai tugas yaitu sebagai tutor. Wawancara dengan Informan Imron berlangsung pada tanggal 13 Desember 2017 dengan durasi tiga puluh menit pada pukul 10.00 sampai dengan 10.35 WIB. Wawancara bertempat di Kediaman informan. Tujuan wawancara dengan informan Imron tersebut untuk mengumpulkan data penelitian. Proses wawancara dengan informan Imron berjalan dengan lancar, karena informan Imron bersedia untuk diwawancarai serta informan tidak sedang menjalani kesibukan yang padat atau dalam waktu luangnya. Situasi pada saat wawancara berlangsung adalah hening karena dilakukan pada siang hari. Hasil wawancara dengan informan Imron sebagai tutor yang menagalami secara langsung dan mengetahui proses persiapan awal sampai dengan akhir kegiatan PPA-PKH mulai dari rencana pembelajaran.

i. NY

Informan NY yang akrab di panggil Pak Yasin merupakan laki-laki kelahiran Lumajang pada tanggal 3 Februari 1968 yang bertempat tinggal di Jl.

Suwandak Timur No 12 Lumajang. Informan Yasin dipilih menjadi informan pokok karena memiliki peranan penting dalam program PPA-PKH. Informan Imron mengetahui proses awal sampai akhir pelaksanaan program Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung terlaksananya Program Keluarga Harapan. Informan Yasin merupakan salah satu peranan penting dalam program PPA-PKH dikabupaten Lumajang yang mempunyai tugas yaitu sebagai tutor. Wawancara dengan Informan Yasin berlangsung pada tanggal 13 Desember 2017 dengan durasi tiga puluh menit pada pukul 09.14 sampai dengan 10.00 WIB. Wawancara bertempat di Kediaman informan. Tujuan wawancara dengan informan Yasin tersebut untuk mengumpulkan data penelitian. Proses wawancara dengan informan Yasin berjalan dengan lancar, karena informan Yasin bersedia untuk diwawancarai serta informan tidak sedang menjalani kesibukan yang padat atau dalam waktu luangnya. Situasi pada saat wawancara berlangsung adalah hening karena dilakukan pada siang hari. Hasil wawancara dengan informan yasin sebagai tutor yang menagalami secara langsung dan mengetahui proses persiapan awal sampai dengan akhir kegiatan PPA-PKH mulai dari rencana pembelajaran.

3.4.2 Informan Tambahan

Informasi tambahan (secondary informan) merupakan mereka yang tidak terlibat langsung dalam fenomena penelitian, namun mampu memberikan informasi terkait dengan fenomena yang diteliti. Informan tambahan adalah mereka yang dianggap mengetahui informasi meskipun tidak ikut terlibat langsung dalam program. Informan tambahan ialah mereka yang memahami kondisi sosial yang berada didaerahnya.

3.4 Kategori Informan Tambahan

Teknik penentuan informan	Kategori informan	Jumlah	Nama informan
	Institusi	2	1. SH 2. TS

Purposive	Penerima Manfaat	4	<ul style="list-style-type: none"> ◆ LL ◆ RR ◆ MR ◆ AH
-----------	------------------	---	--

Untuk profil informan pokok yang telah terpilih sesuai dengan kriteria tersebut, akan dijelaskan sebagaimana berikut :

- a. **SH** yang akrab di panggil P. Har adalah Laki-laki kelahiran Lumajang 10 November 1965. Informan har merupakan orang yang berperan penting dalam program PPA-PKH di kabupaten Lumajang, dikarenakan informan Suharwoko menjabat sebagai Pembina pada program PPA-PKH di kabupaten Lumajang. Informan har bekerja sebagai kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Lumajang. Informan har dipilih menjadi informan karena mengetahui alur dari awal sampai akhir pelaksanaan dari program PPA-PKH di seluruh shelter di kabupaten Lumajang. Wawancara dengan informan har dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan durasi dua puluh lima menit pada pukul 12.15 sampai dengan 12.35 yang bertempat di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Lumajang. Sebelumnya peneliti telah mengetahui informan har dari awal melakukan proses perijinan kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Lumajang. Tujuan dilakukan wawancara dengan informan har dapat dijadikan tahap awal dalam melakukan penelitian yaitu untuk pengumpulan data mentah. Proses wawancara dengan informan har berjalan dengan lancar, karena suasana dalam proses wawancara berlangsung suasana hening. Hasil wawancara dengan informan har yang secara langsung terlibat dalam program PPA-PKH yaitu menjelaskan mulai dari proses persiapan yang dilakukan oleh pelaksana program, pelaksanaan program serta paska program dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- b. **TS** yang akrab di panggil P. Totok adalah Laki-laki kelahiran Lumajang 13 Maret 1965. Informan totok merupakan orang yang berperan penting dalam program PPA-PKH di kabupaten Lumajang, dikarenakan informan totok

menjabat sebagai Wakil pada program PPA-PKH di kabupaten Lumajang. Informan tokoh bekerja sebagai sekretaris dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Lumajang. Informan tokoh dipilih menjadi informan karena mengetahui alur dari awal sampai akhir pelaksanaan dari program PPA-PKH di seluruh shelter di kabupaten Lumajang. Wawancara dengan informan tokoh dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2017 dengan durasi dua puluh enam menit pada pukul 11.50 sampai dengan 12.14 yang bertempat di Kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Lumajang. Sebelumnya peneliti telah mengetahui informan tokoh dari awal melakukan proses perijinan kepada dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Lumajang. Tujuan dilakukan wawancara dengan informan tokoh dapat dijadikan tahap awal dalam melakukan penelitian yaitu untuk pengumpulan data mentah. Proses wawancara dengan informan tokoh berjalan dengan lancar, karena suasana dalam proses wawancara berlangsung suasana hening. Hasil wawancara dengan informan tokoh yang secara langsung terlibat dalam program PPA-PKH yaitu menjelaskan mulai dari proses persiapan yang dilakukan oleh pelaksana program, pelaksanaan program serta paska program dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

- c. **RR** yang akrab di panggil riris adalah Perempuan kelahiran Lumajang 22 Mei 1999. Informan riris merupakan anak atau penerima manfaat yang terlibat aktif awal sampai akhir program PPA-PKH. Informan riris merupakan anak yang putus sekolah namun sedang ingin mencari pekerjaan di wilayah yosowilangun. Informan riris dipilih menjadi informan karena sesuai dengan kriteria pemilihan informan Pokok dan merupakan orang yang terlibat dalam kegiatan Wawancara dengan informan riris dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2017 dengan durasi empat puluh menit pada pukul 19.15 sampai dengan 19.55 yang bertempat di kediaman informan. Tujuan dilakukan wawancara dengan informan riris dapat dijadikan sumber informasi dalam melakukan penelitian yaitu untuk pengumpulan data mentah. Proses wawancara dengan informan riris berjalan dengan lancar, karena suasana dalam proses wawancara berlangsung suasana hening.

- d. **LL** yang akrab di panggil lili adalah Perempuan kelahiran Lumajang 21 Juni 2000. Informan lili merupakan anak atau penerima manfaat yang terlibat aktif awal sampai akhir program PPA-PKH. Informan lili merupakan pekerja di wilayah kompleks perumahan yosowilangun dengan jenis kerja yang dialami adalah karyawan toko. Informan lili dipilih menjadi informan karena sesuai dengan kriteria pemilihan informan Pokok dan merupakan orang yang terlibat dalam kegiatan Wawancara dengan informan lili dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2017 dengan durasi Tiga puluh lima menit pada pukul 18.25 sampai dengan 19.00 yang bertempat di kediaman informan. Tujuan dilakukan wawancara dengan informan lili dapat dijadikan sumber informasi dalam melakukan penelitian yaitu untuk pengumpulan data mentah. Proses wawancara dengan informan lili berjalan dengan lancar, karena suasana dalam proses wawancara berlangsung suasana hening.
- e. **MR** merupakan laki-laki kelahiran Lumajang tanggal 8 April 2000. Informan Rizal merupakan anak atau penerima manfaat yang terlibat aktif dari awal sampai akhir kegiatan PPA-PKH tahun 2016 pada Shelter Krai. Informan informan Rizal merupakan pekerja di wilayah kalipepe Yosowilangun dengan jenis pekerjaan pekerja informal (buruh tani). Informan Rizal dipilih menjadi informan karena sesuai dengan kriteria informan pokok dan merupakan orang yang terlibat dalam kegiatan. Wawancara yang dilakukan oleh informan rizal dilaksanakan tanggal 21 Desember 2017 dengan durasi 40 menit pada pukul 19.05 sampai 19.45 yang bertempat dikediaman informan. Tujuan dilakukan wawancara dengan informan rizal adalah dapat dijadikan sumber informasi dalam melakukan penelitian yaitu untuk pengumpulan data, mentah. Proses wawancara dengan informan rizal berjalan dengan lancar, karena suasana dalam proses wawancara berlangsung suasana hening.
- f. **AH** merupakan laki-laki kelahiran Lumajang tanggal 21 April 1999. Informan Hamidin merupakan anak atau penerima manfaat yang terlibat aktif dari awal sampai akhir kegiatan PPA-PKH tahun 2016 pada Shelter Krai. Informan informan Hamidin merupakan pekerja di wilayah Krai Yosowilangun dengan jenis pekerjaan pekerja informal (buruh tani). Informan Hamidin dipilih menjadi informan karena sesuai dengan kriteria informan pokok dan

merupakan orang yang terlibat dalam kegiatan. Wawancara yang dilakukan oleh informan rizal dilaksanakan tanggal 21 Desember 2017 dengan durasi 40 menit pada pukul 20.00 sampai 20.40 yang bertempat dikediaman informan. Tujuan dilakukan wawancara dengan informan Hamidin adalah dapat dijadikan sumber informasi dalam melakukan penelitian yaitu untuk pengumpulan data, mentah. Proses wawancara dengan informan hamidin berjalan dengan lancar, karena suasana dalam proses wawancara berlangsung suasana hening.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulandata merupakan proses yang tidak dapat terlepas dalam sebuah penelitian. Hal ini karena hasil dari sebuah penelitian tergantung dari data yang diperoleh. Dalam melakukan pengumpulan data, diperlukan teknik yang relevan dan sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih. Menurut Sujarweni (2014:74) teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menjaring informasi dari responden atau informan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

“Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian” (Sujarweni, 2014:74). Dengan demikian metode observasi sangat diperlukan dalam proses penelitian untuk membantu peneliti memahami secara detail objek yang akan diteliti. Secara lebih detail, Bungin (2012:118) menjelaskan bahwa :

“Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti Telinga, Mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu pancaindra lainnya”.

Nasution (dalam Sugiyono, 2014:64) menjelaskan bahwa “ observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Hal ini menurut Sugiyono (2014:64), “ para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu, fakta melalui dunia kenyataan

yang diperoleh melalui observasi”. Mengenai jenis observasi, Bungin (2012:118) membagi observasi menjadi tiga jenis yaitu observasi partisipasi, observasi berstruktur, dan observasi kelompok tidak berstruktur. Dalam observasi partisipatif, sugiyono (2014:64) menjelaskan bahwa “ Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari – hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumberdata, dan ikut merasakan suka dukanya”.

Observasi Tidak berstruktur adalah “ Observasi dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Dengan demikian, pada observasi ini pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek” (Bungin,2012:120). Selain kedua jenis observasi yang telah dijelaskan, masih ada satu model observasi kelompok. “Observasi ini dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus” (Bungin,2012:120).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis Observasi Tidak Terstruktur dengan alasan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data penelitian dikarenakan program atau kegiatan PPA-PKH telah berakhir pada tahun 2016. Peneliti akan mencoba melihat fenomena yang ada pada kegiatan PPA-PKH di shelter Krai yang bertempat di Desa Krai dengan memosisikan peneliti sebagai penduduk umum sehingga program PPA-PKH dapat dilihat secara alamiah pada penerapannya dilapangan. Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi shelter Krai di Desa Krai serta mengamati kegiatan yang ada di dalam shelter untuk mendapatkan gambaran umum yang dilakukan oleh Pelaksana program dalam kegiatan untuk menangani permasalahan pekerja anak. Selain itu, peneliti mengamati aktivitas anak dalam kegiatan dan tidak ikut terlibat didalam kegiatan. Dengan begitu peneliti hanya akan focus pada data yang berkaitan dengan Implementasi program PPA-PKH pada tahun 2016 sehingga tercipta keberfungsian sosial pekerja anak yang putus sekolah.

Observasi sendiri dilakukan pada tanggal 1 dan 25 mei 2016 dengan mengunjungi dan mengamati aktivitas apa saja yang dilakukan orang-orang dalam shelter. Kemudian observasi yang kedua dilakukan dengan menanyakan hal-hal

yang terfikir dalam pikiran peneliti kepada salah satu anak-anak dampingan di shelter terkait kegiatannya seperti apa dan pesertanya dari mana saja. Selama observasi atau pengamatan dilakukan banyak hal yang ditemui atau terlihat di lokasi penelitian, diantaranya jika program pada pedoman program yang diketahui oleh peneliti dalam pencarian di jurnal-jurnal ilmiah bahwa penerima program Pengurangan Pekerja Anak untuk mendukung terlaksananya Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) pada umumnya adalah pekerja anak dan berasal dari Keluarga Sangat Miskin (RTSM) pada kegiatan di Shelter Krai ini terdapat kefelsibelan perekrutan penerima program yakni menjadi anak putus sekolah.

Selama observasi yang dilakukan peneliti juga mengamati bahwa pelaksanaan program PPA-PKH Tahun 2016 pada Shelter Krai terdiri dari 2 Shelter yang ditempatkan dalam satu tempat yang beralamatkan di Jalan Seruni No. 2 Desa Krai. Selain terdapat 2 shelter dalam pelaksanaan program PPA-PKH pada shelter Krai, peneliti melihat proses pembelajaran yang diberikan sama dengan pelaksanaan program dengan satu shelter. Kemudian, penerima manfaat dari program PPA-PKH ini diberikan suatu pelatihan yang berbeda pada umumnya, yaitu dengan menggunakan jenis pelatihan pendidikan vokasional. Berdasar pada pengamatan peneliti dalam pelaksanaan program PPA-PKH pada shelter kraik, penerima manfaat atau anak yang menerima program PPA-PKH mempunyai latar belakang anak yang nakal, karena sebagian besar pekerjaan anak berasal dari sector informal (pertanian).

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007:196). Hal ini diperkuat oleh Afrizal (2015:134) bahwa” dalam hal ini seorang pewawancara sendiri yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil”. Terkait maksud mengadakan wawancara, Lincoln dan guba (dalam Moleong, 2007:186) menjelaskan antara lain : “mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain – lain....” Pada intinya Sujarweni (2014:74) menjelaskan bahwa

“Wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan.

Esterbeg 2002 dalam (Sugiyono 2014: 73), mengemukakan beberapa wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Dimana dalam wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan menggunakan *guide interview* dalam pengumpulan datanya. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pertanyaan ditulis yang merupakan alternative dan jawabannya pun telah dipersiapkan. Kedua, adalah wawancara semi struktur dimana jenis wawancara ini termasuk kategori *indept interview* dimana dalam penerapannya lebih jelas, tujuan wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara dimana pendapat dan ide-idenya. Peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Ketiga yaitu wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara yaitu semi struktur. Wawancara semi struktur disebut juga *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur . Dengan demikian teknik ini digunakan apabila peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja yang akan diperoleh. Sugiyono (2014: 72) menjelaskan bahwa “... dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan tertulis yang alternative jawabannyapun telah dipersiapkan”.

”Wawancara tidak terstruktur. Adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya merupakan garis – garis besar permasalahan yang akan ditanyakan” (Sugiyono, 2014:75).

Selain itu, Moleong (2007:190) menjelaskan bahwa dalam wawancara tidak terstruktur, “pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan Tanya-jawab

mengalir seperti dalam percakapan sehari – hari”. Perlakuan wawancara yang dilakukan peneliti berbeda pada setiap kategori informan, seperti yang dilakukan kepada informan tambahan anak-anak. Dengan karakter anak yang tentunya berbeda dengan kondisi karakter orang dewasa maka proses wawancaranya lebih sederhana dengan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi informan seperti umur, kualifikasi/ tingkat pendidikan. Berbeda dengan pelaksana program, pendamping dan tutor serta institusi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikarenakan mereka secara pendidikan sudah mumpuni dan lebih baik untuk melakukan komunikasi. Persamaan perlakuan terhadap semua informan dilakukan agar proses wawancara yang dilakukan tidak mengalami miskomunikasi dan tentunya pertanyaan yang ditanyakan sesuai dengan *guide interview*. Berdasarkan uraian jenis metode wawancara dan pembagian informan yang dijelaskan, berikut akan dipaparkan mengenai proses wawancara dan deskripsi informan yang berkaitan dengan data apa saja yang akan di dapatkan dari informan yang telah diuraikan tadi. Selanjutnya, akan di paparkan sebagai berikut:

1. Informan Pokok

Wawancara dari informan EH, YA, dan RI serta VF digali dari data tentang pengetahuan informan mengenai pelaksanaan program PPA-PKH pada tahun 2016 mulai dari tahap perencanaan, pengimplementasian sampai dengan selesainya program sehingga peneliti akan lebih mudah mendeskripsikan pelaksanaan program PPA-PKH seperti apa dengan logika pikir peneliti pada awal ketertarikan melakukan penelitian. Sedangkan untuk informan WU, DF dan HH dimintai informasi terkait dengan aktivitas anak, aktivitas pendamping dalam melakukan pendampingan terhadap pekerja anak yang mengikuti program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung program Keluarga Harapan pada tahun 2016 di shelter Krai. Tidak jauh dari pendamping, informan IH dan NY yang juga merupakan bagian dari program PPA-PKH Tahun 2016 pada Shelter Krai yaitu sebagai tutor dimintai informasi mengenai proses pelaksanaan di shelter selama 30 hari. Informasi yang ingin didapatkan dari informan tutor meliputi, proses pembelajaran dan materi yang diberikan oleh tutor selama satu bulan.

2. Informan Tambahan

Wawancara dengan penerima manfaat program PPA-PKH tahun 2016 pada shelter Krai baik shelter Krai 1 dan shelter Krai 2 terdapat LL, RR, MR dan AH menjadi informan tambahan untuk dimintai informasi mengenai kegiatan dan manfaat yang mereka terima dari adanya program PPA-PKH tahun 2016 pada Shelter Krai serta untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan. Dimana hal ini tidak akan diperkuat oleh wawancara dengan wali murid/ orangtua karena usia anak-anak yang telah mencapai 17 tahun keatas dan telah dianggap dapat menyampaikan informasi sesuai dengan kemasannya sendiri tanpa meniru penyampaian informasi dari orang lain di sekitar anak. Selain itu, terdapat Instansi yang terkait yaitu kepala dan sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimintai informasi mengenai kebermanfaatan kabupaten Lumajang memperoleh program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka Mendukung program keluarga harapan, serta Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari dinas tenaga kerja dan transmigrasi sebagai salah satu badan dari Pemerintah kabupaten Lumajang dalam upaya usaha pengurangan pekerja anak.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan hasil data yang digali di lapangan sesuai dengan kebutuhan yaitu, pelaksanaan program PPA-PKH tahun 2016 untuk mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak pada shelter Krai. Agar hasil wawancara terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan. Menurut Sugiyono (2014: 67), diperlukan alat-alat yaitu buku-buku catatan untuk mencatat semua pembicaraan dengan sumber data, *tape recorder* untuk merekam semua pembicaraan dengan informan, dan kamera untuk memotret situasi yang sedang berlangsung dalam proses penelitian. Wawancara yang sudah dilakukan dari berbagai sumber data kemudian di klasifikasi sesuai dengan kelompok data. Sehingga hubungan satu data dengan data yang lain perlu di konstruksikan sehingga menghasilkan pola dan makna tertentu.

3.5.3 Dokumentasi

“Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan” (moleong, 2007:217). Secara lebih detail Bungin (2012:125) menjelaskan bahwa :

“sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas termasuk monument, artefak, foto, tape, microfilm, disc, CD, hardisk, flashdisk, dan sebagainya”.

Berdasarkan konsep yang telah dikemukakan maka pengumpulan, dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari literature-literatur, dokumentasi dari pendamping dan tutor dan dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan tahun 2016 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Lumajang serta hasil wawancara dari informan yang direkam berkaitan dengan penelitian ini.

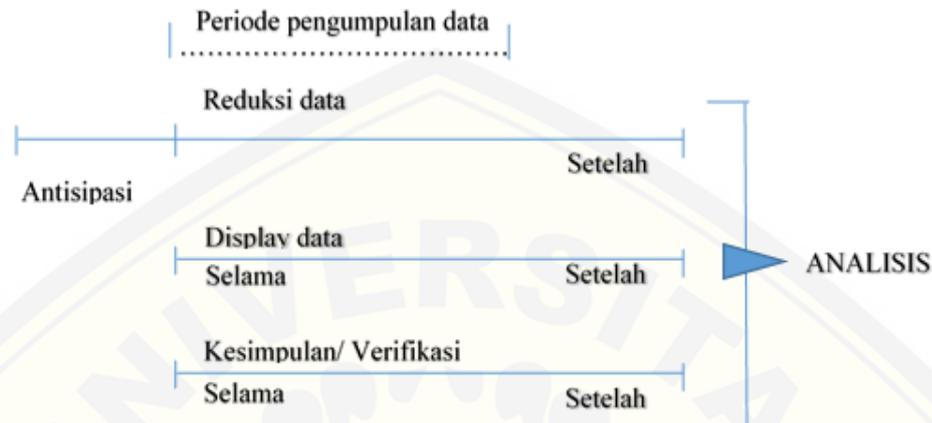
3.6 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:89) menjelaskan bahwa “Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan”. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tahapan analisis data merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah penelitian. Hal ini karena proses analisis data akan mampu membedakan dan memilih data yang sesuai dengan fenomena yang akan diteliti. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007: 248), Analisis data kualitatif adalah :

“... upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Tujuan dari adanya Teknik Analisis Data dalam penelitian kualitatif menurut Bungin (2012:161) “Memiliki dua tujuan yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut dan menganalisis makna yang ada dibalik

informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu.” Terkait jenis dan tahapan proses analisis data, masing-masing ilmuwan memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun dalam penelitian ini, peneliti merujuk Model analisa data yang dipaparkan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:91) yaitu :



Gambar . 3.1 Langkah-langkah dalam analisis data (flow model).
(Sugiyono (2015:91))

1. Data Reduction (Reduksi data)

Langkah awal dalam proses analisis data adalah melakukan reduksi data dari data yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data. Data yang didapatkan dari lapangan tentunya jumlahnya banyak, dan semakin lama penelitian di lapangan dilakukan maka akan semakin banyak pula data yang di dapatkan, semakin kompleks dan semakin rumit, maka dari itu reduksi data menjadi diperlukan (Sugiyono, 2015:92). Untuk lebih memahami teknik reduksi data, Sugiyono (2015:92) menjelaskan:

“Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.”

Selain itu, dalam mereduksi data, peneliti akan selalu dipandu oleh tujuan peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif yakni berupa temuan.

Oleh karena itu, apabila peneliti menemukan suatu informasi yang bersifat asing, belum memiliki pola, atau belum dikenal maka hal ini dapat perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data (Sugiyono, 2015:93).

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan reduksi data dari awal pengumpulan data, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Hasil observasi, peneliti membuat catatan-catatan kecil yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan data penelitian ini. Tahapan pertama menganalisis data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:91) adalah reduksi data. Reduksi untuk hasil wawancara membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasil pengumpulan data melalui metode wawancara berbentuk file aplikasi *recorder*, oleh karena itu peneliti membuat file aplikasi *recorder* menjadi transkrip teks (dokumen). Percakapan wawancara selalu panjang dan tidak semua bagian percakapan termasuk data yang dibutuhkan, ada yang merupakan pengantar wawancara, ada yang merupakan upaya peneliti dalam melakukan pendekatan-pendekatan terhadap informan. Sehingga dalam metode ini peneliti akan menghapus bagian-bagian data yang tidak dibutuhkan tadi. Jadi, isi transkrip wawancara tersebut lebih terfokus kepada pembicaraan terkait dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pasca program sehingga tercapainya keberfungsian sosial anak.

Selain itu, kegiatan reduksi data juga dapat digambarkan dengan kategorisasi semua data yang dibutuhkan tanpa memperdulikan menjadi berapa banyak kategori yang akan dibuat dengan tujuan agar peneliti dapat melakukan analisa dengan mudah. Sebelum melakukan kategorisasi data, peneliti membuat dan melakukan pemberian kode terhadap transkrip wawancara. Setelah pemberian koding selesai, peneliti membuat table kategorisasi data. Dalam hal ini, peneliti membuat kategorisasi data yang dibutuhkan berdasarkan kode yang sudah ditandai kode yang dilakukan pada saat melakukan tahapan koding. Sehingga kategorisasi yang peneliti buat adalah kategorisasi tentang proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga tahapan pasca program.

2. Data display (Penyajian data)

Langkah kedua dalam melakukan analisis data adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian kata-kata, bagan, gambar, hubungan antar data yang telah dikategorikan, dan lain-lain (Sugiyono, 2015: 95). Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:95) juga memberikan pandangannya tentang data display bahwa: “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.” Sugiyono (2015:95) juga menambahkan bahwa tujuan dari penyajian data adalah agar memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan agar peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti membuat *display data* yaitu kegiatan menempelkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari hasil kategorisasi data yang dilakukan pada saat reduksi data dari informan yang berbeda.

3. Conclusion Drawing/ Verification (penarikan kesimpulan/ verifikasi)

Langkah ketiga dalam melakukan analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sugiyono (2015:99) mengatakan :

“Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.”

Memang dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal telah ada namun bersifat sementara, dan akan berubah bila terdapat bukti-bukti yang mendukung kesimpulan awal tersebut. Namun setelah didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan pengumpulan data lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan menjadi kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2015: 99). Dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan (*conclusion data*) dengan data cara menuliskan kesimpulan berdasarkan data dari kategorisasi data yang

telah disajikan (*display data*) yang kemudian dikaitkan dengan teori yang terdapat dari tinjauan pustaka.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Moleong (2007:320) menjelaskan bahwa “ yang di maksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: (1) mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat di terapkan, dan (3) memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan – keputusannya”. Teknik keabsahan data ini sangat di perlukan dalam penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini didasari oleh kekuatan narasi sehingga teknik keabsahan data berfungsi agar penelitian dilakukan tidak di pertanyakan lagi kebenarannya.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Menurut Moleong (2007:330) “triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Selain itu Wiersma (dalam Sugiyono, 2014:125) menjelaskan bahwa “triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu”. Dengan demikian Moleong (2009: 330-331) membagikan triangulasi terdapat triangulasi sumber, triangulasi dengan metode, dan triangulasi dengan teori. Masing-masing pengertian triangulasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Menurut Moleong, tringulasi dengan sumber adalah membndingkn dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan beberapa sumber data yang lain. Hal ini dilakukan dengan cara, data yang diperoleh dri seorang informan, di cek kembli dengan bertanya dengan informan lain secara terus menerus sampai terjadi kejenuhan data yang artinya tidak ditemukan data baru lagi. Selain moleong menjelaskan pengertian triangulasi sumber, Sugiyono dan Bungin menjelaskan pengertian triangulasi sumber yaitu :

“Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber” (Sugiyono,2014:127). Selain itu Bungin (2012:264) menjelaskan bahwa triangulasi dengan sumber data “dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda”.

Patton dalam Moleong (2010:331) yang dimaksud dengan triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan dari suatu informasi yang ada berdasarkan waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif yang dapat dicapai dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang terhadap situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan seseorang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi dengan metode

Triangulasi dengan metode menurut Patton dalam Moleong (2009: 86), triangulasi dengan metode dapat dilakukan dengan dua strategi, sebagai berikut:

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data. Misalnya peneliti mengecek data atau informasi yang diperoleh melalui metode wawancara, kemudian data tersebut di cek kembali dengan menggunakan metode observasi atau dokumentasi, begitu juga sebaliknya.
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan teknik pengumpulan data yang sama. Misalnya, peneliti mengecek data yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang informan. Kemudian data tersebut di cek pada informan yang bersangkutan dengan metode yang sama yaitu wawancara pada waktu yang berbeda.

Triangulasi dengan metode menurut Patton dalam Moleong (2007:330) adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Secara lebih detail, Bungin (2012:265) menjelaskan bahwa :

“Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di *interview*. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di-*interview* dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda”.

Pada Triangulasi dengan metode, menurut Patton dalam (Moleong, 2007:331) terdapat dua strategi yaitu “(1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber dengan metode yang sama”.

3. Triangulasi dengan teori

Menurut pendapat Lincoln dan Guba dalam Moleong (2009: 125) yang menyebutkan bahwa fakta-fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan salah satu teori saja, maka untuk mengecek derajat kepercayaan data peneliti menggunakan triangulasi dengan teori pada penelitian ini. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam suatu konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Dari uraian diatas peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu jenis triangulasi yang dilakukan dengan cara mengkroscek hasil dengan sumberdata yang berbeda yaitu dari hasil wawancara kepada setiap informan dan akan dilaksanakan pemeriksaan ulang terkait dengan hasil penelitian. Kemudian hasilnya akan dibandingkan agar dapat menghasilkan data yang koheren. Pemilihan triangulasi sumber oleh peneliti karena memudahkan peneliti dalam hal kebasahan data, karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Perbedaan informasi antar informan dapat memungkinkan penambahan informasi yang sebelumnya tidak dapat diprediksi oleh peneliti. Perbedaan ini menjadi tugas peneliti untuk mengkroscek antar sumber sehingga data-data

tentang Implementasi program PPA-PKH Tahun 2016 dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak pada shelter Krai dapat dikatakan objektif, dan kevalidan datanya dapat dikatakan sah secara metodologis.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Program PPA-PKH di Kabupaten Lumajang Pada Shelter Krai

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam bab 1,2,2 dan 4 yang membahas tentang Implementasi Program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan Tahun 2016 pada Shelter Krai terdiri dari 2 shelter yaitu shelter Krai 1 dan shelter 2 yang berada dalam satu tempat dengan prosedur pelaksanaan dimulai dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan setelah program selesai. Adapun proses implementasi program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan pada Shelter Krai adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Pada proses persiapan pelaksanaan program PPA-PKH Tahun 2016 di Kabupaten Lumajang pada shelter Krai adalah dengan melakukan perekrutan tenaga pendamping. Tenaga pendamping mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah mendampingi anak-anak selama di shelter. Selain itu, pendamping bersama dengan pelaksana program melakukan persiapan shelter selaligus menyiapkan dan menyediakan sarana dan praarana yang digunakan dalam pelaksanaan program PPA-PKH. Persiapan yang ketiga yaitu dengan melaksanakan validasi data yang dilakukan oleh tenaga pendamping sebagai langkah awal bagi pendamping untuk melakukan proses pendekatan kepada anak-anak.

2. Pelaksanaan

Pada proses pelaksanaan program PPA-PKH Tahun 2016 di Kabupaten Lumajang pada shelter Krai adalah dengan melaksanakan pembinaan karakter kepada pekerja anak selama 30 hari. Kegiatan yang dilakukan selama berada didalam shelter yaitu dengan mengkroscek keadaan shelter yang menjadi tempat melakukan pembelajaran kepada anak-anak. Sebelum memasuki pembelajaran

didalam shelter, pendamping bersama dengan tutor melakukan rencana atau stimulasi yang akan diberikan kepada anak-anak selama proses pembelajaran. Selain itu terdapat materi-materi yang diberikan kepada penerima manfaat yang terdiri dari 3 jenis materi seperti pendidikan formal, informal dan pendidikan vokasional. Selain tutor yang mempunyai tugas untuk menyampaikan materi-mteri kepda anak-anak, terdapat 5 (lima) kedinasan yang memberikan materi tentang Pelatihan Vokasional (Dinas Sosial), Penguatan Agama (Departemen Agama), Penguatan Kesehatan (Dinas Kesehatan), Pentingnya Pendidikan (Dinas Pendidikan), dan Pengenalan narkoba dan kenakalan remaja (Resort Kepolisian). Selama proses pelaksanaan dilakukan, pelaksana program (pelaksana, pendamping, dan tutor) mempunyai orientasi agar anak dapat dikembalikan kebangku sekolahnya dengan memberikan stimuasi-stimulasi semangat kepada anak baik berupa pemberian semangat melalui pendekatan ketika materi telah selesai maupun melauai pemutaran film motivasi.

3. Pasca Shelter

Pada tahapan ini terdapat proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Pendamping yang dilakukan adalah dengan merekomendasikan anak ke lembaga pendidikan yang sesuai dengan keinginan anak-anak. Setelah merekomendasikan anak ke lembaga pendidikan yang sesuai dengan keinginan anak-anak, pendamping melakukan kegiatan tindak lanjut terhadap rekomendasi anak. Rekomendasi dalam hal ini mempunyai arti mengantarkan dan mendaftarkan anak-anak ke lembaga pendidikan yang sesuai dengan rekomendasi pendamping. Selain itu, pendamping melakukan home-visit lanjutan terhadap rumah anak dengan tujuan agar pendamping mengetahui kondisi sosial dari anak.

4. Kendala

Pelaksanaan program PPA-PKH tahun 2016 pada shelter Krai terdapat kendala-kendala yang mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam keberhasilan program. Kendalanya yaitu pada tataran mengubah pola pikir anak-anak dari anak yang menjadi pekerja sampai dengan anak-anak yang bersekolah dengan normal. Pengubahan pola pikir (karakter anak) dari karakter pekerja menjadi anak dengan

normal (karakter anak) tidak cukup dilakukan didalam shelter selama 30 hari. Kendala ini dirasakan oleh pendamping sebagai orang yang mengetahui kondisi anak. Namun, hal ini dapat diminimalisir oleh pendamping dengan cara melakukan home-visit lanjutan dengan memberikan gambaran dan penjelasan baik kepada anak maupun kepada orangtua anak.

5.1.2 Keberfungsian Sosial Anak

Terkait dengan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab 4, salah satu hasil penelitian tentang implementasi Program PPA-PKH tahun 2016 pada Shelter Krai untuk mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak adalah dengan melihat keberfungsian sosial anak. Keberfungsian sosial anak dalam program PPA-PKH tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dengan adanya perencanaan stimulasi dari pendamping untuk pemberian tugas dan peranan pekerja anak .
- b. Dilihat dari ketersediaan kebutuhan dasar pekerja anak.
- c. Dilihat dari tugas-tugas dan peranan-peranan anak dalam lingkungan.
- d. Dilihat dari adanya pendampingan agar anak dapat kembali ke lembaga pendidikan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka saran yang bisa digunakan untuk memperkuat dan mengupayakan program PPA-PKH sebagai program yang menjadi jawaban atas permasalahan pekerja anak di kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Merujuk pada informasi yang disampaikan oleh informan pokok dan tambahan mengenai pelaksanaan program PPA-PKH, dapat digeneralisasikan bahwa dengan adanya pelaksanaan program PPA-PKH Mempunyai dampak positif terkait dengan pengurangan permasalahan pekerja anak dikabupaten Lumajang. Dampak positif dengan adanya PPA-PKH dapat mengembalikan keberfungsian

sosial pekerja anak pada khususnya dan masyarakat kurang mampu pada umumnya.

2. Konsistensi pendamping melakukan proses pendampingan kepada anak-anak baik sebelum shelter, pada saat di shelter, dan pasca shelter. Inovasi pendamping sangat mempunyai pengaruh kepada anak-anak untuk dapat mempunyai keinginan untuk kembali ke sekolah lagi dan kebutuhan anak-anak akan pendidikan dapat terpenuhi.
3. Perlu adanya kevalidan data dari pelaksana program dalam mengajukan program PPA-PKH, untuk memperjelas penerima manfaat yang akan menerima program PPA-PKH dengan tujuan agar program tepat sasaran.
4. Perlu adanya tinjauan kembali dari pelaksana program mengenai data tentang permasalahan pekerja anak agar program tidak hanya dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun. Hal ini dilakukan untuk menuntaskan permasalahan pekerja anak di kabupaten Lumajang dengan adanya kesinambungan pelaksanaan program.
5. Untuk pemerintah kabupaten Lumajang, diperlukan sinergitas antara pelaksana program dengan instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan ini, tidak hanya dukungan moril namun juga perlu adanya bentuk dukungan secara finansial seperti pemberian beasiswa kepada anak-anak yang dikhususkan kepada anak yang pintar dan tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat: Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Bungin, B. 2012. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Fahrudin, A TanpaTahun. *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung. Humaniora
- Fahrudin, A. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Social*. Bandung: Refika Aditama
- Gaffar. 1997. *Implementation of Social Program*. Jakarta Selatan: Grafindo
- Haerunisa, D et al. (2013) edisi 2. *Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)*
- Huda, Miftahul. 2008. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Huraerah, A. 2014. *Kekerasan terhadap Anak*. Banndung: Nuansa Cendekia
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu – Ilmu Social*. Jakarta : Departemen Ilmu administrasi FISIP UI.
- Jones, C.O. 1997. *Pengantar Kebijakan Public (Public Policy)* Terjemahan Rick Ismanto. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Maryam, R, S. Maryani, S. Rochimah. & Fitriyani, H. 2007. *Kebutuhan Dasar Manusia: Berdasarkan Hierarki Maslow dan Penerapannya dalam Keperawatan*. Jakarta: Semesta Media.
- Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Moleong. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya

- Nugroho,R.2014. *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Ramly, N. 2005. *Membangun Pendidikan yang Memberdayakan dan Mencerahkan*. Jakarta Selatan: Grafindo
- Setiawan, H. 2014. *Manusia Utuh : Sebuah Kajian Utuh Atas Dasar Pemikiran Abraham Maslow*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Skidmore. 1950. *Social Work Administration: English*. Learning Literature
- Strauss, A., & Corbin, J. *Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah Dan Teknik – Teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Suharto, E. 2014. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif : Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*. Bandung: alfabeta
- Sujarweni, W. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap Praktis Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustakabarupress
- Sumarnonugroho. 1982. *Usaha Kesejahteraan Sosial*. Depok: PT.Raja Grafindo Rosada
- Winarno, B. 2002. *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standart, Aplikasi, dan Profesi*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Yuditia, R et al. 2015. *Mari Memahami dan Melindungi Anak Melalui Inklusi Sosial*. Surabaya: Samitra Abhaya dan Sanggar SIWI

Data UNICEF Tahun 2016 Tentang Laporan Tahunan Indonesia Tahun 2016
Hasil Kongres ILO Tahun 2009 Tentang Penghapusan Pekerja Anak

Peraturan Menteri PPPA RI No. 1 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019

Perencanaan Pembangunan Jawa Timur Tahun 2011

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

UUD RI Tahun 1945 Tentang Pembukaan Alinia ke-4

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 Ayat 5

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Pasal 2

Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8903/11.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=1>

<http://candrawiguna.com/mencari-anak-calon-penerima-bantuan-ppa-pkh-kabupaten-klungkung/>

[kompasiana, 13 Juli 2017 diakses pada tanggal 4 Oktober 2017](#)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Transkrip Wawancara	Reduksi Data		Display Data	Kesimpulan/ Verifikasi
	Kategorisasi	Data		
Proses Persiapan pelaksanaan program PPA-PKH di Shelter Krai		<p>1. “Nah kita kan dapat program ini, kalo tahun pertama itu, sudah ada nama dan alamatnya, by name, by adres. Ternyata anak yang by name by adres yang dari kementerian itu, banyak yang tidak sesuai... Dari kementerian, itu dari statistic, nah kemudian setelah dievaluasi, kita boleh, boleh mencari anak yang seperti itu melalui desa, kita ada program pak, adakah pekerja anak yang kriterianya seperti itu. Itu dari desa datanya, kita setor data itu ke pusat, baru setelah itu turun. Kita harus ngirim data itu lewat email dan kalo punya PKH, yang diutamakan yang punya ID... Kita pendamping itu merekrut, ada surat kan dari pusat untuk merekrut pendamping. Untuk merekrut pendamping itu ada syaratnya. Akhirnya kita share, kan di disnaker itu kan ada kartu kuning itu ya, nah itu di SMS. Kita tes wawancara maupun tulis, jadi intern kita pisah tim, akhirnya yang diperlukan berapa. Untuk itu kita kirim, nama-nama ini. Kemudian ada pelatihan bimtek untuk para pendamping... Ya kita siapkan tempatnya mbk untuk mereka bisa nginep mbk selama satu bulan itu. Ditempat itu sebutannya shelter mbk ya. nah dishelter tersebut kita siapkan semua fasilitas anak termasuk salah satunya makan, kamar mandi, MCK, baju-baju mereka, dan macem-macem mbk. Setelah itu, kita validasi data yang dilakukan oleh pendamping mbk.” (EH, 4 Desember 2017)</p> <p>2. “Persiapan ya, kita rekrutmen pendamping dulu mbk, kasih tau kalo ada program PPA-PKH dan membutuhkan pendamping anak, kita uumin setelah itu kita persiapkan shelternya, di shelter itu kita siapin fasilitasnya, kamar mandinya, terus kemudian,kebutuhan sehari-hari dia makan, obat-obatannya, terus tempat tidurnya, itu di kebutuhan fisiknya. Sarana belajar dia disana, bukunya kita siapin semua, nah setelah itu selesai kemudian kita mobilisasi anaknya, pendamping ini jemput anaknya itu, yang satu pendamping 10 peserta itu jemput anaknya kemudian ditaruh di disnaker, besoknya kita berangkatkan di shelter. Sebelum menyiapkan sarana dan prasarana pendamping validasi data dulu mbk, validasi itu kroscek data dari kementerian kalo cocok pendamping mendatangi ke rumahnya dan minta ijin mbk ke orangtuanya agar anaknya diikutkan program ini. Itu persiapannya.” (YA, 21 November 2017)</p>	<p>Proses persiapan pelaksanaan program PPA-PKH di Shelter Krai adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen tenaga pendamping 2. Menyiapkan Shelter 3. Validasi data 4. Pengadaan sarana dan prasarana 	<p>Proses persiapan pelaksanaan program PPA-PKH di Shelter Krai adalah dengan merekrut tenaga pendamping yang selanjutnya akan mendampingi anak sebelum, selama dan sesudah shelter. Setelah tenaga pendamping direkrut, tahapan selanjutnya adalah menyiapkan shelter yang akan digunakan selama kegiatan pembinaan anak-anak (penerima manfaat). Setelah itu ada proses validasi data yang dilakukan oleh pendamping untuk mengetahui keberadaan pekerja anak dari data TNP2K dan data PKH. Terakhir adalah dengan mengadakan sarana dan prasaranan yang mendukung untuk pelaksanaan program PPA-PKH.</p>

		<p>3. “Pertama yaitu perekrutan tenaga pendamping, kita umumkan tenaga pendamping, dalam hal ini harus sarjana, yang dari background kependidikan lah, yang nantinya akan menjemput anak-anak untuk kembali ke sekolah tapi tidak menutup kemungkinan sarjana lain juga bisa di rekrut dan mereka bisa menarik kembali anak-anak yang ke bangku sekolah. Setelah itu setelah perekrutan tenaga pendamping itu, pakai tes mbk, mulai dari tes tulis dan wawancara di dinas tenaga kerja, nanti yang lulus tes kita beritahu sebagai tenaga pendamping... Mereka mencari anak-anak putus sekolah. Pendamping-pendamping tadi mencari anak putus sekolah dengan kategori yang sudah saya beritahu tadi itu, usia sekolah yang bekerja sebagai penjaga toko, penjaga warnet, kan banyak anak-anak seperti itu, kita berikan mereka motivasi lagi untuk kembali ke sekolah, jadi tugas tenaga pendamping seperti itu, sebelum masuk shelter mereka mencari anak-anak dalam kategori tersebut untuk selanjutnya dimasukkan ke shelter. Setelah pendamping mencari anak-anak kita menentukan shelter mbk. Dalam shelter itu kita menyiapkan segala kebutuhan dari anak seperti makan, sandang mereka dan buku-buku mereka. Syarat dari shelter itu mbk harus ada sarana belajar mereka mbk kayak kamar mandinya harus ada 3, ruangan belajar, ruang anak perempuan dan laki-laki, ruangan untuk pendamping mbk. Kan pendamping harus nginep ya. nah itu.” (RI, 28 November 2017)</p> <p>4. “Kalo diKrai ya umumnya sama dengan Kenongo, mulai dari tahap prosesnya sama. Sebenarnya yang bener itu, kita ada namanya itu data TNP2K. Kalo mereka ada di data TNP2K itu tadi ada ID nya, kayak PKH itu, jadi kalo PKH itu kan KKNya ada ID. Jadi kalo mereka tercover di PKH kan PPA itu anaknya PKH, sebenarnya kita itu disuruh menindaklanjuti data TNP2K itu, yang tercover IDnya PKH. Jadi prioritas yang punya ID dulu, yang tidak punya ID sebenarnya tidak boleh. Bukan gak boleh karena kita kan prioritasnya ke PKH itu dulu, yang prioritas adalah anak-anak yang keluarga atau KKNya masuk ID tapi berhubung kesulitan waktu validasi data, banyak kejadian anak yang di data itu sudah menikah, berarti anaknya tidak dapat dikembalikan ke dinas pendidikan, kemudian yang kedua ialah anak ada yang keluar dari Lumajang. Ada data yang sudah meninggal anaknya, jadi anak yang berasal</p>		
--	--	--	--	--

		<p>dari TNP2K itu kesulitan akhirnya ada keflexibelan tadi kita boleh merekrut anak yang tidak mampu yang tidak sekolah dan pekerja anak. Setelah kita validasi data itu kita usulkan ke disnaker, jadi pendamping itu punya tugas cari 10 anak kalo bisa punya ID kalo bisa yang tidak punya ID tidak apa-apa, syarat yang kedua ialah pekerja anak, kalo bukan dari pekerja anak yang diutamakan lagi anak yang kurang mampu dan putus sekolah itu tadi, kita laporkan ke disnaker, disnaker melaporkan ke provinsi, baru turun datanya itu tadi kuotanya per shelter itu tadi baru di bagilah tempat karangtina itu tadi. Itu dari pendamping mbk persiapannya gitu kalo dari pelaksana program itu ya recruit pendamping dulu mbk sesuai dengan kriteria dalam program. Kriterianya itu harus sarjana, diutamakan sarjana pendidikan dan disana pendaftar harus ngikutin tes kayak biasaya itu, tes tulis dan wawancara baru setelah itu sudah ada pengumuman para pendamping yang dinyatakan lolos, baru mereka bimtek di Surabaya. Kita persiapkan tempat/ shelternya mbk yang memuat sarana belajar tempat belajar mengajar, kamar mandi juga harus memenuhi, kalo dalam program ini kamar mandinya 3, ruangan istirahat bagi anak perempuan, anak laki-laki, dan pendamping mbk. (VF, 28 November 2017)</p> <p>5. “Kalo persiapan kita sudah diajarin bimtek tadi mbk jadi kita sudah menerima bekal-bekal yang sudah ditetapkan dari pusat sana, kemudian kita diberikan bimbingan sudah ada tutornya dari Jakarta. Jadi bukan sekedar program yang ecek-ecek mbk... Tempatnya itu mbk, kita mencari tempat yang sekiranya bisa dibuat sebagai kegiatan pembelajaran, kegiatan bermalamnya anak-anak itu. Kalo gak tempatnya luas kan gak bisa... Iya pasti lah itu sebelum bimtek kita mencari dulu anak-anak yang akan mengikuti program PPA nya mbk. Yang paling sulit ya mencari anak-anak itu tadi “(DF, 8 Desember 2017)</p> <p>6. “Kalo pelaksanaan sebelumnya panjang yang pertama adalah kita melakukan kroscek sesuai data yang diberikan oleh disnakertrans kaitannya dengan jumlah anak-anak yang putus sekolah. Artinya kita home-visit kerumahnya, untuk memastikan apakah anak yang bersangkutan ada atau tidak. Baru setelah itu kita data, anak yang bersangkutan untuk proses awal memasuki, shelter. Baru setelah itu</p>		
--	--	---	--	--

		<p>didata, maka kita persiapkan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh disnakertrans maka anak itu kita masukkan ke shelter, baru kita melakukan pembinaan selama satu bulan di shelter. Kaitannya dengan bagaimana proses penyadaran kembali bagi mereka yang putus sekolah yang di usia produktif itu bisa sekolah. Baru setelah itu, kita melakukan pembinaan kembali nah disitu, baru ada satu proses, home visit kembali untuk mendaftar anak-anak yang sudah melaksanakan pendidikan di shelter, untuk memasukkan mereka ke pendidikan formal. Persiapan selanjutnya adalah menyiapkan shelter, didalam shelter harus memenuhi kriteria yang sudah ditentukan seperti ada kamar mandi 3, ruangan belajar, ruang untuk istirahat bagi anak laki-laki dan ruangan bagi anak perempuan, dan ruangan pendamping.” (HH, 23 November 2017)</p> <p>7. “Kita memvalidasi data anak kak ruah ndok, ke lapangan cocok, napah enten, data itu diperoleh dari TNP2K ndok, kalo sesuai dengan data tersebut berarti Alhamdulillah , kita tawarkan ke mereka program PPA-PKH ini, baru kemudian jika data dari TNP2K nikah tak cocok dengan kondisi lingkungan yang ada artinnah anak-anak sobung tak sesuai lah, nah kita mencari ndok, per pendamping 10 anak dampingan. Mencarinya ke desadesa apakah didesa ini terdapat anak yang bekerja. Jadi perispannya ndok kan di PPA-PKH Itu kan ada pra shelter, shelter dan pasca shelter ndok. Pra shelter itu selain kita memvalidasi data, mas sama kancannah mas menyiapkan shelternya ndok. Di shelter anak-anak dapat buku-buku ndok, seragam, kemudian shelter itu syaratnya bedeh kamar mandinah ndok, kamar mandi untuk pendamping, anak-anak laki-laki , dan untuk anak perempuan, ruangan untuk belajar serta ruangan untuk istirahat ndok. Pra shelter itu satu bulan ndok, jadi dalam satu bulan kita mencari anaknya. Shelter itu satu bulan, pasca shelter 2 bulan. Sehingga mereka 4 bulan di dalam program. 4 bulan ini dikasih uang 1 juta ndok.” (WU, 23 November 2017)</p> <p>8. “Persiapannya panjang mbk, saya kemaren diskusi dan rapat koordinasi dengan pelaksana program pak yudho itu mbk, pertama itu pelaksana program koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait, kemudian ada perekrutan pendamping yang mempunyai kualifikasi pendidikan terutama, dan kualifikasi lainnya pada umumnya, ada tahapnya mbk ketika kita merekrut pendamping yang</p>		
--	--	--	--	--

		<p>pertama kan tes administrasi kemudian tes tulis dengan tes wawancara kemudian di umumkan pendamping yang lolos. Nah pendamping dalam hal ini mengikuti pelatihan mbk seperti bimbingan teknis pendamping di Surabaya itu mbk. Kemudian setelah bimtek para pendamping validasi data mbk. Validasi dalam hal ini mengecek daftar anak di data kementerian di kros cek dilapangan dengan minta ijin ke desa-desa yang bersangkutan. Kemudian setelah validasi data dilakukan dan kemudian ada yang gak sesuai, maka pendamping ini boleh merekrut atau mencari pekerja anak dengan kriteria yang sudah ditentukan. Setelah itu menyiapkan shelter mbk. Nah syaratnya shelter itu harus memiliki fasilitas yang sesuai dengan pedoman program. Fasilitasnya itu terdapat ruangan belajar untuk anak-anak kan ya, kemudian ada kamar mandi berjumlah minimal 3, ada ruangan istirahat 3 mbk, 1 untuk anak perempuan, satu untuk anak laki-laki dan yang terakhir untuk pendamping. Kan pendamping itu harus menginap mbk ya.” (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>9. “Ada perekrutan pendamping, kemudian ada menyiapkan shelter dan validasi data mbk. Mengenai data kan sangat penting jada validasi data yang membantu mengkroscek keberadaan anak untuk diikuti sertakan ke dalam kegiatan PPA-PKH mbk. Perekrutan pendamping itu melalui 3 tes, tes administrasi, tes tulis dan wawancara... Dari pendidikan khususnya, kalo umumnya semua jurusan bisa jadi pendamping mbk. Kemudian setelah perekrutan pendamping, para pendamping ini memvalidasi data, jika sesuai data dilanjut mbk, jika tidak sesuai antara data dengan lapangan pendamping tersebut mencari anak-anak yang sesuai dengan syarat penerima program, yaitu pekerja anak yang putus sekola berusia maksimal 18 tahun kemudian berasal dari RTSM. Setelah itu, kita menyiapkan shelternya... Shelter itu seperti tempat menginap atau rumah singgah bagi pekerja anak didalam program PPA-PKH ini, dan kebetulan di krai itu ada di rumahnya wahid. .. Syaratnya ya bersih, luas. Luas dalam arti terdapat 3 ruangan besar yang nanti akan digunakan untuk anak laki-laki, anak perempuan dan pendamping untuk bermalam dan beristirahat. Ada kamar mandinya minimal 3 mbk, ada juga ruangan besar yang nanti dapat menjadi tempat untuk memberikan materi-materi. Shelter itu biasanya di tetapkan oleh pelaksana program mbk... Tidak mbk. Sebelumnya itu pihak pelaksana</p>		
--	--	--	--	--

		<p>menyiapkan fasilitas peserta program, meliputi makanan, baju-bajun seragam dan juga buku-buku pembelajaran selama satu bulan itu mbk. Sepatu, tas, dan yang lainnya mbk.” (IH, 13 Desember 2017)</p> <p>10. “Ya itu tadi mbk, kita siapkan pendamping, shelter, tutor, data anak mbk.” (SH, 4 Desember 2017)</p> <p>11. “Persiapannya itu kita rakor sebelum melakukan persiapannya mbk. Setelah rakor beberapa kali kita baru rekrut tenaga pendamping mbk dengan kualifikasi pendidikan pada khususnya dan jurusan lain pada umumnya mbk. Setelah itu persiapan data anak mbk dan shelter itu mbk.kemudian setelah itu kita kroscek datanya mbk. Pendamping mbk.” (TS, 4 Desember 2017)</p>		
<p>Proses pelaksanaan program PPA-PKH di kabupaten Lumajang pada Shelter Yosowilangun</p>	<p>1. Kondisi Shelter</p>	<p>1. “ Persiapan sebelum pelaksanaan berlangsung itu, harus melihat shelter itu apa sudah memenuhi syarat, apa tidak... Satu pendamping 10 orang anak, 1 shelter itu tiga pendamping. Kalo dalam dua lokasi itu dua shelter berarti enam pendamping. Dan satu shelter itu terdapat 1 tutor. Di shelter itu harus ada fasilitas pendukungnya, seperti kamar mandi berjumlah 3, tempat tidur untuk anak-anak dan pendamping, ruangan belajar. (EH, 4 Desember 2017)</p> <p>2. “Kalo shelter yang baik itu sesuai dengan pedoman program disitu harus ada makanan untuk anak-anak, tempat tidur mereka, kamar mandi mereka, dan juga ruangan belajar untuk anak-anak.” (YA, 21 November 2017)</p> <p>3. “Dalam shelter itu kita menyiapkan segala kebutuhan dari anak seperti makan, sandang mereka dan buku-buku mereka. Syarat dari shelter itu mbk harus ada sarana belajar mereka mbk kayak kamar mandinya harus ada 3, ruangan belajar, ruang anak perempuan dan laki-laki, ruangan untuk pendamping mbk. Kan pendamping harus nginep ya. nah itu.”(RI, 28 November 2017)</p> <p>4. “Tempatnya itu mbk, kita mencari tempat yang sekiranya bisa dibuat sebagai kegiatan pembelajaran, kegiatan bermalamnya anak-anak itu. Kalo gak tempatnya luas kan gak bisa... Ya terjamin dari dinas sudah disediakan. Biaya makannya sudah ditanggung dari sana jadi ada yang tukang masaknyanya. Kemaren yang masak ya di rumahnya mas wahid itu. Jadi yang bertanggung jawab dari dinas itu wes . jadi</p>	<p>Pelaksanaan program PPA-PKH di kabupaten Lumajang pada Shelter Krai adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Shelter 2. Aktivitas Pendamping 3. Aktivitas Anak 4. Keterlibatan Anak 5. Materi-materi selama di Shelter 6. Stimulant-stimulan 7. Pendampingan 8. Penguatan Stak-Holder 	<p>Pelaksanaan program PPA-PKH tahun 2016 di kabupaten Lumajang pada Shelter Krai adalah dengan mempersiapkan dan melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi Shelter yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pelaksana program. Adapun persyaratan Shelter yang sesuai dengan pedoman program adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Memuat fasilitas yang dapat digunakan oleh anak-anak selama kegiatan berlangsung. b. Fasilitasnya seperti, Kamar mandi dengan jumlah minimal 3 kamar mandi, ruangan untuk tempat tidur anak laki-laki, ruangan untuk tempat tidur anak perempuan, ruangan untuk tempat istirahat pendamping, ruangan

	<p>2. Aktivitas Pendamping</p>	<p>anak-anak tinggal makan itu wes.” (DF, 8 Desember 2017)</p> <p>5. “Shelter itu kan memang tempat sementara bagi anak gimana nantinya anak bisa survive di shelter dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan yaitu memuat fasilitas yang telah diberikan dari disnaker.” (HH, 23 November 2017)</p> <p>6. “Kondisi nya baik ndok, ada banyak ruangan yang harus di pakai dan digunakan dalam proses pelaksanaan program itu ndok. Gi bedeh kamar mandi bedeh compok en mbk yana, e langger dan e compok nikah ndok.” (WU, 23 November 2017)</p> <p>7. “Kita persiapkan tempat/ shelternya mbk yang memuat sarana belajar tempat belajar mengajar, kamar mandi juga harus memenuhi, kalo dalam program ini kamar mandinya 3, ruangan istirahat bagi anak perempuan, anak laki-laki, dan pendamping mbk.” (VF, 28 November 2017)</p> <p>8. “Shelter itu seperti tempat menginap atau rumah singgah bagi pekerja anak didalam program PPA-PKH ini, dan kebetulan di kraai itu ada di rumahnya wahid... Syaratnya ya bersih, luas. Luas dalam arti terdapat 3 ruangan besar yag nanti akan digunakan untuk anak laki-laki, anak perempuan dan pendamping untuk bermalam dan beristirahat. Ada kamar mandinya minimal 3 mbk, ada juga ruangan besar yang nanti dapat menjadi tempat untuk memberikan materi-materi. Shelter itu biasanya di tetapkan oleh pelaksan program mbk.” (IH, 13 Desember 2017)</p> <p>9. “Nah syaratnya shelter itu harus memiliki fasilitas yag sesuai dengan pedoman program. Fasilitasnya itu terdapat ruangan belajar untuk anak-anak kan ya, kemudian ada kamar mandi berjumlah minimal 3, ada ruangan istirahat 3 mbk, 1 untuk anak perempuan, satu untuk anak laki-laki dan yang terakhir untuk pendamping. Kan pendamping itu harus menginap mbk ya.” (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>a. “Pelaksanaannya itu kan, itu tadi, pendamping membuat rencana program atau rencana belajar, rencana belajar ini kemudian, rencana</p>		<p>untuk sarana belajar mengajar.</p> <p>c. Tersediannya kebutuhan dasar anak (sandang, pangan, papan).</p> <p>d. Shelter Kraai terdiri dari 2 Shelter yaitu Shelter Kraai 1 dan kraai 2.</p> <p>e. Setiap Shelter terdiri dari 1 tutor, 3 pendamping dan 1 pendamping mendampingi 10 orang anak.</p> <p>2. Suksesnya melaksanakan program ini yang</p>
--	--------------------------------	---	--	---

		<p>belajar dalam waktu satu bulan sudah ada rencana belajarnya, kemudian, rencana belajar ini diimplementasikan atau di breakdown dalam satu minggu, kemudian diimplementasikan ke dalam rencana belajar dalam per harinya. Selain pendamping, proses mengajari anak itu, kita ada yang namanya tutor, jadi selain pendamping mengajari anak, tutor juga bertugas mengajari anak dari silabus yang sudah ditetapkan tadi.” (YA, 21 November 2017)</p> <p>b. “Ada anunya memang, jadi tutor harus sekian orang, pendamping juga ada mata pelajarannya. Ada waktunya ngajar anak-anak, jadi sudah ada honornya sendiri, untk pendamping sekian, tutor sekian , jadi semua itu didanai oleh PPA-PKH...Iya jadi pendamping selain mendampingi anak-anak selama di shelter pendamping juga merekom, mereka mau ke sekolah ini, kita rekom setelah itu, sudah dimasukkan ke sekolah mereka kan, nah pendampig itu, minta surat keterangan ke sekolah memastikan apa anak itu bener-bener sekolah, jadii gak hanya wesmari-mari putus wes, jadi masih melakukan proses pendampingan.” (EH, 4 Desember 2017)</p> <p>c. “Masing-masing pendamping ya membuat jadwal, otomatis kita rekrut untuk mendampingi selama di shelter, dengan ijin orang tua, dengan persyaratan administrasi barangkali yang mereka butuhkan jadi dari yang administrasi yang memenuhi syarat tadi meliputi anak yang putus sekolah dan pekerja anak itu, kita ijin ke orangtua dan orangtua mengizinkan dengan syarat yang telah diajukan tersebut. Kita jemput, seperti home-visit kepada orangtua ditanya bagaimana dengan anaknya kemudian bersediakah anaknya untuk diberikan motivasi didalam shelter untuk kegiatan PPA-PKH itu. Kemudian jika sudah clear kemudian kita jemput. Pendamping yang menjemput anak ke orangtuanya untuk masuk ke shelter. Di shelter itu, dibuatkan jadwal kegiatan lah seperti bangun pagi anak-anak bagaimana sampai dengan ke materi-materinya, kamar mandinya, kebersihannya... Ya dari pendamping. Jadi selain inovasi dari pendamping , ada grade, anak – anak harus melakukan ini, harus ini sesuai dengan pedoman yang ada. Pedoman itu kita berikan kepada pendamping, jd pendamping itu kayak test tadi, itu diberangkatkan ke Surabaya untuk mengikuti pembekalan atau simulasi tentang penanganan anak nakal, bagaimana penanganan anak yang bekerja dan lain-lain itu pendamping sudah mendapatkan yang dari</p>		<p>diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang tidak terlepas dari aktivitas dari pendamping pekerja anak mulai dari pra shelter, selama di Shelter dan pasca Shelter. berikut beberapa aktivitas pendamping pekerja anak adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Melakukan validasi data yang dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten lumjang</p> <p>b. Mencari penerima manfaat yang mempunyai kriteria anak putus sekolah yang sedang bekerja, berumur maksimal 18 tahun, berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan bersedia diikutkan untuk mengikuti kegiatan selama 1 bulan.</p> <p>c. Melakukan home-visit (kunjungan ke rumah anak) untuk mengetahui kondisi baik ekonomi, sosial dan lingkungan anak.</p> <p>d. Membuat jadwal materi-materi yang akan di sampaikan baik oleh tutor maupun pendamping sendiri.</p> <p>e. Merencana stimulasi-stimulasi yang akan</p>
--	--	---	--	--

		<p>background guru.” (RI, 28 November 2017)</p> <p>d. “...kita ada motivasi-motivasi juga, pengembangan diri anak juga iya, mulai dari mereka belajar, bermain sampai mereka tidur, pendamping harus benar-bener mendampingi anak tersebut, jadi dibujuk iya, apalagi latar belakangnya juga beda, kalo bisa dikatakan itu semi liar... Masih, jadi gini, setelah satu bulan , em, kan kita ada yang namanya tahap <i>home-visit</i>, tahap <i>home visit</i> itu kita ada yang 4 kali, 2 kali pra kita masuk shelter, pertama itu kita lakukan validasi data sampai akhirnya mereka siap untuk memasuki shelter, tahap 2 <i>home-visit</i> selanjutnya ialah mengembalikan atau mengantarkan anak kembali lagi ke dunia pendidikan, itu pasca shelter ya, ada tahap pengembalian anak ke dunia pendidikan, dan yang kedua monitoring mereka di sekolah mereka masih sekolah apa endak, mereka masih lanjut apa endak ?.” (VF, 28 November 2017)</p> <p>e. “Kita anu, apa mencari, pokoknya kita keliling cari informasi dulu, pertama kalosaya dulu itu, pertama itu yang saya lakukan ke kepala desa dulu, minta ijin mau Tanya tentang pendidikan anak di daerah itu apa ada yang putus sekolah, kemudian terjun ke RT,RT nya itu wes terus langsung data... Cuma kitakan memastikan mereka kan sudah kegiatannya kalo untuk anak-anak sudah tidak ada, kalo untuk pendamping. Pendamping tetep mengarahkan mereka ke pendidikan. Jadi kalo mereka sudah dipastikan sudah bersekolah itu baru. Kalo saya, kalo saya sampek mereka lulus saya damping, jadi mereka kemaren ada yang ujian di paket itu, yang tahun 2015 itu. Nah itu saya dampingi sampek ujian saya antar, kan ujiannya di Lumajang. “ (DF, 8 Desember 2017)</p> <p>f. “Nah, sebelum selesai shelter itu, pendamping sudah mempunyai tugas tersendiri terutama pra shelter itu kita mencari anak-anak, kemudian dimotivasi setiap hari didalam shelter selama satu bulan dan setelah dari shelter dia dicarikan sekolah oleh pendmping, yngmendampingi muali proses administrasi hingga merek kembali masuk ke sekolah itu semua pendamping yang mendampingi. Anak yang memang tidak mau kesekolah lagi maka alternatifnya mereka di carikn kursuskursus, seperti kursus menjahit, kursus computer. “ (HH, 23 November 2017)</p>		<p>dilakukan di dalam Shelter.</p> <p>f. Menyiapkan kebutuhan-kebutu8han anak baik berupa material maupun spiritual.</p> <p>g. Mendampingi anak-anak dari bangun tidur hingga acara selesai.</p> <p>h. Mengantarkan anak pulang ke rumahnya setelah kegiatan berakhir.</p> <p>i. Merekomendasi pekerja anak yang menjadi anak dampingan program PPA-PKH sesuai dengan keinginan anak.</p> <p>j. Mendaftarkan anak ke sekolah yang telah terekomendasi.</p> <p>k. Bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang menjadi rekom sekolah untuk meminta keringanan biaya kepada anak penerima PPA-PKH.</p> <p>l. Mengawasi anak dalam kegiatannya di sekolah selama 2 bulan atau 60 hari.</p>
--	--	---	--	---

	<p>3. Aktivitas Anak</p>	<p>g. "...kita melakukan home-visit tadi ndok, jadi kan kita di shelter murni materi, menyampaikan ke anakanak selama waktu yang ada, menjelaskan bahwa sekolah itu penting untuk masa depan anak, setelah itu mereka pulang dan kita tidak menyuruh mereka pulang begitu saja, kita mendampingi mereka, menawarkan programprogram beasiswa kepada mereka, menanyakan keberniatan mereka dengan lembaga agar mereka itudapat secara sungguh-sungguh masuk sekolah itu. Kita mau masukkan mereka ke SMAkah, SMKkah, Makah atau paket-paket yang lainnya. Setelah pulang dari shelter langsung kita tanyakan ndok ke anaknya mau sekolah dimana dan kita juga kerja sama ndok, dengan lembagallembaga seperti kuleh gi ning Krai sebagai guru MA, di BU. Kita melakukan kerja sama, kerja sama bagaimana kemudian bisa membantu, memberikan suatau jawaban permasalahan anak— anak program keluarga harapan, agar mendapatkan keringanan dalam biaya sekolahnya ndok, kadang bisa jadi tidak usah dipungut biaya." (WU, 23 November 2017)</p> <p>h. "Soalnya kan pendamping wajib mendampingi anak setelah kegiatan untuk didaftarkan ke sekolah yang sebelumnya telah di rekom. Sama ini juga mbk kemaren ada anak ya, yang gak mampu itu sama pendamping dicarikan beasiswa mbk atau direkom ke sekolahan yang murah atau kerja sama itu mbk dengan sekolahan yang dituju untuk mendapatkan keringanan biaya." (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>i. "Soalnya kan pendamping wajib mendampingi anak setelah kegiatan untuk didaftarkan ke sekolah yang sebelumnya telah di rekom. Sama ini juga mbk kemaren ada anak ya, yang gak mampu itu sama pendamping dicarikan beasiswa mbk atau direkom ke sekolahan yang murah atau kerja sama itu mbk dengan sekolahan yang dituju untuk mendapatkan keringanan biaya." (IH, 13 Desember 2017)</p> <p>1. "Ya mereka mengikuti pembelajaran dan materi yang disampaikan, kemudian kalo ada waktu senggang mereka mempersiapkan pada akhir kegiatan misalkan seperti menampilkan drama, ada yang latihan nyanyi, ada menari gitu." (EH, 4 Desember 2017)</p>		<p>3. Aktivitas pekerja anak yang mengikuti program PPA-PKH tahun 2016 pada Shelter Krai yaitu:</p> <p>a. Bangun tidur dan MCK</p>
--	--------------------------	---	--	--

	<p>2. “Aktivitasnya dia harus mengikuti BBM (Badan Mengajar) dari rencana induk shelter di pendamping, kemudian diimplementasikan ke mingguan dan diimplementasikan ke harian. Sehingga paling tidak anak-anak itu nanti secara psikis, dan mentalnya, sehingga dia siap kembali ke sekolah. Karena kan gini loh mbak. Anak kecil itu, punya tabiat untuk meniru, kalo dia kelingkungan kerja, kalo ada orang merokok dia akan merokok, ada orang mengatakan kata-kata yang tidak sesuai dia akan mengatakan. Dia mempunyai tabiat meniru, kemudian masuk ke karakter atau kumpulan anak dengan berbagai karakter anak yang bermacam-macam itu, perilaku-perilaku ditempat kerja itu dibawa ke shelter. Jadi peran pendamping, peran instruktur, untuk kemudian memperbaiki perilakunya kembali sehingga dia, perilakunya-perilaku anak lagi bukan perilaku orang dewasa. Nah begitu dengan kurikulum-kurikulum yang sudah disusun tadi.” (YA, 21 November 2017)</p> <p>3. “Ya itu tadi di kasih motivasi-motivasi. Jadi gak ada kecuali jam istirahat mereka harus aktif dalam pemberian motivasi-motivasi. Nah kebetulan ada kalanya tidak di Yosowilangun, nuakal itu ada, penanganannya pinter-pinternya pendamping untuk bisa mengarahkan mereka. Misalnya nakalnya kayak ngerokok dijam – jam materi kan berpengaruh kepada teman-temannya. kalo pendampingnya merekrut pekerja anak dan anak putus sekolahnya nakal-nakal ya, harus bisa ngatasi juga.” (RI, 28 November 2017)</p> <p>4. “Belajar akademik pasti dan non akademik, ketrampilan, mereka diajarin bikin kue, mereka diajarin ketrampilan dari Koran dan dari apa itu wis, kita memberkan mereka bekal soal ketrampilan karena gini, kita tidak mau mereka masuk ke dunia pendidikan kemudian mereka keluar mereka tidak harus jadi guru, jadi PNS juga tidak, supaya mereka bisa berwirausaha, nah itu yang kita kasih ke anak-anak itu.” (VF, 28 November 2017)</p> <p>5. “Ya itu tadi sudah saya jelaskan, pokoknya bangun pagi bersih-bersih terus kegiatan materi terus siang itu sholat bareng terus sore kita mandi juga dikasih waktu, sekian jam. Kemudian seelah magrib itu, kita kadang ada pembinaan, dimusola, terus kemaren pas ada acara apa ya, lupa saya pokoknya disitu sama warga-warga itu, ngumpul dimushola.” (DF, 8 Desember 2017)</p>		<p>b. Mengikuti senam pagi bersama dengan pendamping.</p> <p>c. Makan pagi/ sarapan</p> <p>d. Mengikuti pembelajaran mulai dari pagi sampai dengan malam.</p> <p>e. Menyiapkan penampilan untuk persembahan pada malam puncak (malam terakhir) pelaksanaan PPA-PKH Shelter Krai.</p> <p>f. Mengikuti pembelajaran vokasional yang telah disesuaikan dengan minat/bakat masing-masing anak.</p>
--	---	--	--

		<p>6. “Kalo aktifitasnya kalo pagi mereka olahraga, baru selanjutnya mreka menerima materi, dengan materi yang sudah terjadwal, setelah itu siang nanti mereka istirht, dan menerim materi lagi bru kemudian istirahat kembali.” (HH, 23 November 2017)</p> <p>7. “Aktivitasnya anakanak mengikuti kegiatan, yang telah pendamping persiapan ndok, jadi anak-anak mengikuti semua kegiatan yang sudah dijadwalkan.aktivitasnya itu pagi ya bangun, sholat, kemudian senam pagi, setelah itu makan pagi, kemudian menerima pelajaran siang istirahat dan makan itu ndok, kemudian dilanjut makan lagi kemudian sore menjelang malam itu kita materi lagi ndok, itu ada dijadwal ndok.” (WU, 23 November 2017)</p> <p>8. “Murni hanya mengikuti pembelajaran di shelter dan pendamping berusaha mendorong anak-anak agar bertanya dan aktif dalam forum. Pagi itu ya sholat subuh, makan, olahraga, kemudian mandi, kemudian ya mengikuti materi. Pagi sebelum dzuhur itu ada 2 materi mbk, kemudian siang ishoma, lanjut 1 materi dan sore istirahat sampai habis isya, setelah itu ada aktivitas penghibur anak-anak seperti pemberian motivasi melalui film.” (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>9. “Kalo pagi mereka olahraga dan sholat subuh itu kemudian diikuti materi mbk selama 2 materi dan siang istirahat kemudian materi lagi dan istirahat sampai isya dan dilanjut materi pendukung atau motivasi mbk. “ (IH, 13 Desember 2017)</p> <p>10. “ Nyapu-nyapu, makan, olahraga , setelah iku materi, makan setelah makan materi lagi setelah itu istirahat terus makan lagi setelah bengi nonton film (nobar), kadang ketrampilan terus bubuk wes kak kan wes bengi.” (RR, 3 Desember 2017)</p> <p>11. “Ye tak ganoh pak apah, ye sekolah engak sekolah pole tapeh gun perak sebulen dek yeh mbk. Kadeng bedeh se dari kepolisian ngajer masalah kenakalan remaja bik narkoba mbk. Bedeh pole taoh dari dimmah aberik materi ketrampilan agebeh tor montoran se kek lakek, mon se binik cak en tang kancah ruah brok mbk.” (AH, 21 Desember 2017)</p>		
--	--	---	--	--

	<p>4. Keterlibatan Anak</p>	<p>a. “Kalo keterlibatan pesertanya ya cukup aktif karena memang ada satu atau dua peserta yang pasif mbk karena mungkin malu ya, gitu. Di minggu pertama memang kurang aktif mbk, karena memang adaptasi anak berbeda-beda. Setelah minggu kedua sampai dengan terakhir anak-anak mulai tergerakkan bertanya ke pemateri mengenai materi yang disampaikan.” (EH, 4 Desember 2017)</p> <p>b. “Keterlibatannya cukup aktif, cukup antusias, memang karena karakter anak, dari karakter bekerja dengan lingkungan orang dewasa, kemudian dia harus masuk ke lingkungan sekolah itu tidak mudah untuk merubah karakter anak itu, sehingga dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketelatenan. Kalo ada yang sakit itu kan juga harus diberi obat, ada juga yang kesurupan, ya banyak gitu.” (YA, 23 November 2017)</p> <p>c. “Nah, itu kebetulan aktif ya, temen-temen pintar dalam mencari tutornya. Tutor itu sangat berpengaruh. Tutor itu ada yang kreasi dari membuat anak-anak senang belajar, kalo tutor yang nguruk i bahasa inggris. Ayo belajar. La senang kan mereka, kadang kan jarang ya ngomong bahasa inggis setelah diajarin bahasa ungris kadang senang mereka .. yes, yes, no, no gitu kadang anak-anak yang belum tau bahasa nggris. Kadang drama diselipkan bahasa inggris. Biar anak-anak itu semangat gitu. Tari tarian membuat aneka ketrampilan, mereka sangat senang.” (RI, 28 November 2017)</p> <p>d. “Macem-macam mbk ada juga yang tergantung anaknya, ada yang antusias, ada juga yang mengejar uang saku, karena mungkin tidak semua peserta PPA-pKH itu antusias ingin kembali ke sekolah, tapi karena mereka, ada bayangan, oh, entuk duek sanga, aku masio gak kerjo, ibaratnya kan, masio gak kerjo aku entuk ganti.” (VF, 28 November 2017)</p> <p>e. “Kan gini mbk anak putus sekolah itu mereka kan pergaulannya kan agar liar ya mungkin setelah bekerja terus malamnya dia begadang, nah itu pergaulannya tidak terarah. Nah setelah di shelter mereka dididik kan bangun pagi harus jam sekian terus kegiatan bersih-bersih kemudian jam 8 sampek jam berapa itu, pembelajaran.</p>		<p>4. Pelaksanaan program Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan di Shelter Krai yang mempunyai orientasi agar pekerja anak dapat ditarik dari tempat mereka bekerja dan selanjutnya dikembalikan ke dunia pendidikan (ke sekolah) tidak terlepas dari keterlibatan anak selama kegiatan berlangsung. Keterlibatan pekerja anak dalam program PPA-PKH tahun 2016 di Shelter Krai sangat aktif. Hal ini dibuktikan dengan pemberian kesempatan oleh tutor dan pendamping kepada anak-anak untuk bertanya. Selain keterlibatan di dalam shelter, anak dalam melaksanakan segala aktivitasnya selama di shelter selalu tepat waktu. Anak-anak yang mengikuti program PPA-PKH tahun 2016 pada Shelter Krai hanya dengan tujuan mengejar uang saku yang diberikan oleh Disnakertrans sebesar 1.000.000 per anak.</p>
--	-----------------------------	---	--	---

		<p>Kemudian ishoma kemudian pembelajaran lagi, kan langsung jadi mereka mau ndak mau harus aktif. Harus mau dengan kegiatan itu.”(DF, 8 Desember 2017)</p> <p>f. “Kalo keterlibatan mereka cukup ktif, Cuma karena memng, anak yang putus sekolah dan pekerja nak ketik dibandingkan dengan anak-anak yang sekolah artinya, dengan anak-anak yang normal tentunya sangat berbeda, mereka mempunyai penanganan khusus, karena pada dasarnya kenakalan mereka cukup beragam. Kita bekerja keras memberikan proses pembelajaran, terhadap mereka sehingga mereka paham, bagaimana tujuan pelaksanaan PPA_PKH ditetapkan. Nah kalo mereka, cukup aktif dalam mengikuti, program PPA-PKH.” (HH, 23 November 2017)</p> <p>g. “Iya ndok, kalo perubahan ada ndok, perubahan mesti ada, ini diketahui dengan kembalinya mereka ke lembaga pendidikan, jadi anak bisa aktif didalam pembelajaran, mereka mendapatkan motivasi-motivasi dengan kegiatan ini karena, dengan adanya kegiatan ini anak-anak, mampu kembali ke tempat sekolahnya, kan yang mereka harapan itu bisa kembali ke dunia pendidikan dengan gratis ndok.” (WU, 23 November 2017)</p> <p>h. “Keterlibatan peserta ya kan beragam ya mbk, keaktifan peserta juga dilihat dari perkembangan per minggunya mbk, kalo di minggu pertama masih gak aktif. Tapi minggu kedua dan slanjutnya anak mulai banyak yang bertanya kan biasa mbk pertama itu anak-anak dalam tahap adaptasi kan. Kalo keterlibatannya semua peserta ya terlibat mbk. Kan di krai kemaren 2 shelter dijadikan satu.” (IH, 13 Desember 2017)</p> <p>i. “Kemaren itu anak-anak cukup aktif ya, bahkan ketika pasca program anak-anak hampir semua anak di rekom ke sekolah, PKBM, dan juga kursus-kursus computer mbk. Awal mulanya masih belum beradaptasi kan, jadi masih belum eektif dan terlihat keaktifan anak. Setelah minggu ke 2 mulai berani anak-anak karena selesai materi anak-anak itu diberikan motivasi oleh pendamping mbk. Setelah tutor selesai mengantar dan memberikan materi setelah itu kewajibannya pendamping memberikan motivasi-motivasi mbk. Minggu ketiga tambah meningkat mbk , dari yang minggu kedua</p>		
--	--	---	--	--

	<p>5. Materi-materi selama di Shelter</p>	<p>yang Tanya itu 2/ 3 minggu ketiga itu meningkat jadi 10 yang Tanya mbk. Alhamdulillah kita sebagai tutor bisa transfer ilmu lah mbk.” (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>j. “Kadang koncoku enek sing ngerungokno kadang enggak, misale ngene mbk, lek bimbingane mbk devi iku kabeh ngerungoko, onok 1 arek sing nakal mbk. Kan bedo-bedo arek-arek iku mbk. Tapi rata-rata aktif kok mbk arek-arek takon. Opo maneh sing materine Tanganku untuk apa iku materi sing paling aku senengi mbk.” (MR, 21 Desember 2017)</p> <p>k. “Ya, ngapain ya kak kayak sekolah itu wes kak. Ngikutin program kak, dariawal sampai dengan lulus kak, tpi sering telat kak saya ikut pelajaran soalnya sudah terbiasa saya bangunnya siang, kan kerja masuknya jam 8 mbk, di PPA-PKH saya dibangun jam set. 5 untuk sholat bareng mbk, dan gak tidur lagi, jadi belum terbiasa. Minggu ketiga sudah mulai terbiasa bangun pagi mbk.” (LL, 3 Desember 2017)</p> <p>1. “...mereka dikasih pelajaran, dari dinas pendidikan, dari dinas kesehatan dari kesehatannya, kemudian dari agama, kemudian setelah itu dari dinas sosial... Dikasih materi ketrampilan, ada malah yag bahasa inggris, ada yang matematika, terus ya agama itu... e. kalo mereka itu tidak bisa melanjutkan istilahnya tambahan. Kalo yang melanjutkan, kebetulan dia sekolah, dia bisa membuat tas, apa gitu kan bisa, untuk tambahan bisa.” (EH, 4 Desember 2017)</p> <p>2. “Materi yang disampaikan ada 2 kategori yang pertama ada materi akademis dan materi non akademis. Akademis itu sesuai dengan mata pelajaran di sekolahan pada umumnya dan non akademis berkaitan dengan pendidikan ketrampilan itu mbk, jadi sebisa mungkin kita memberikan pendidikan karakter juga ketrampilan dimasa depan.” (YA, 21 November 2017)</p> <p>3. “...mungkin di sela-sela itu anak-anak diberikan, materi drama, diajarin juga, menari... Iya, untuk memancing apa sih bakat minat anak ini, agar nanti diarahkan... Ayo belajar . La seneng kan mereka, kadang kan jarang ya ngomong bahasa inggis setelah diajarin bahasa</p>		<p>5. Materi-materi yang diberikan oleh tutor maupun pendamping selama proses pendampingan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Materi-materi yang sering disampaikan oleh lembaga sekolah seperti bahasa Indonesia, ilmu mpengetahuan sosial, matematika, agama dan bahasa inggris. b. Materi-materi yang tidak disampaikan oleh lembaga sekolah seperti materi tentang ketrampilan-ketrampilan dan materi pendidikan vokasional serta materi-materi umum tentang kenakalan remaja,
--	---	---	--	---

		<p>unggris kadang seneng mereka .. yes, yes, no, no gitu kadang anak-anak yang belum tau bahasa nggris. Kadang drama diselipkan bahasa inggris. Biar anak-anak itu semangat gitu. Tari tarian membuat aneka ketrampilan, mereka sangat seneng.” (RI, 28 November 2017)</p> <p>4. “Materinya banyak mbk tentang pendidikan juga tentang kesehatan. Selain dari tutor itu ada tutor dari dinas, ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial. Itu langsung dari dinas sana... Heem misalnya dari dinas kesehatan, itu yang memberikan tentang arti penting kesehatan mbk.” (DF, 8 Desember 2017)</p> <p>5. “Diantaranya adalah pelajaran formal, yang biasa diberikan dilembaga pendidikan formal baik itu matematika atau bahasa Indonesia da nada juga pelajaran agama, ada juga materimateri yang kaitannya dengan, pengembangan diri dan pribadi, serta kecakapan sosial dan ada pendidikan vokasional.” (HH, 23 November 2017)</p> <p>6. “...proses pembelajaran di shelter itu, lebih menekankan terhadap pengenalan kembali terhadap dunia pendidikan, dan terakhir mampu mngembalikan anaka-anak ke dunia sekolah dengan materi-materi itu ndok, pengenalan, kontrak belajar, bimbingan belajar dikasih kelompok mereka ndok.” (WU, 23 November 2017)</p> <p>7. “Misalkan pendidikan di luar akademik sebenarnya banyak, kita mendatangkan dari dinsos, agar mereka bisa melakukan pendekatan secara sosial, sosialiasasi mereka, kemudian ada yang dari polres, yang mengajari tentang kenakalan remaja, soal narkoba, soal kriminalitas, semua kita kenalkan, jadi semua kegiatan itu bidangnya polres, kita undang juga dari diknas, biar mereka paham apa aja bentuk-bentuknya sekolah, kenapa mereka sekolah di SD, kenapa sekolah di SMP dan SMA, kita kasih pandangan sama diknas, supaya mereka terangsang kira-kira mereka pengen sekolah kemana, misalkan dijelaskan soal SMK, SMK itu kita dikasik kejuruan jadi mereka dikasih rangsangan bayangan supaya mereka itu punya pandangan mengenai sekolah, ada yang suka agama juga ada, aku pengen di MA aja wis gitu, ada yang dari dinkes, mereka di kasih materi tentang pola hidup bersih dan sehat, kemudian soal kesehatan, pokoknya tentang kesehatan lah.” (VF, 28 November2017)</p>		<p>kesehatan, permasalahan sosial.</p>
--	--	--	--	--

	<p>6. Stimulant-stimulant</p>	<p>8. “Beragam mbk, dan diklasifikasikan yaitu pendidikan akdemis dan pendidikan non akademis mbk...Kalo akademis itu mbk kita mengacu kepada pembelajaran di sekolahan pada umumnya seperti pendidikan dasar matematika, bahasa indonesia, bahasa inggris ada juga agama dan non akademis kita orientasikan ke stake holder td mbk misalya dari dinas kesehatan itu yang ngisi pola hidup bersih. Pelajaran seperti itu kan biasanya harus bersekolah di sekolahan kesehatan kan mbk. Itu yang dimaksud pendidikan non akademis atau pendidikan vokasional mbk.” (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>9. “Materi yang sesuai dengan lembaga pendidikan formal mbk seperti matematika, bahasa inggris, bahasa Indonesia , ipa itu, ada juga materi non formal mbk, seperti materi kesehatan, materi ketrampilan – ketrampilan yang disukai anak-anak misalnya anak-anak laki-laki pada umumnya suka mainan dari motor, kita ajarin itu mbk ketrampilan motor. Nah kalo yang perempuannya kita ajarin bikin aksesoris itu mbk.” (IH, 13 Desember 2017)</p> <p>a. “kalo penyemangat itu variasi tiap-tiap pendamping loh mbk, ada yang memotivasi dengan cara nyanyi-nyayi, ada juga yang memotivasi lewat olahraga. Tergantung karakter anak, kalo pas materi berlangsung yang memberikan materi itu ada tutor mbk, seperti ice breaking itu. Ice breaking yang diberikan ya memang inovatif kan orientasinya mengacu kepada kembalinya anak ke bangku sekolah. Mengenai ice breakingnya terserah pendamping dan tutor mbk.” (EH, 4 Desember 2017)</p> <p>b. “Iya, itu semua sudah terinklute dimateri-materi penguatan-penguatan yang diberikan, jadi misalnya diawal kita tanyak apa cita-citamu, apa langkah-langkahmu, kemudian dia juga diajarkan untuk yang muslim untuk kembali ke rutinitas agamanya, kemudian motivasi-motivasi dalam bentuk tindakan, semuanya inklute didalam program yang sudah dibuat dalam satu bulan yang sudah dipecah-pecah tadi.” (YA, 21 November 2017)</p> <p>c. “Karena pendamping tadi kebanyakan sarjana guru ya, jadi, mereka punya kiat-kiat ketika masih kuliah itu bagaimana, kalo karakter</p>		<p>6. Stimulan merupakan semangat-semangat yang telah direncanakan oleh pelaksana program, pendamping, dan tutor. Stimulasi yang diberikan oleh pendamping kepada pekerja anak yang mengikuti program PPA-PKH dilakukan dengan strategi disesuaikan dengan kondisi dan karakter anak. Misalnya anak yang suka dengan nyanyi-nyanyi akan di motivasi dengan pemutaran music, ada juga karakter anak yang lebih menyukai olahraga. Didalan shelter akan dimotivasi olahraga seperti senam pagi. Proses pendamping</p>
--	-------------------------------	--	--	---

		<p>begini, harus dimotivasi bagaimana, stimulant itu otomatis dari pendamping, anak ini kok dikasih jurus ini kok gak mempan tak kasik jurus ini siapa tau mempan. Begitu. Per anak perlakuannya beda-beda dan untuk penanganannya itu terserah pendamping, bagaimana bisa memotivasi anak dengan baik, ada seperti keberhasilannya sendiri untuk menerapkan ilmunya yang diperoleh dimasa kuliahnya agar anak ini termotivasi lagi itu seperti ilmu yang ada di pendamping... Ya mereka dimotivasi misalnya “kamu kalo mencari rumput terus boleh sekali-kali itu membantu oragtua asalkan kamu tetap sekolah, tapi kamu juga tidak harus seperti oragtuamu yang mencari rumput terus, kamu harus sedikit meningkat dari orag tua mu, kalo dengan ilmu insyaallah bisa meningkat kualitas kerjamu, jadi diberikan pengertian seperti itu agar anak itu paham mengenai arti pentingnya pendidikan, intinya motivasinya itu ilmu itu penting, agar mereka nanti sekolah semua tidak nganggur, atau dapat berguna dimasa depan itu.” (RI, 28 November 2017)</p> <p>d. “Kita sih patokannya sebenarnya ijazah, yang kita jadikan stimulant, yang kita jadikan imingimng, kalo kamu gak punya ijazah kamu mau kerja dimana aja kamu kerja akan di tolak... Iya .. tapi beda lagi kalo kamu punya ijazah, stimulannya kit iming-imingi suatu hal yang belum mereka punya, mereka bisa melihat kita, kita kerja enak kan dapat duit gak harus panas-panasan, itu kan proses stimulant juga menurut aku.” (VF, 28 November 2017)</p> <p>e. “Kita memberikan gambaran ke mereka pentingnya pendidkan seperti apa, kemudian kan bentar lagi mereka akan menjadi seorang ayah, seorang ibu, jadi mereka harus mempunyai pendidikan yang tinggi dan berguna buat bekerja itu kan penting banget itu, ijazah kalo SMA kan SD itu kan buat apa ? sedangkan untuk tingkat SMA kan bis digunakan di kantor kan sudah bisa, dikoperasi-koperasi itu. Kalo dikoperasi ijazah SD kan langsung ditolak, jadi mereka punya gambaran oh ya, jadi pendidikan itu penting jadi mereka mau. Selain ke anak orangtua juga bisa beri arahan kepada anak-anaknya setelah kita mengarahkan ke orantua anak.” (DF, 8 Desember 2017)</p> <p>f. “Banyak terutama dalam proses penyadaran, penyadaran pentingnya pendidikan bagi anak di usia produktif, tanggung jawa mereka sebagai individu, sehingga mereka tersadar untuk kembali ke</p>		<p>menstimulan anak-anak dengan cara menyisipkan semangat anak-anak selama materi berlangsung dan pendamping awalnya menanyakan “ apa cita-citamu kepada anak”.</p> <p>Pemberian stimulant-stimulan semangat dilakukan oleh pendamping yang berasal dari background guru dengan cara memberikan gambaran sederhana mengenai akan kualitas hidup manusia akan terus meningkat setiap tahunnya.</p>
--	--	---	--	---

		<p>sekolah. Terus tanggung jawab mereka kepada masyarakat, itu juga sangat penting untuk kita sadarkan kepada anakanak penerima manfaa, karena pada intinya, pendidikan itu sangat penting dan kebetulan masyarakat itu butuh SDM yang mumpuni, sehingga mereka bisa totalitas beraktualisasi... Kalo kemaren tahun 2016 iya, dari awal sampai akhir, kita memberikan, motivasi agar mereka kembali ke dunia pendidikan. Semangat itu, berupa motivasi-motivasi itu, motivasi-motivasi dengan membandingkan dengan anak yang memang sekolah, dengan anak-anak yang tidak sekolah dan mereka akhirnya memilih untuk kerja . kerja di panas-panas. Dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi, anak usia produktif itu, agar mereka bisa maksimal. Perbandingan –perbandingan itu kita berikan kepada anak anak agar mereka tertarik untuk, kembali kepada dunia pendidikan, karena memang, berkaitan dengan tujuan Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa ddengan wajib belajar 12 tahun.” (HH, 23 November 2017)</p> <p>g.“Kita menggunakan pendekatanpendekatan ndok, ketika waktu istirahat anak malam itu sambil kita lakukan motivasi semangat gitu ndok, memberitahu keanak-anak tentang keinginan mereka kedepan, jadi 4 bulan itu kita melakukan pendampingan satu bu;an di shelter, tidak hanya pada saat materi. Kan anoh ndok, pendamping nikah harus wajib nginep ning shelter, kita di shelter tidak istirahat saja ndok , tapi memotivasi anakanak juga, kita juga melihat kondisi anakanak ketika anak-anak sedang melakukan sesuatu kita hampiri dan kita tanyakan anak tersebut tentang materi yang sudah diberikan dikahir pembelajaran. Istilahnya review ndok.. Iya seperti nonton film, nonton film-film motivasi yang mengandung pesan moral bahwa dulu orang sekolah itu ingin sekali sekolah tapi tidak bisa sekolah karena terapud masalah ekonomi, nah kini kan sekolah gratis, malah tidak ada yang memanfaatkan gitu ndok. Kemudian kita memberikan terapiterapi tentang semangat mereka tumbuh.” (WU, 23 November 2017)</p> <p>h.“Kita memberikan analogi sederhana ke anak-anak bahwa orang yang tidak sekolah dibandingkan dengan anak yang bersekolah. Wawasannya berbeda, kemudian kita juga menganalogikan bahwa, orang yang bekerja di pemerintahan itu bersekolah dan orang yang menjadi buruh kasar tidak harus punya ijazah. Stimulannya itu mbk.</p>		
--	--	---	--	--

	<p>7. Pendampingan</p>	<p>Kita bandingkan ke orang-orang yang sukses mbk... Hak dan kewenangannya pendamping mbk itu. Ya mestinya diberikan kana da tahap home visit juga mbk. Jadi tidak hanya anak yang diberikan stimulasi semangat akan tetapi orangtua atau orang yang berada di rumahnya mengenai pentingnya pendidikan bagi anak usia dini, dengan berbagai akibat-akibat jika anak-anak tidak disekolahkan. Sehingga gimana caranya pendampingitu intinya bisa mengembalikan anak ke bangku sekolah.” (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>i. “Melalui pemberian motivasi-motivasi semangat seperti nonton film bareng pada malam hari. Nah filmnya bukan sembarangan film, seperti film kisah hiudp seseorang yang tidak sekolah atau yang lainnya yang pada dasarnya itu berkaitan dengan motivasi agar anak tergerakkan untuk kembali ke bangku sekolahnya... Melalui pemberian motivasi-motivasi semangat seperti nonton film bareng pada malam hari. Nah filmnya bukan sembarangan film, seperti film kisah hiudp seseorang yang tidak sekolah atau yang lainnya yang pada dasarnya itu berkaitan dengan motivasi agar anak tergerakkan untuk kembali ke bangku sekolahnya.” (IH, 13 Desember 2017)</p> <p>1. “Sebetulnya itu kalo kita itu kita telah mengantarkan anak ke sekolah, untuk selanjutnya tidak ada. Sebetulnya itu dari daerah/ daerah kabuapaten yang memberikan bantuan... Itu waktu dia sekolah masih ada pendampingan, masih di awasi, bahkan, mereka masuk itu kan di rekom kan disana, kemudian betul tidak anak ini, sekolah disini, ya seperti itu mbk, ada surat keterangan dari SD, SMP, SMA, yang bersangkutan masalah rekom dari sekolahan itu.” (EH, 4 Desember 2017)</p> <p>2. “Kalo selesai program, itu kan waktunya memang kita biarkan, kita laksanakan di waktu liburan sekolah anak, nah jika liburan selesai shelter selesai, harus masuk ke sekolah, nah, ketika dia sudah masuk ke sekolah, kewenangan dari kami sudah berakhir, jadi kegiatan hanya sampek dia kembali ke sekolah. Nah siapa yang memasukkan anak-anak ke sekolah ? itu tugasnya pendamping, untuk mencarikan dia sekolah dimana, kemudian dana sekolahnya bagaimana? Itu tugas dari pendamping.” (YA, 21 November 2017)</p>		<p>7. Untuk mencapai tujuan dan orientasi dari program PPA-PKH yaitu mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak, proses pendampingan sangat penting dilakukan oleh pendamping. Pendampingan adalah kegiatan pendamping untuk mendampingi anak-anak baik ketika pra shelter, mendampingi anak-anak didalam shelter dan pendampingan yang dilakukan setelah selesai kegiatan selama di shelter. pendampingan pra shelter dapat terlihat ketika pendamping melakukan kegiatan home-visit dan</p>
--	------------------------	--	--	--

		<p>3. “Kegiatan lain itu hanya pemantauan anak dan evaluasi jadi setelah anak/meraka diberikan fasilitas berupa pembinaan selama satu bulan, mereka itu direkom dulu, anak nanti ditanya, kamu inginnya melanjutkan atau gimana?., Jadi di rekomendasi, oh saya inginnya ke pondok misalkan, saya ikut kejar paket, misalnya saya kok ingin melanjutkan ke sekolah saya kemarin. Nanti keinginan mereka kita rekom kan ke sekolah yang terkait. Setelah rekom kita kirim anak-anak ke pondok atau sekoahan yang dituju. Nah, kemudian kita melihat,entah anak-anak ini sesuai dengan rekomnya atau tidak. Kadang anak-anak sudah merekom itu tidak sama dengan tindak lanjutnya, awalnya di pondok, ternyata tindak lanjutnya di sekolah formal. Ada nanti dibuktikan dengan kerja samanya misalnya anak ikut ke Smp 1 Sukodono, nah anak itu akan diberikan surat keterangan semacam, bahwa anak ini benar-benar melanjutkan ke smp sukodono.“(RI, 28 November 2017)</p> <p>4. “Masih, jadi gini, setelah satu bulan , em, kan kita ada yang namanya tahap <i>home-visit</i>, tahap <i>home visit</i> itu kita ada yang 4 kali, 2 kali pra kita masuk shelter, pertama itu kita lakukan validasi data sampai akhirnya mereka siap untuk memasuki shelter, tahap 2 <i>home-visit</i> selanjutnya ialah mengembalikan atau mengantarkan anak kembali lagi ke dunia pendidikan, itu pasca shelter ya, ada tahap pengembalian anak ke dunia pendidikan, dan yang kedua monitoring mereka di sekolah mereka masih sekolah apa endak, mereka masih lanjut apa endak ?, gitu kan mereka kan dapat uang saku dapat uang...Mengembalikan anak ke dunia pendidikan. Kita mendaftarkan kita juga ikut ke sekolah, jadi pendamping itu ya ruwet di sekolah itu tadi, cuman kita ada dua alternative, anak bisa masuk ke pendidikan formal. Kenapa, yang pertama ada faktor usia. Kita itu kan di batasi usia anak dari umur 7 sampai 18 tahun, artinya , usia sekolah kan memang 7 sampek 18 tahun. Kalo mereka lebih dari 18 tahun gak ada di PPA-PKH cuman gini anak usia 18 tahun belum tamat SD kita tidak mungkin kan disuruh sekolah ke SDN. Sekolah tidak mau menerima anak sebesar itu, makanya kayak anak usia 17 tahun belum tamat SD kita masukkan paket C, ke BKBM, kita ada kerja sama BKBM. BKBM yang di Kenongo ada, BKBM berkobar namanya, jadi ada kerjasama. Jadi kalo misalkan anak yang tidak memungkinkan masuk ke sekolah formal, kita paketkan ke paket C, paket A, dan paket B. ada yang mau ke pondok juga boleh. Jadi ada</p>		<p>mengetahui kondisi anak. Pendampingan pada saat didalam shelter adalah dengan memberikan motivasi-motivasi agar anak bersemangat mengikuti pembelajaran. Pasca shelter, kegiatan pendampingan dapat terlihat ketika pendamping mendaftarkan anak-anak ke lembaga pendidikan.</p>
--	--	--	--	---

		<p>pendidikan formal dan non formal tadi.” (VF, 28 November 2017)</p> <p>5. “Setelah kegiatan selesai sudah gak ada mbk, Cuma kitakan memastikan mereka kan sudah kegiatannya kalo untuk anak-anak sudah tidak ada, kalo untuk pendamping. Pendamping tetep mengarahkan mereka ke pendidikan. Jadi kalo mereka sudah dipastikan sudah bersekolah itu baru. Kalo saya, kalo saya sampek mereka lulus saya damping, jadi mereka kemaren ada yang ujian di paket itu, yang tahun 2015 itu. Nah itu saya dampingi sampek ujian saya antar, kan ujiannya di Lumajang.” (DF, 8 Desember 2017)</p> <p>6. “Kalo dari pendamping tidak ada follow up, karena memang bahwa kita sering memantau, anak yang memasuki dunia pendidikan, terutama dengan kebutuhankebutuhan dasar mereka dan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk bagaimana membantu anakanak yang bersangkutan, terutama dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekolah. “(HH, 23 November 2017)</p> <p>7. “Ada ndok, kegiatan pendampigan , karena memang gini ndok, kita pendamping diharuskan untuk melakukan pendampingan terhadap anak-anak, mengantarkan anak-anak untuk mendaftar ke sekolah, kemudian sebelum mendaftarkan kita seringkali dating ndok dirumahnya anak-anak menanyakan perkembangan anak kepada orangtua anak tersebut terkait perilakunya, memastikan saja ndok sifatnya apakah anak-anaka benar-benar ingin sekolah dan bersekolah setelah di daftarkan gitu ndok.” (WU, 23 November 2017)</p> <p>8. “Otoritas sepenuhnya ketika selesai program atau kegiatan itu hak dan kewenangannya pendamping mbk, kita sebagai tutor gak ikut campur, kewenangan kita hanya selama di shelter. Tapi kemaren itu yang menanggung jawabi acara kemaren itu yang mencari shelter kan di rumahnya pak wahid itu mbk. Sepertinya ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping kemaren itu mbk. Soalnya kan pendamping wajib mendampingi anak setelah kegiatan untuk didaftarkan ke sekolah yang sebelumnya telah di rekom. Sama ini juga mbk kemaren ada anak ya, yang gak mampu itu sama pendamping dicarikan beasiswa mbk atau direkom ke sekolahan yang murah atau kerja sama itu mbk dengan sekolahan yang dituju</p>		
--	--	---	--	--

		<p>untuk mendapatkan keringanan biaya.” (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>9. “Kalo kegiatan resminya tidak ada mbk, jadi hanya ada follow up gitu dari pendamping ke anak-anak dan diantarkan katanya mbk anak-anak sampai kerumah kemudian didaftarkan ke bangku sekolah.” (IH, 13 Desember 2017)</p> <p>10. “Adek mbk, mek bu devi, pak husen, cakancah pak wahid adafaragi engkok bik tang kancha ke sekolahaan. Mon engko tak sekolah pole mbk gun perak norok pelatihan paket ruah ning BKBM gucialit 3 bulen mbk engko sekolah pole, eberik pesse seareh ruah 10 gebei sangonah dan edissah pas berik ngakan mbk, ye engak monduk 3 bulen ruah.” (AH, 21 Desember 2017)</p> <p>11. “Setelah iku ya gak ada kak... Iya kak, didaftarkan sekolah lagi kak... Di MA BUstanul Ulum kak... Kelas 3... Ya aktif mbk.” (RR, 3 Desember 2017)</p> <p>12. “Mari kegiatan adewe didaftarno mbk ning sekolahan ambek mbk devi, dadi yo saiki aku jepek jurusan pertanian, wis gapopo mbk sing penting sekolah sek mbk soale kan mengko lek kuliah kan enek beasiswa ngunu to mbk, didaftarno. Mbk devi iku sering ning umah mbk, sering ngomong ning bapak pisan, pokok e dinei pengetahuan bapak iku, diajari cene gak mempekerjakan anak e. tapi aku ngomong mbk ning mbk devi lek bapak gak ngongkon aku kerjo tapi akune sing pengen kerjo.” (MR, 21 Desember 2017)</p> <p>13. “Gak ada kak, cuman yang kejar paket itu ada kegiatan kak.cuman pas waktu itu temannya pak wahid yang cewek mbk nanikitu sama pak wahid mengntarkan saya ke orngtua dan bilang ke orangtua saya kalo saya mau diikutkan beasiswa pondok pesantren Bustnul ulum, saya dulu itu kan sekolah di SMP 2 Yosowilangun sini mbk berhenti kelas 2, jadi paskembali lagi ke sekolah kelas 2 mbk di ponpes.” (LL, 3 Desember 2017)</p>		
--	--	--	--	--

	<p>8. Penguatan Stake-holder</p>	<p>a. “Ya itu tadi ada dari dinas pendidikan, dari kementerian agama, dinas sosial, dinas kesehatan juga, polres. Polres yang ngisi kenakalan remaja.” (EH, 4 Desember 2017)</p> <p>b. “Bukan, ada 5 stakeholder, itu ada disnaker, dinkes, dispendik, dinsos, polres, depak, Ini namanya team pelaksana, jadi stakeholder yang sudah disebutkan tadi ada beberapa keterkaitan koordinasi dengan mereka, jadi ketika dia masuk, kita koornasi dengan dispendik, dia butuh BOS sehingga dispendik yang mencarikan.” (YA, 21 November 2017)</p> <p>c. “Disini ada dinas kesehatan yang nantinya fungsinya itu memberikan obat-obatan selama di shelter ya melihat kesehatannya, kemudian dari kepolisian itu nanti akan memberikan materi mengenai kenakalan remaja yang barangkali mereka itu tidak-tidak, sebetulnya bukan dari keluarga yang tidak mampu saja. Ada anak-anak yang tingkat kenakalannya putus sekolah itu nanti diberikan materi dari kepolisian membangkitkan kembali agar mereka itu termotivasi kenakalan remaja itu, tergolong nakal ya ,kalo nakal – nakal yang biasa mungkin bisa diatasi ya, kalo nakal-nakal yang tidak wajar kan dapat merugikan temannya. Dari departemen agama, mengenai siraman rohaninya, terus dari camat itu nanti berkaitan dengan wilayah shelter yang di tempati, kemudian ada dari dinsos itu, mengenai peserta program, kemudian dindik berkaitan dengan setelah anak itu diberikan motivasi di dalam shelter, selama satu bulan ya, mereka itu nantinya kan di teruskan ke dindik kita kerja sama dengan dindik, apakah mereka juga meneruskan sekolah misalnya di SMP, sekolah mana mereka akan meneruskan kita kerja sama dengan dindik. Kalo pun mereka nanti kursus kan masih ada dinsos ya , terus ada BKBM-BKBM itu kan masih ada di bawah dindik, barangkali anak-anak tidak mau di formal ya di pondok, misalnya di formal juga bisa.” (RI, 28 November 2017)</p> <p>d. “Ada dindik, polres, dinkes, dinsos, depag.” (VF, 28 November 2017)</p> <p>e. “5 kedinasan mbk, yang pertama itu ada polres yang mengajarkan materi-materi vokasional seperti pengenalan kenakalan remaja, bahaya nya narkoba, kemudin ada dinkes yang mengajarkan anak</p>	<p>8. Program PPA-PKH kabupaten lumajang merupakan kebijakan nasional yang dinaungi oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten lumajang. Pelaksanaan program PPA-PKH di Shelter krai melakukan kerja sama dengan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan, dinas sosial, dinas kesehatan, polres dan departemen agama. Kerja sama yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan PPA-PKH di Shelter Krai pada tahun 2016. Kerja sama dengan dinas pendidikan dilakukan untuk memberikan gambaran kepada anak tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Kedua yaitu kerja sama dengan dinas sosial dilakukan dengan tujuan memberikan kapasitas anak mengenai permasalahan sosial akan bertambah ketika anak putus sekolah dan bekerja. Ketiga yaitu kerja sama dengan dinas kesehatan dilakukan dengan tujuan agar menyediakan kebutuhan anak akan kesehatan seperti contoh ketika terdapat anak yang sakit selama di Shelter, dinas kesehatan berkewajiban memberikan fasilitas kesehatan berupa obat-obatan</p>
--	----------------------------------	---	--

		<p>tentang pengetahuan mengenai keehatan, pola hidup sehat , kemudian ada kementerian agama yang mengajari arti pentingnya beribadah dan menuntut ilmu mbk, ada juga dari dindik, ya ngajari tentang arti penting sekolah dasar. Dan yang terakhir itu ada dinsos yang mengajari anak-anak tentang permasalahan sosial, jika anak tidak sekolah makan akanmenambah permasalahan sosial di Indonesia. Itu mbk.” (DF, 8 Desember 2017)</p> <p>f. “Kalo stakeholder itu banyak termasuk, lembaga-lembaga pendidikan yang dalam ruang lingkup yosowilangun, yang sekaligus memberi support dari penerima manfaat program PPA-PKH.” (HH, 23 November 2017)</p> <p>g. “Banyak ndok ada polres, dinsos, kementerian agama, dispendik, dinas kesehatan, jadi semua itu ada bgiannya ngisi materi ndok, jadi dinas sosial ngisiny hari apa dan jam berapa misalnya. Jadi selama dishelter setiap minggunya diisi oleh lima stkae holder ini ndok. Ada keterpihakan beberapa, lembaga terkiat, dalam kegiatan PPA-PKH ini, diantaranya adalah kementerian agama, yang mana memberikan materi tentang keagamaan, agar anak-anak menyadari bahwa pentingnya agama didalam kehidupan bermasyarakat. Ada dinas pendidikan, untuk menjelaskan tentang pendidikan, ada dinas sosial, yang ngisi pentingnya cita-cita itu semua dapat dicapai dengan bersekolah, ada polres yang ngisi tentang kenakalan remaja, bahwa anak diusia ini kalo mereka nakal, akan berakibat fatal dengan halhal yang sudah di cita-citakan itu ndok.” (WU, 23 November 2017)</p> <p>h. “Polres mbk pasti itu memberikan materi tentang keamanan nasional dan juga kenakalan-kenakalan remaja, ada juga dinkes itu mengenai kesehatan, ada dinsos itu ngisi ketrampilan, ada juga dari depag yang memberikan siraman rohani, dindik memberikan wacana Wajar 12 tahun mbk.” (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>i. “Ada dindik, dinkes, polres, depag dan dinsos.” (IH, 13 Desember 2017)</p>		<p>dan layanan kesehatan di pelayanan kesehatan terdekat. Keempat dinas tenaga kerja dan transmigrasi bekerja sama dengan kepolisian resort dengan orientasi memberikan gambaran tentang pengenalan kenakalan remaja. Terakhir bekerja sama dengan departemen agama kabupaten lumajang dengan tujuan memberikan siraman rohani agar anak terbuka mata bathinnya.</p>
Tahap Pasca Program	1. Kendala-kendala	1. “Kendalanya untuk merubah karakter anak dari karakter dewasa ke karakter anak itu waktunya tidak secepat itu, jadi, harus ada, ahli psikologi, harus ada pendekatan –pendekatan psikologis yang memungkinkan ada perubahan-perubahan perilaku yang dibutuhkan.	Pada tahapan pasca program yaitu terdiri dari 2 yaitu	Setelah kegiatan di shelter selesai dilakukan, tahapan yang dilakukan oleh pelaksana program yaitu sebagai berikut:

		<p>Itu kalo yang implementatif ya. Tujuannya kan memang merubah/mempersiapkan anak. Pendamping-pendamping kita itu, fokusnya kan di pendidikan dia.jadi mau tidak mau, itu terserah kemauannya pendamping. Sehingga yang dimasukkan ya karakter ngajar-mengajar bukan karakter perubahan sifat bukan. Selain itu kita juga kesulitan meyakinkan orangtua kalo selesai dari shelter itu memang pekerja anak dikembalikan ke dunia pendidikan, terkadang ada orangtua yang belum mampu membiayai seperti uang saku serta pembiayaan buku-buku tulis ketika anak bersekolah. Itu sementara kesulitan dari program 2016 di Krai mbk.” (YA, 21 November 2017)</p> <p>2. “Iya itu dalane elek iku, jadi kita kurang maksimal, ya mengenai akses jalan itu, umpamanya jalannya enak ya kita bisa maksimal mbk, walaupun jalannya gak enak, apa ya hamper setiap hari saya kesana, ya melihat anak-anak itu. Selain akses jalan yang kurang memadai, pendamping seperti kesulitan mengubah pola pikir dan perilaku pekerja anak di shelter Krai itu.” (EH, 4 Desember 2017)</p> <p>3. “Kendalanya 1. Kalo mereka ingin merujuk kembali ke sekolahan kadang mereka balik lagi kepada konflik orangtua, kadang mulai dari seragam, kita kan terbatas. Kita kan memberikan seragam, dan uang saku merupakan sebuah pancingan agar mereka itu balik lagi ke sekolah tapi ya kalo keluarganya, tidak mempunyai biaya sekoah atau transport anaknya ke sekolah , ya kita gimana ya, ya itu lah kendalanya. Jadi sebisa mungkin teman-teman pendamping memberikan atau mencarikan sebuah BKBM yang tidak terlalu tinggi biayanya. Kendala yang lain ketika anak mau melanjutkan ke sekolahan. Nah, kita kan memang, setelah mereka sekolah, kita apakan lagi kalo mereka putus sekolah lagi. Kendalanya buat mereka tuntas untuk sekolah itu tidak gampang.” (RI, 28 November 2017)</p> <p>4. “Kendalanya 1 anak pasti yang sulit beradaptasi tidak akan krasan, itu faktor yang paling vital memang karena dari satu shelter memang anaknya nkal ya sudah, yang paling prioritas adalah anak harus bertahan selama 30 hari, sekarang tanpa anak, PPA-PKH tidak akan jalan kan, kendalanya kalo menurut aku ya itu tadi, kurang kemampuan anak untuk beradaptasi, jadi mereka merasa tidak krasan ya tadi itu tidak bisa beradaptasi, padahal setelah 30 hari</p>	<p>mengevaluasi program untuk mengetahui kendala-kendala program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan anak ke dunia pendidikan agar tercipta keberfungsian sosial anak yang dilakukan pendamping.</p>	<p>a. Melakukan evaluasi program yang bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di lapangan selama di shelter.</p> <p>b. Sebelum melakukan kegiatan evaluasi program pelaksana program melalui pendamping melakukan pendampingan kepada anak dampingannya untuk kembali bersekolah di lembaga pendidikan.</p>
--	--	--	--	---

		<p>mereka penegn ketemu lagi dan kembali ke shlter, cuman kan sayangnya programnya kan hanya satu kali tidak untuk anak yang sama kan . kendala yang kedua adalah cara memotivas anak itu kan berbeda-beda, terus waktunya belajar menagajar kan kita kebingungan cara memotivasi anak. Cara motivasinya berbeda-beda. Ada yang biasa aja ada yang semangat. Kemudian kendala yang ketiga pengemblian anak itu tadi, kita daftarkan ke sekolah tapi, anak-anak krasan apa enggak kita tidak tau di sekolah, sedangkan kita monitoring dan evaluasi, ke sekolah-sekolah itu, juga gak setiap hari dan bertahan lama. Aku rasa gk mungkin pendamping sampai 6 bulan, mereka intens ke sekolah-sekolah anak-anaknya aku rasa tidak.” (VF, 28 November 2017)</p> <p>5. “Kendalanya dari anak-anak itu da yang anu apa, misalnya anak-anak kan kalo di rumah itu tiap hari ketemu sama oragtuanya kalo disana kan kita berapa hari itu kemaren 4 minggu gak ketemu sama orangtua kadang malam itu nangis. Kalo yang laki-laki Alhamdulillah untuk tahun 2016 itu ndak ada masalah. Kalo dulu yang tahun 2015 banyak yang kesurupan mbk.” (DF, 8 Desember 2017)</p> <p>6. “Kendalanya pada wilayah pembinaan anak, dari kenakalan mereka yang beragam itu, kadang-kadang kita terkendala dengan proses pembelajaran. Hanya awalawalnya kita tidak bisa beradaptasi dengan anak-anak atau peserta program baik itu pendamping maupun tutor. Kedua adalah kedisiplinan. Sama halnya dengan proses pembelaaran akan berlangsung, didalam buku panduan pendamping itu 5 menit sebelum masuk , anak-anak harus sudah kumpul di tempat, mereka tidak segera datang akhirnya pendamping yang menjemput ke rumah singgah itu.” (HH, 23 November 2017)</p> <p>7. “Kendalanya ya hanya penanganan terhadap anak, kalo kendala-kedala lain tidak ada ndok, artinya penanganan anak yang seperti itu tidak mudah ndok, mengelola anak-anak. Intinya begini ndok, anak kan variatif, ada yang nakal ada yang agak nakal ada yang gak nakal ndok kan ya, kendalanya disitu ndok ngubahnya nakal menjadi gak nakal itu yang susah. Saya kira itu kendalanya ndok, kalo yang lain saya kira tidak ada ndok. Penanganan anak-anak itu jadi pendamping memiliki, bimbingan teknis itu ndok. Kendalanya gak ada.” (WU, 23</p>		
--	--	--	--	--

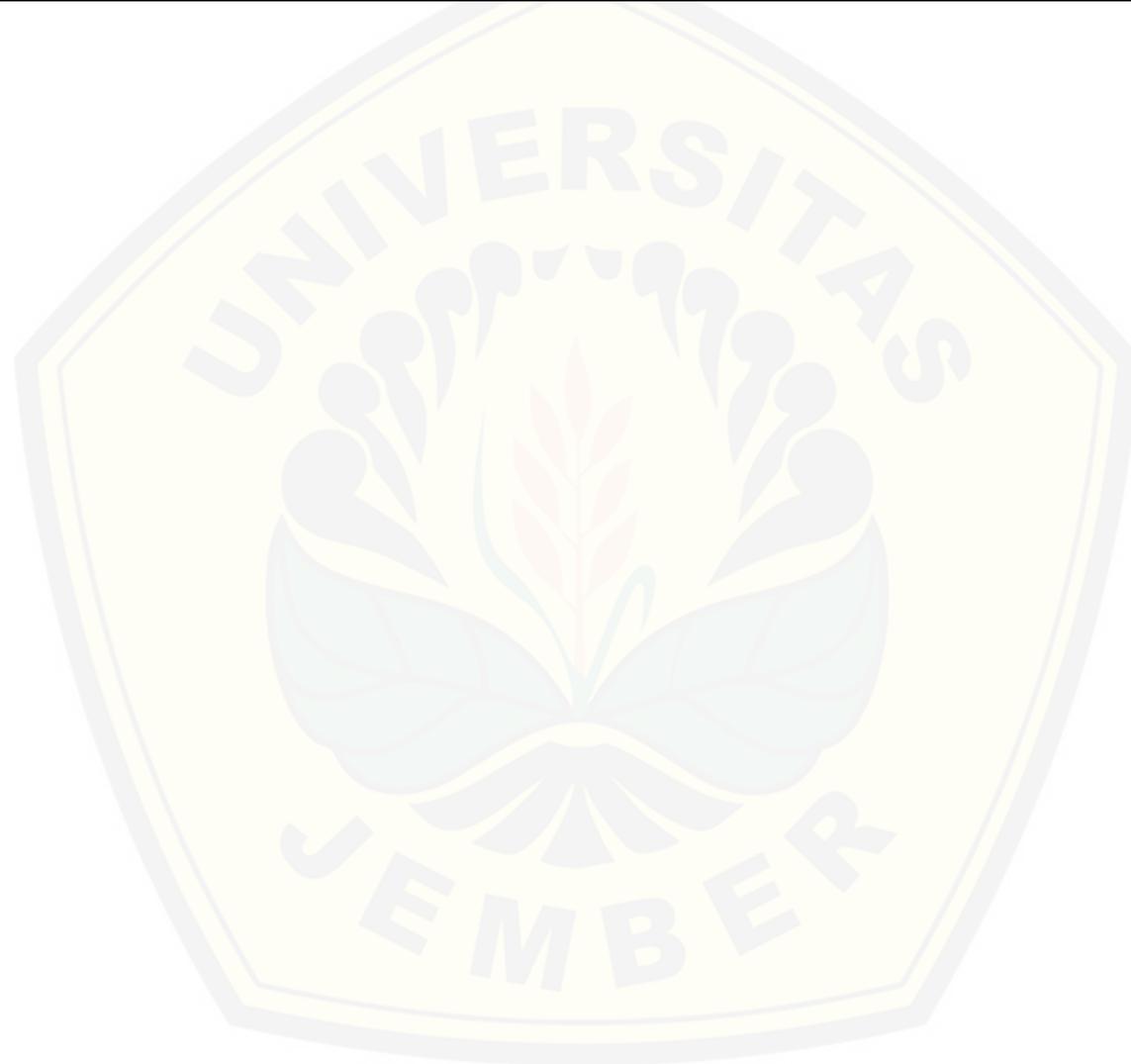
		<p>November 2017)</p> <p>8. “Dari tutor kenddalnya mengubah pola pikir anak-anak itu mbk yang paling susah mbk. Kan dari anak-anak itu berasal dari daerah yang memang sopan santune kurang. Kita dibentrokkan mengubah perilaku itu selama satu bulan, kan gak mudah toh mbk mengubah hal itu harus ada kemampuan atau skill khusus untuk mengubahnya kayak psikologi itu mbk. Sementara yang paling krusial ya itu kendalanya mbk. Yang lain ya teknis sih mbk seperti makannya telat gitu.” (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>9. “Gak ada sih mbk kalo dari tutor, oh ada satu mbk tutor kesulitan mbk megarahkan anak pada minggu pertama. Karena pada awalnya anak itu berasal dari macem-macem daerah dan mungkin tingkat adaptasinya kurang mbk. Jadi ya pada saat materi dimulai anak-anak rame mbk. Nah, memasuki minggu kedua itu semakin kurang anak-anak yang rame sendiri.” (IH, 13 Desember 2017)</p> <p>10. Materine abot kak, terus konco-koncoku geng-gengan kak.(RR, 3 Desember 2017)</p> <p>11. Kendalanya hanya soal pertemanan kak, ada geng-geng an mbk, kalo dari perempuan itu sih kalo laki-laki itu sama rata mbk. (LL, 3 Desember 2017)</p> <p>12. Lek kendala iku yo mbk devi sing ero, lek aku yo kendalane arek-arek lek tukaran iku gara-gara pacar misale, trus gara-gara omong dewe pas materi. Soale arek-arek macem-macem mbk. Biasane arek wedok sing rasan-rasan mbk masalah gapenting iku mbk akhire tukaran mbk. (MR, 21 Desember 2017)</p> <p>13. Tadek se mbk, ah bedeh se atokaran mbk pas terakir ruah mbk, tapeh nak kanak binik ruah arebbuk en cowok ye taoh lah mbk mon ngak jiah. Mon se lakek terutama nak kanak kalipepe keloppaen nyamannah aruah aomong tok pas pelajaran emolai mbk. Kan garaen tak konsentrasi engkok bik nak kanak se niat norok en program. (AH, 21 Desember 2017)</p>		
--	--	--	--	--

	2. Keberfungsian sosial Anak	<p>a. “Memberikan tugas dan kewenangan kepada anak-anak misalnya seperti membuka persidangan itu, sebelumnya ya sama seperti persiapan sebelum pelaksanaan mbk kita merencanakan dengan pendamping, rencana agar anak itu nantinya bisa mendapatkan kebutuhan seperti pendidikan. Bisa tersadar kalo pendidikan itu sangat penting bagi anak dimasa depannya. Suksesnya kami menyelenggarakan program ini ketika anak-anak dapat dikembalikan ke bangku sekolahnya mbk. Itu.” (NY, 13 Desember 2017)</p> <p>b. “Membuatkan rencana kita mbk tutor ke anak-anak terutama tentang materi-materi yang akan saya sampaikan ke anak-anak, ada trik tertentu memang dari tutor agar anak ini mendalami ilmu-ilmu yang sudah diberikan tapi tetap kita prioritaskan agar anak-anak tidak jenuh di shelter kita adakan ice breaking yang bermanfaat.” (IH, 13 Desember 2017)</p> <p>c. “Kita memberikan gambaran ke mereka pentingnya pendidikan seperti apa, kemudian kan bentar lagi mereka akan menjadi seorang ayah, seorang ibu, jadi mereka harus mempunyai pendidikan yang tinggi dan berguna buat bekerja itu kan penting banget itu, ijazah kalo SMA kan SD itu kan buat apa ? sedangkan untuk tingkat SMA kan bis digunakan di kantor kan sudah bisa, dikoperasi-koperasi itu. Kalo dikoperasi ijazah SD kan langsung ditolak, jadi mereka punya gambaran oh ya, jadi pendidikan itu penting jadi mereka mau. Selain ke anak orangtua juga bisa beri arahan kepada anak-anaknya setelah kita mengarahkan ke orangtua anak.” (DF, 8 Desember 2017)</p> <p>d. “Proses persiapannya melalui pembelajaran di shelter, pembelajaran dan pendampingan, dan dipastikan pasca shelter kita melakukan home-visit tadi ndok, jadi kan kita di shelter murni materi, menyampaikan ke anakanak selama waktu yang ada, menjelaskan bahwa sekolah itu penting untuk masa depan anak, setelah itu mereka pulang dan kita tidak menyuruh mereka pulang begitu saja, kita mendampingi mereka, menawarkan programprogram beasiswa kepada mereka, menanyakan keberniatan mereka dengan lembaga agar mereka itudapat secara sungguh-sungguh masuk sekolah itu. Kita mau masukkan mereka</p>	Hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program PPA-PKH tahun 2016 di kabupaten Lumajang pada shelter Krai adalah mengembalikan keberfungsian sosial pekerja anak. Berkaitan dengan keberfungsian sosial pekerja anak, pendamping sebelum melaksanakan program ini, pendamping terlebih dahulu merencanakan semua kegiatan untuk anak-anak agar mulai dari aktivitas anak-anak sampai dengan proses pendampingan anak ke lembaga pendidikan.
--	------------------------------	---	---

		<p>ke SMAkah, SMKkah, Makah atau paket-paket yang lainnya. Setelah pulang dari shelter langsung kita tanyakan ndok ke anaknya mau sekolah dimana dan kita juga kerja sama ndok, dengan lembagallembaga seperti kuleh gi ning Krai sebagai guru MA, di BU. Kita melakukan kerja sama, kerja sama bagaimana kemudian bisa membantu, memberikan suatu jawaban permasalahan anak—anak program keluarga harapan, agar mendapatkan keringanan dalam biaya sekolahnya ndok, kadang bisa jadi tidak usah dipungut biaya.” (WU, 23 November 2017)</p> <p>e. “Tentunya, dari proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping harus benar-benar dilakukan didalam melakukan kegiatan selama di shelter. Selama pelaksanaan berlangsung, kita orientasikan anakanak agar tidak bermasalah di dalam shelter, tapi bagaimana mereka dan juga temen-temen mereka menerima materi dengan baik. Karena tingkat kenakalan mereka yang beragam dan kemampuan berfikir juga, anak menjadi nakal sehingga mereka menghambat terhadap totalitas dan kapasitas mereka selama di shelter, sehingga kita tekankan mereka itu, ke internal mereka sendiri, sehingga jika terjadi perkelahian, karena kurang totalitasnya yang mereka lakukan dengan teman-temannya.” (HH, 23 November 2017)</p> <p>f. “Ya kalo sudah di shelter ya pendamping, pendamping itu sangat berpengaruh mbk, jadi pendamping itu harus bisa membawa mereka, kepada anak-anak peserta PPA-PKH itu, bagaimana anak-anak itu bisa bener-bener bis menikmati di dalam program. Jadi merasa enjoy, disuruh ini, nah itu peran pendamping sebenarnya. Bagaimana bisa ngelus anak. Bisa ngemong lah intinya, kan karakter anak beda-beda ya. ada perlakuan anak ada di pendamping sangat berpengaruh sekali. Makanya merekrut pendamping itu, ya tidak mudah karena nah karena yang akan dikelola itu juga anak-anak. Mengenai psikisnya . nah makanya, pendamping itu sangat berpengaruh banget. Kebetulan teman-teman pendamping memenuhi syarat semua.” (RI, 28 November 2017)</p> <p>g. “Kita waktu itu ada tutor, tutor itu khusus untuk akademik, karena anak itu sudah lama tidak belajar jadi terlupakan soal akademik, memang disamping kita ngasih motivasi, dan pendidikan yang</p>		
--	--	---	--	--

		<p>diberikan oleh dinkes, polres, kita ada pendidikan akademik, cuman, kita tidak boleh sering artinya gini, kita cuman merefresh apa yang mereka lupakan. Sebenarnya mereka pernah dikasik tp kan sudah lama tidak di pakek tidak ini ingat lagi, sebenarnya stimulannya ya itu tadi, belajar mengajar ya tutor, terus sama yang ngasih kerajinan itu kan masuk seperti tutor, jadi ada tutor ketrampilan ada tutor akademik, kalo pendamping sifatnya hanya motivator, jadi kalo motivator itu, tidak bisa dihitung sama dengan tutor, kita harus ngepin satu bulan dengan anak, kan pendamping juga tidur di shelter, kalo tutor kan bisa saja pulang kan, tutor ketrampilan juga bisa saja pulang sehabis mengajar tapi klo pendamping itu nginap dan kerjanya 24 jam non stop, jadi kita memotivasi mereka, mereka bermain pun mereka masih bekerja, bekerjanya ya memberikan motivasi supaya mereka ada naiatan yok opo se aku kudu sekolah supaya mereka kan bisa sekolah, kita ngasih contoh aja ke mereka, mereka melihat kita kerjanya semua pekerjaan pasti dapat uang cuman kan kalo mereka sekolah, mereka kan tidak harus jadi kuli, ya kita kasih gambaran sepertiitu, itu ja sih stimulannya.” (VF, 28 November 2017)</p> <p>h. “Jadi begini, batasan kami itu hanya sebatas, anak itu kembali ke sekolah, kemudian, ketika anak kembali ke sekolah, ya tugas kami sudah selesai disitu. Jadi konsepsi diawal, bahwa PPA-PKH Itu, adalah mengembalikan pekerja anak, agar dia tidak bekerja lagi, dan bersekolah. Kan anak itu bukan ranahnya dia untuk bekerja, dia waktunya sekolah. Nah, kenapa di disnaker, karena, disnaker itu ada UU no. 13 tahun 2003 itu yang menyatakan bahwa dilarang memperkerjakan anak. Tapi dipasal bawahnya tertulis, boleh mempekerjakan anak asal tidak mengganggu sekolahnya, bekerja 3 jam, dapat ijin dari orangtua, minat-bakat. Nah itu. Kendala dilapangan bahwa pekerja anak, faktanya tidak hanya itu, tapi dia tulang punggung keluarga, semestinya, kalo memang faktornya penarikan, bukan hanya anaknya yang dikuatkan, yang penting keluarganya juga diberikan stimulant sehingga ketika dia sudah masuk disekolah menggantikan penghasilan yang didapat oleh anak itu ketika lulus.” (YA, 21 November 2017)</p> <p>i. “Itu waktu dia sekolah masih ada pendampingan, masih di awasi, bahkan, mereka masuk itu kan di rekom kan disana, kemudian</p>		
--	--	--	--	--

		betul tidak anak ini, sekolah disini, ya seperti itu mbk, ada surat keterangan dari SD, SMP, SMA, yang bersangkutan masalah rekom dari sekolahan itu.” (EH, 4 Desember 2017)		
--	--	--	--	--



GUIDE INTERVIEW

**“Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan
Keberfungsian Sosial Pekerja Anak”**

Jenis Informan : Informan Pokok

Informan : Pelaksana Program PPA-PKH

Nama :

Jenis kelamin :

Alamat :

Agama :

Umur :

Tanda tangan :

Data yang ingin diperoleh :

A. Indikator Peningkatan Keberfungsian Sosial

Berusaha menyiapkan pelaksanaan program yang sesuai dengan pedoman program untuk memberikan dorongan dan motivasi bagi Pekerja Anak dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan, dan fungsinya dalam lingkungannya.

1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pasca Kegiatan

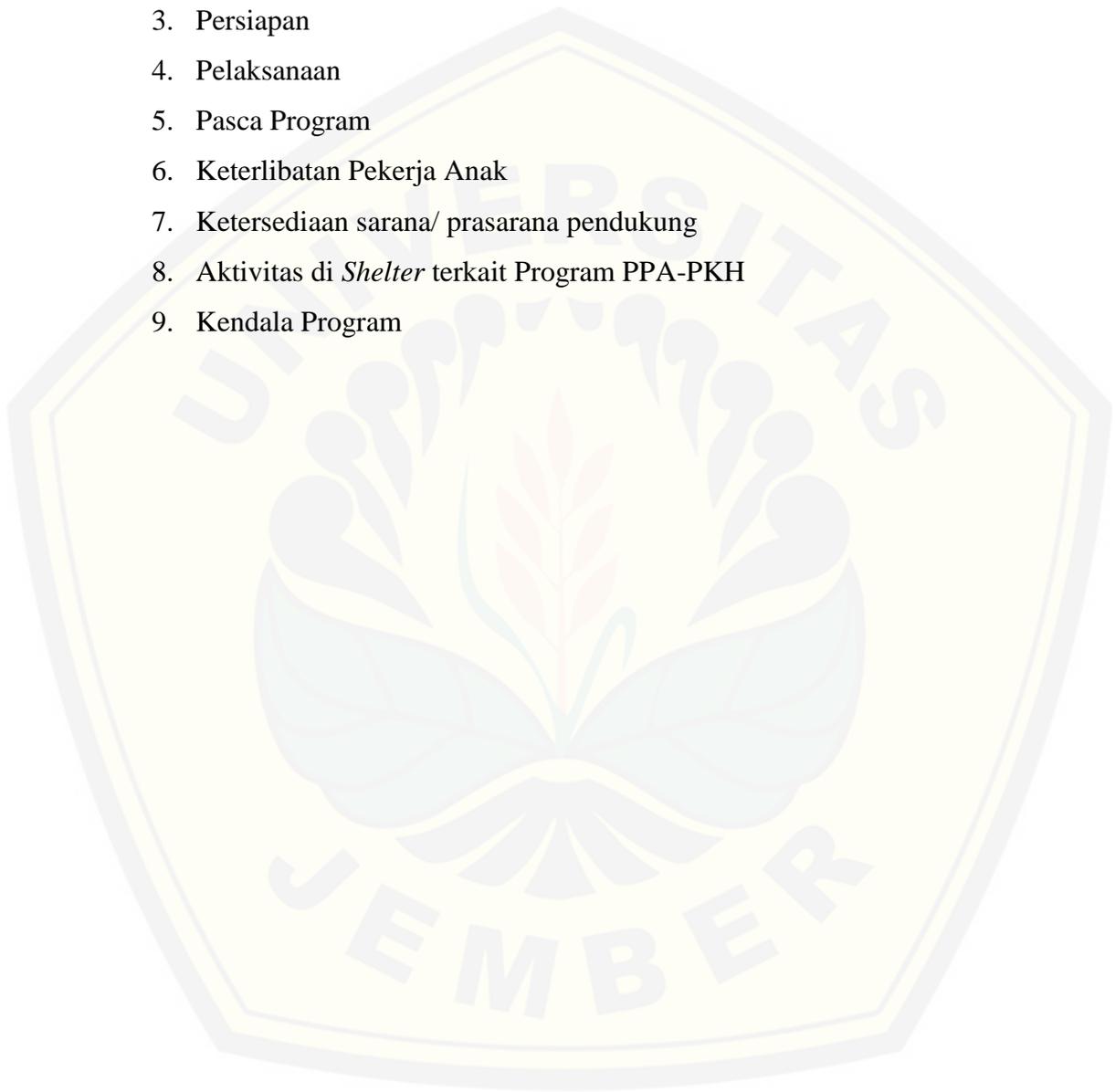
B. Tahapan Implementasi

Profil Lembaga dan Tahapan Implementasi

1. Profil Lembaga

2. Gambaran Umum Program :

- a. Sejarah
 - b. Visi/ Misi
 - c. Struktur organisasi
3. Persiapan
 4. Pelaksanaan
 5. Pasca Program
 6. Keterlibatan Pekerja Anak
 7. Ketersediaan sarana/ prasarana pendukung
 8. Aktivitas di *Shelter* terkait Program PPA-PKH
 9. Kendala Program



GUIDE INTERVIEW

**“Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan
Keberfungsian Sosial Pekerja Anak”**

Jenis Informan : Informan Pokok

Informan : Tutor

Nama :

Jenis kelamin :

Alamat :

Agama :

Umur :

Tanda tangan :

Data yang ingin diperoleh :

A. Indikator Peningkatan Keberfungsian Sosial

Berusaha menyiapkan materi pembelajaran yang akan diberikan kepada Pekerja Anak didalam *Shelter* (Rumah Singgah)

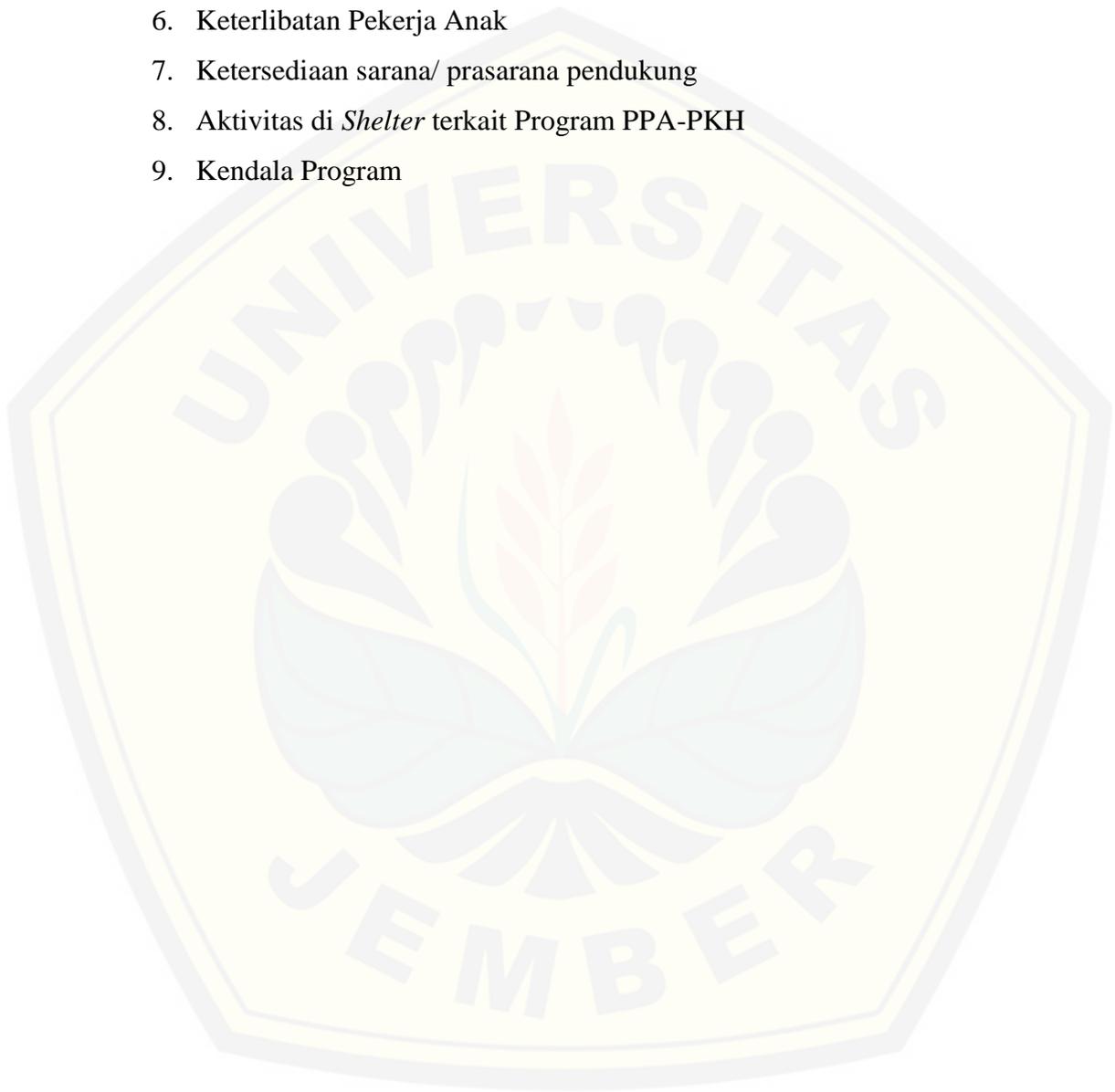
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan

B. Tahapan Implementasi

Profil Lembaga dan Tahapan Implementasi

1. Profil Lembaga
2. Gambaran Umum Program :
 - a. Sejarah
 - b. Visi/ Misi

- c. Struktur organisasi
3. Persiapan
4. Pelaksanaan
5. Pasca Program
6. Keterlibatan Pekerja Anak
7. Ketersediaan sarana/ prasarana pendukung
8. Aktivitas di *Shelter* terkait Program PPA-PKH
9. Kendala Program



GUIDE INTERVIEW

**“Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan
Keberfungsian Sosial Pekerja Anak”**

Jenis Informan : Informan Pokok

Informan : Pendamping

Nama :

Jenis kelamin :

Alamat :

Agama :

Umur :

Tanda tangan :

Data yang ingin diperoleh :

A. Indikator Peningkatan Keberfungsian Sosial

Berusaha menyiapkan proses pendampingan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca program untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan, dan fungsinya dalam lingkungannya

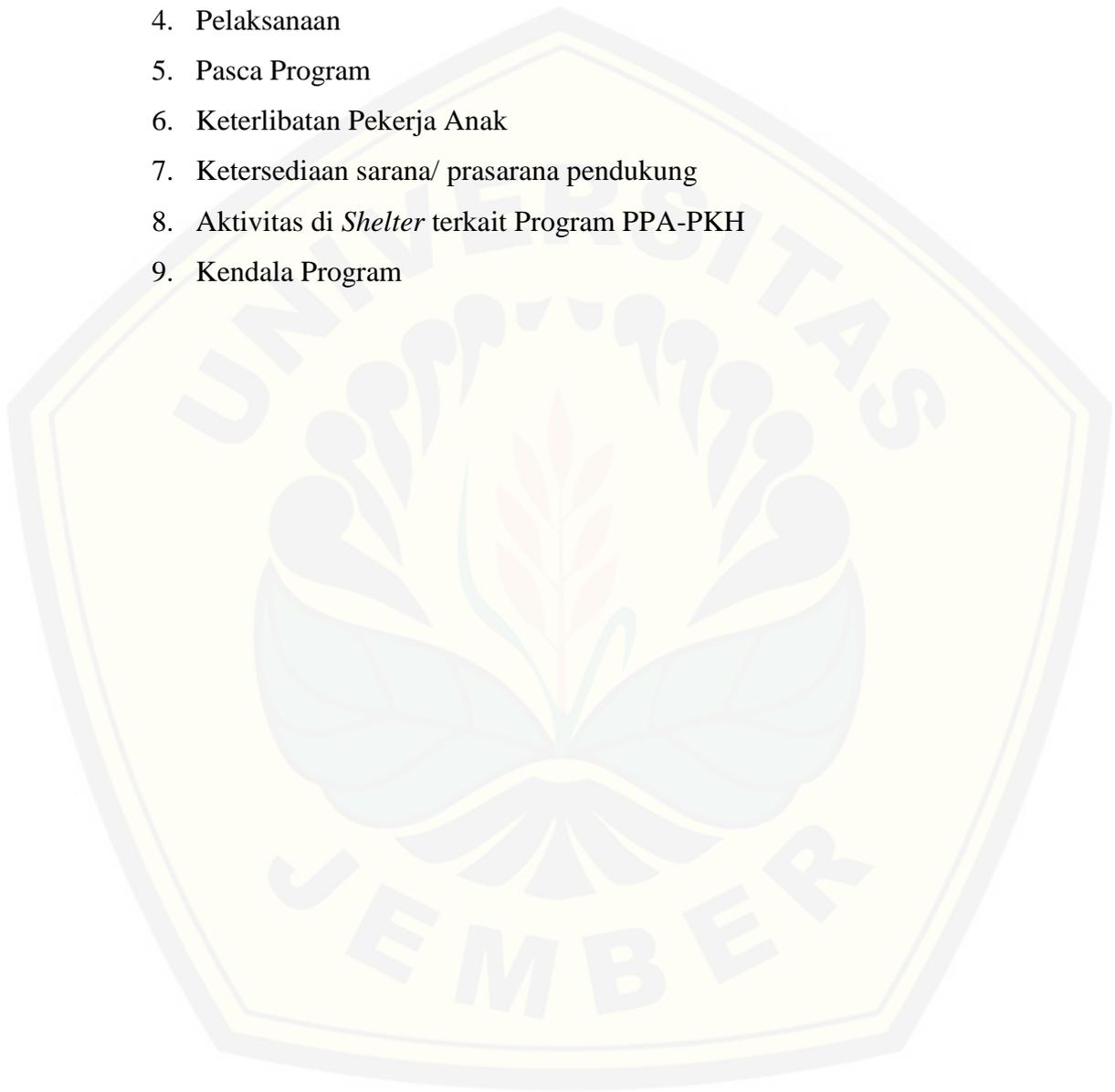
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pasca Program

B. Tahapan Implementasi

Profil Lembaga dan Tahapan Implementasi

1. Profil Lembaga
2. Gambaran Umum Program :

- a. Sejarah
- b. Visi/ Misi
- c. Struktur organisasi
3. Persiapan
4. Pelaksanaan
5. Pasca Program
6. Keterlibatan Pekerja Anak
7. Ketersediaan sarana/ prasarana pendukung
8. Aktivitas di *Shelter* terkait Program PPA-PKH
9. Kendala Program



GUIDE INTERVIEW

**“Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan
Keberfungsian Sosial Pekerja Anak”**

Jenis Informan : Informan Tambahan

Informan : Penerima Manfaat (Pekerja Anak)

Nama :

Jenis kelamin :

Alamat :

Agama :

Umur :

Tanda tangan :

Data yang ingin diperoleh :

A. Indikator Peningkatan Keberfungsian Sosial

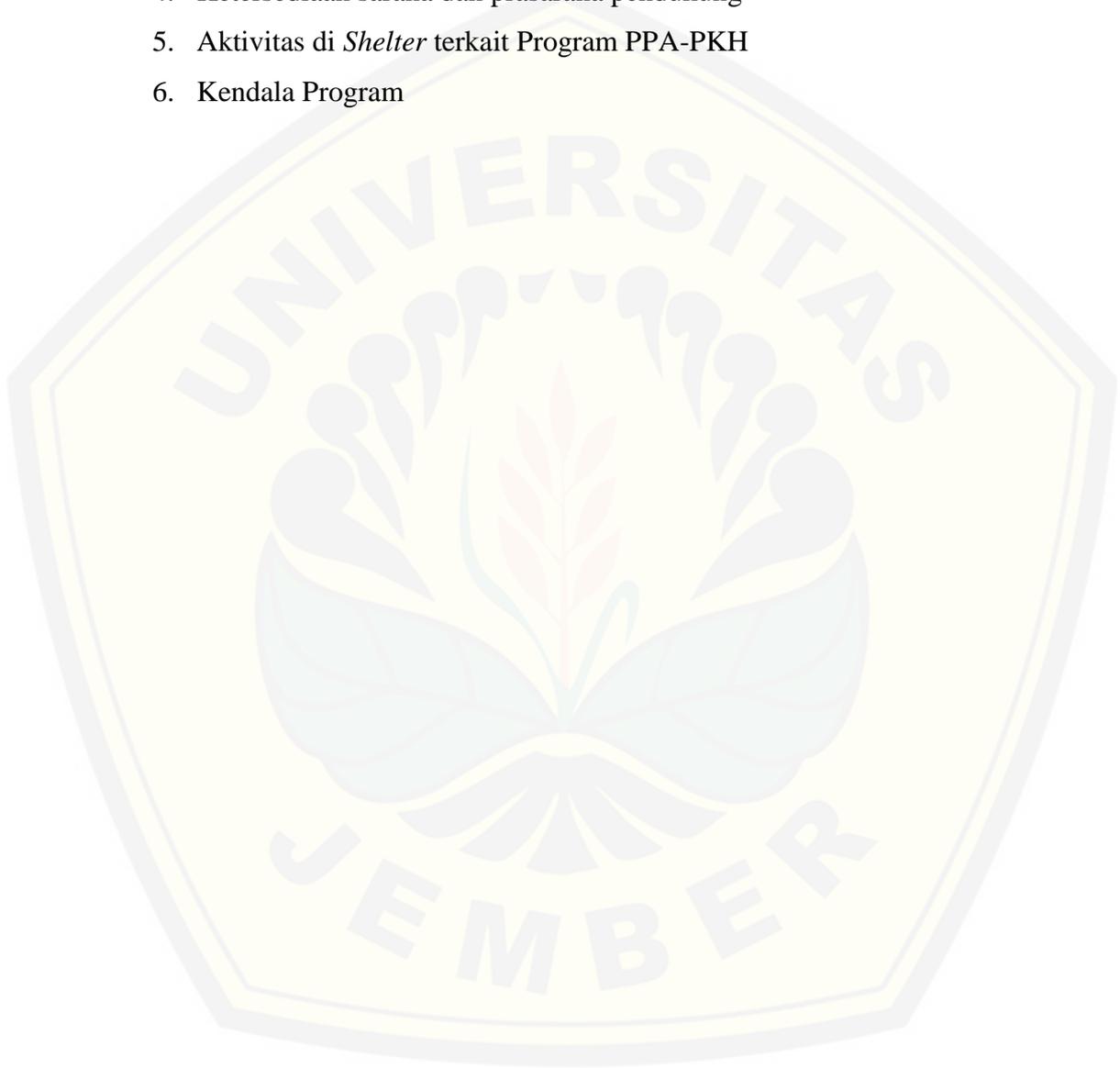
Melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan, dan fungsinya dalam lingkungannya.

1. Menghargai dan menjaga persahabatan
2. Memiliki sifat afeksi pada dirinya dan orang lain
3. Mempunyai daya kasih sayang yang besar serta mampu mendidik
4. Bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya
5. Memperjuangkan kebutuhan dasarnya
6. Memperjuangkan cita-citanya
7. Belajar disiplin dan manajemen diri

B. Tahapan Implementasi

Tahapan Pelaksanaan dan Pasca Program

1. Pelaksanaan Program
2. Pasca Program
3. Keterlibatan Pekerja Anak
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
5. Aktivitas di *Shelter* terkait Program PPA-PKH
6. Kendala Program



GUIDE INTERVIEW

**“Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan
Keberfungsian Sosial Pekerja Anak”**

Jenis Informan : Informan Tambahan

Informan : Institusi (Kepala bagian Program PPA-PKH)

Nama :

Jenis kelamin :

Alamat :

Agama :

Umur :

Tanda tangan :

Data yang ingin diperoleh :

A. Indikator Peningkatan Keberfungsian Sosial

Berusaha memformulasikan rencana program PPA-PKH agar Anak dapat berfungsi secara sosial dalam *Shelter* selama 1 (satu) bulan.

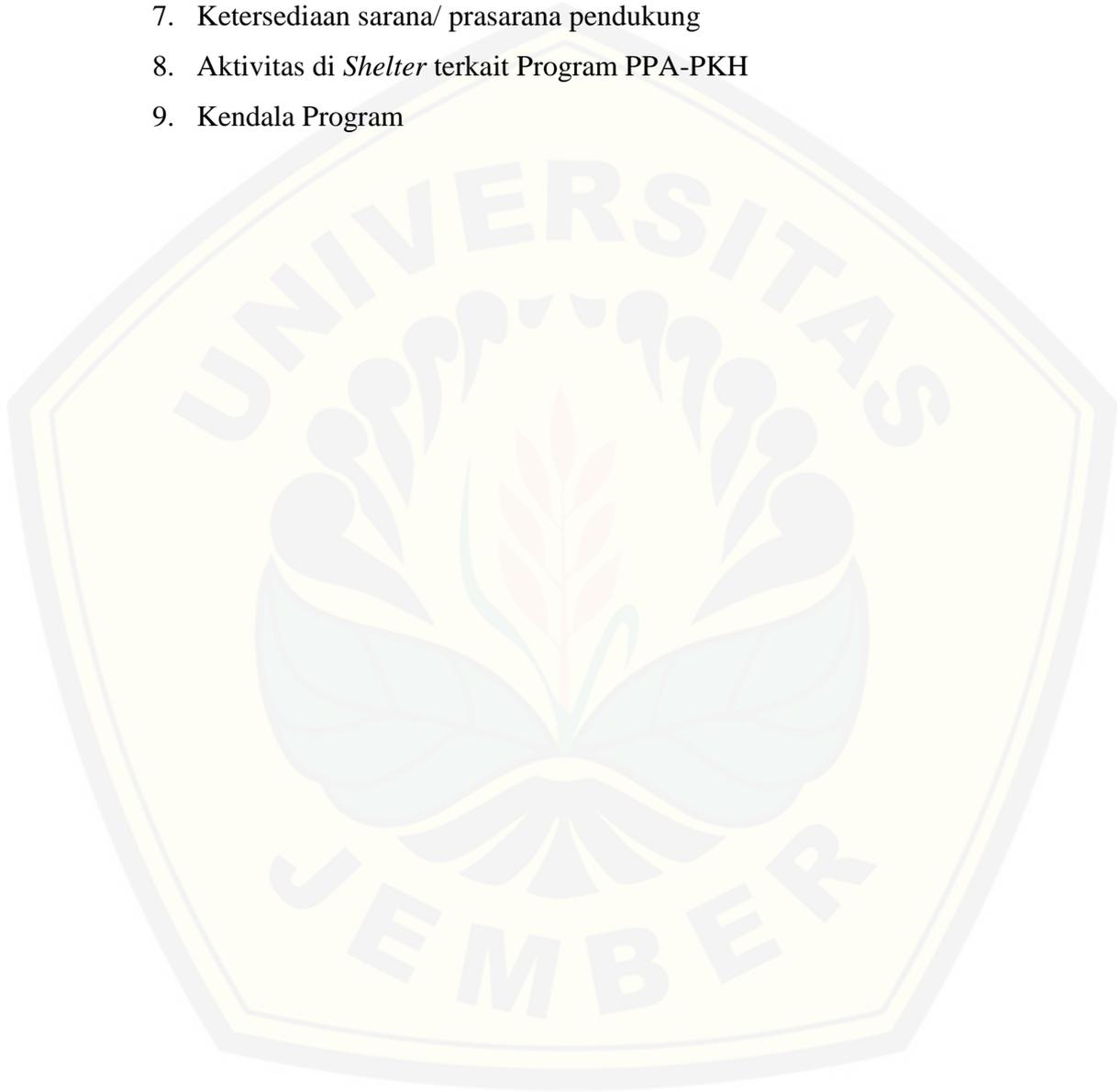
1. Tahap Perencanaan Program

B. Tahapan Implementasi

Profil Lembaga dan Tahapan Implementasi

1. Profil Lembaga
2. Gambaran Umum Program :
 - a. Sejarah
 - b. Visi/ Misi
 - c. Struktur organisasi

3. Persiapan
4. Pelaksanaan
5. Pasca Program
6. Keterlibatan Pekerja Anak
7. Ketersediaan sarana/ prasarana pendukung
8. Aktivitas di *Shelter* terkait Program PPA-PKH
9. Kendala Program



Taksonomi (Penggoloan) penelitian

Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Putus Sekolah (Studi Terhadap Kegiatan Kepelatihan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten



4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum kabupaten

Gambaran umum desa Krai

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang (Program PPA-PKH)

4.1.3 Keberfungsian Sosial Anak

Rencana/ Stimulasi untuk pemberian tugas dan peranan pekerja

Kesediaan kebutuhan dasar pekerja anak

Tugas-tugas dan peranan-peranan anak dalam lingkungan

Pendampingan (Kembalinya Pekerja Anak ke Dunia Pendidikan)



4.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Shelter Krai



Tahap Persiapan



1. Recruitment Pendamping
2. Persiapan Shelter
3. Validasi Data
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung



Tahap Pelaksanaan



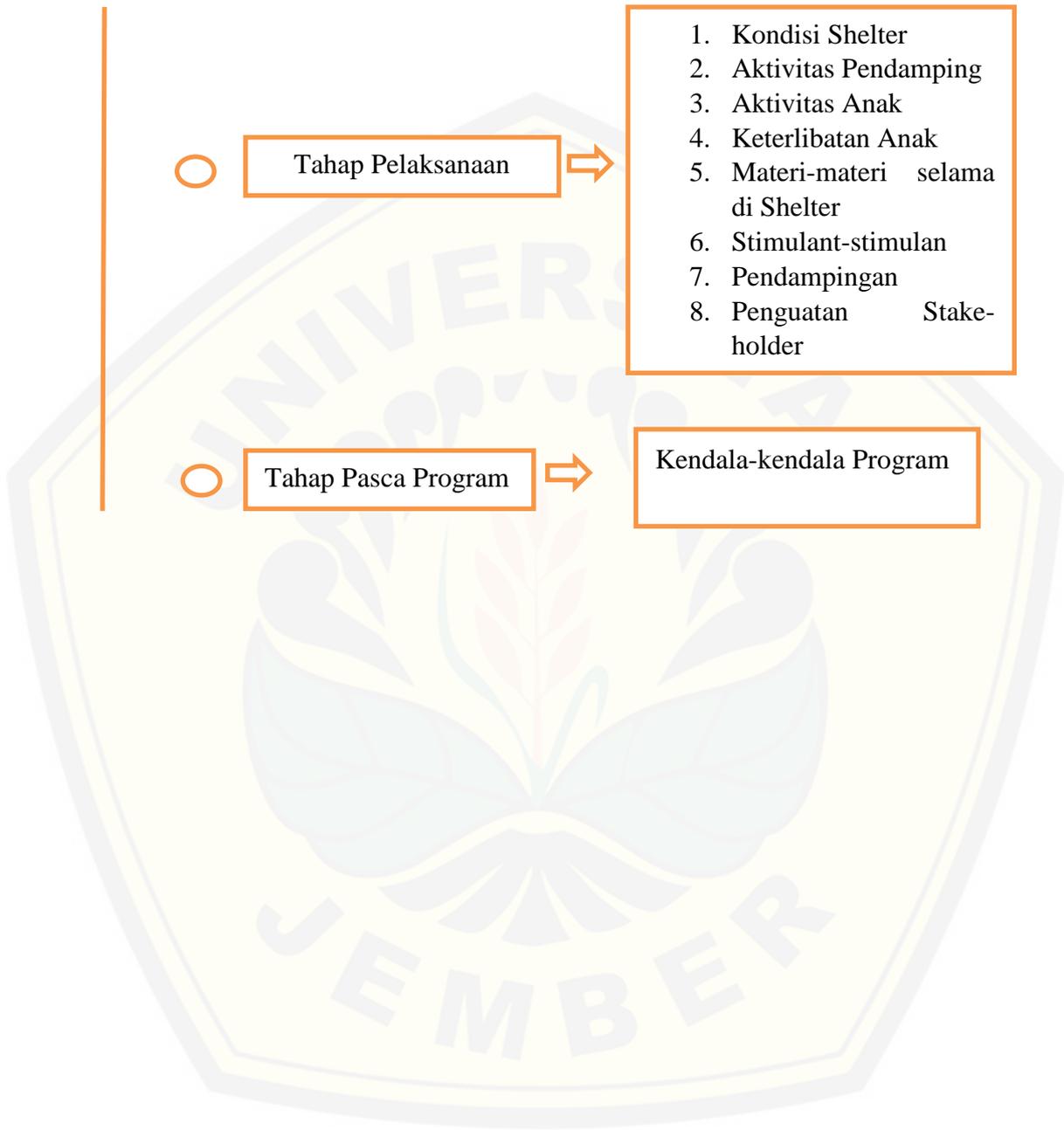
1. Kondisi Shelter
2. Aktivitas Pendamping
3. Aktivitas Anak
4. Keterlibatan Anak
5. Materi-materi selama di Shelter
6. Stimulant-stimulan
7. Pendampingan
8. Penguatan Stakeholder



Tahap Pasca Program



Kendala-kendala Program



Struktur Organisasi Tim Pelaksana Program Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan Tahun 2016 Di Kabupaten Lumajang

No.	Jabatan dalam TIM	Nama	Jabatan dalam Instansi
1	Pembina	Drs. H. AS'AT, M.Ag	Bupati Lumajang
2	Pengarah	Drs. ABDUL MAJID,MM	Plt. KEP. DINAS
3	Penanggung Jawab	Drs. SUHARWOKO, M.Si	KEP. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL
4	Operator Database	RUR INSIATI	KEP. SEKSI PEMINDAHAN DAN EVALUASI
5	Tim Teknis		
	Ketua Tim Teknis	ENDANG HARTATIK, SH	KEP. SEKSI NORMA KERJA
	a. Anggota	a. Drs. ABD RAHMAN	a. Kasi Diklusemas Bidang PLS, pada Dindik
	b. Anggota	b. Drs. MOH. JUNAI, MA	b. Kasi Bimas Islam pada KAnwil Kemenag
	c. Anggota	c. ISWAYUNI	c. Kasi Anak Sekolah Remaja dan Usila
	d. Anggota	d. YUNI TRIANTI, S.Sos	d. Staf pada seksi Bantuan Sosial
	e. Anggota	e. BRIGADIR IRDANI ISMA	e. Unit Perlindungan Perempuan & Anak

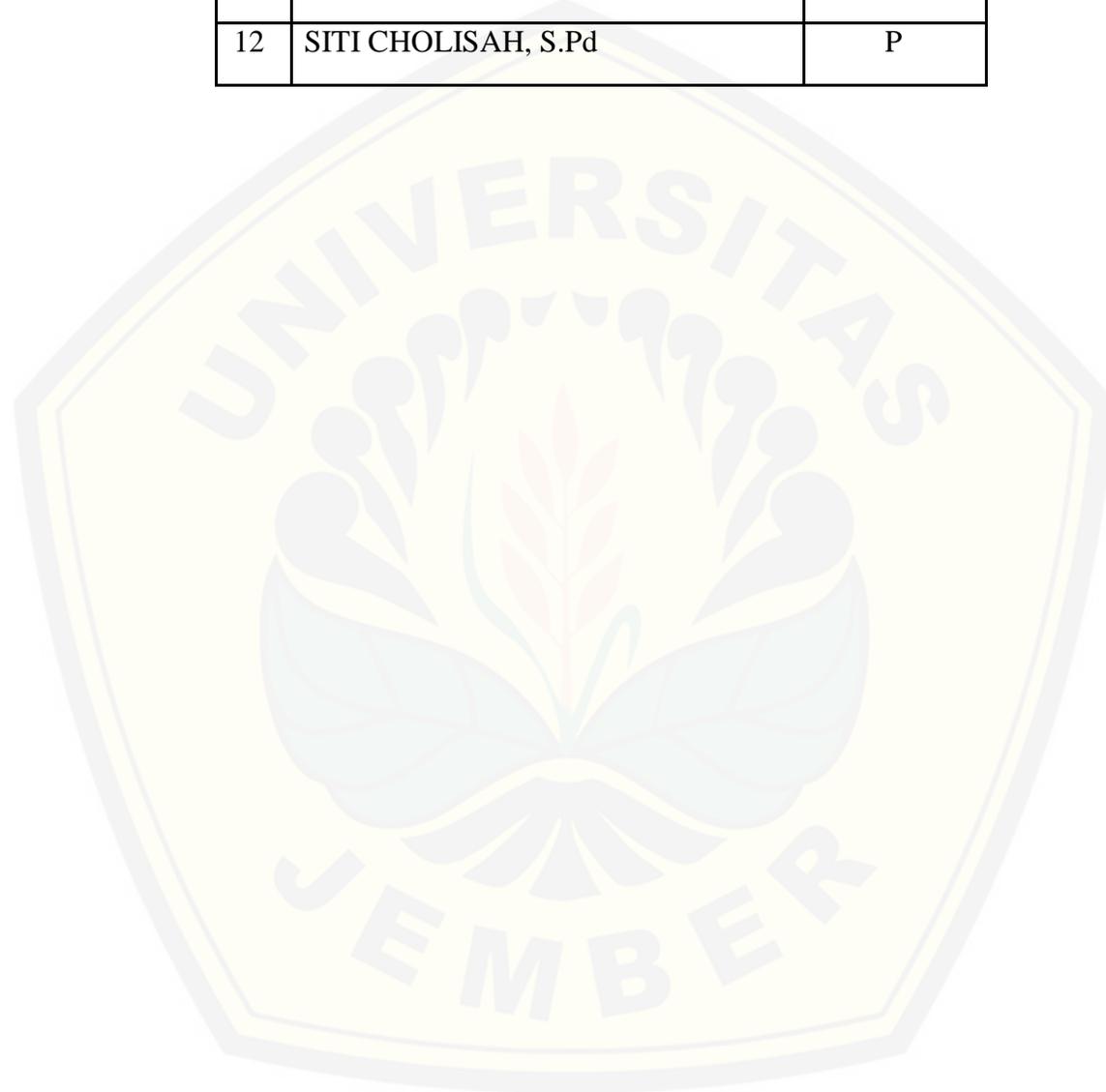
Digital Repository Universitas Jember

	f. Anggota g. Anggota	f. M. MAKRUS ICHWAN g. TRIYONO,SH	f. SPV BRI Cabang Lumajang g. Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Kab. Lumajang
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	YUDO ARRI WICAKSONO, S.Sos	STAF BIDANG PENGAWASAN
7	Koordinator Shelter Koordinator 1 Koordinator 2	a. NUR SAMSI, SH b. BR. SUHARJANA, SH	a. KEP. SEKSI JAMSOS b. KEP. SEKSI K-3

Daftar Nama Pendamping Program PPA-PKH Tahun 2016 Kabupaten Lumajang

No	NAMA PENDAMPING	JENIS KELAMIN L/P
1	MISTAMI, SE	P
2	Drs. BAMBANG SUGIANTO	L
3	RENI MEGAWATI, S.Pd	P
4	WAHIDUDDIN, S.Pd.I	L
5	MUKHAMAD ANSORI AMIN, S.Pd	L
6	NANIK	P
7	DIAH EMI	L
8	BEKTI PERTIWI	P
9	DEVI FEBRIYANTI, S.Pd	P
10	HUSEN	L

11	NANUK YULIANINGRUM,SH	P
12	SITI CHOLISAH, S.Pd	P



Surat Permohonan Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat Universitas Jember

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.leni@unj.ac.id

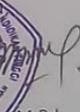
Nomor : 2038/UN25.3.1/LT/2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian
5 Oktober 2017

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
Kabupaten Lumajang
di -
LUMAJANG

Memperhatikan surat Pengantar dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 3818/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 3 Oktober 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Azizah Khoirun Nikmah / 140910301033
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl Bangka 8 No 4 Jember / No. HP 085234611824
Judul Penelitian : Implementasi Program PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Putus Sekolah
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang
2. Kepala Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
Lama Penelitian : Dua Bulan (05 Oktober – 05 Desember 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.


M. Pd
NIP. 196306161988021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak. ISIP Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

 
CERTIFICATE NO : QMS/173

Surat Permohonan Izin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan: Anif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax: (0334) 831586 e-mail: kesbangpol@lumajang.go.id
LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITA-HUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN SURVEY/ KKN/ PKU/ KEGIATAN
Nomor: 072/268742/ 75/2017

Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

Menimbang

Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Nomor : 2033/UN25.3/ILT/2017 Tanggal 5 Oktober 2017, perihal Permohonan Izin Melaksanakan Penelitian atas nama AZIZAH KHOIRUN NIKMAH.

Atas nama Bupati Lumajang memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : AZIZAH KHOIRUN NIKMAH
2. Alamat : Jl. Seruni No. 2 Krai Yosowilangun Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Jember/140910301003
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/ PKU/ Kegiatan

1. Judul Proposal : Implementasi Program PKA-EKH tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberuntungan Sosial Anak Pulus Gekolet
2. Tujuan : Penelitian/Rekomendasi
3. Bidang Penelitian : Ilmu Kesejahteraan Sosial
4. Penanggung jawab : Dr. Susanto, M.Pd
5. Anggapan/Ricarta : -
6. Waktu Penelitian : 25 Oktober s/d 25 Desember 2017
7. Lokasi Penelitian : Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang dan Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Lumajang

Permohonan ketelitian :

1. Berkeinginan menghormati dan menaati peraturan dan tata lertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/ PKU/ kegiatan
2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/ PKU/ Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan, keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat.
3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/ PKU/ kegiatan dan sepesertnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/ PKU/ kegiatan
4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak sah/ tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 23 Oktober 2017
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga


NIP. 196101611980430006

Tembusan Yth.

1. Bpk Bupati Lumajang (saya sebagai laporan)
2. Sdr. Kapolres Lumajang,
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Krai Lumajang,
4. Sdr. Ka. Dinas Tenaga Kerja Kab. Lumajang,
5. Sdr. Kepala Desa Krai Kec. Yosowilangun Lumajang,
6. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univ. Jember,
7. Sdr. Yang bersangkutan

Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Veteran No. 72 Telp. / Fax. (0334) 881546 - 894836
LUMAJANG - 67311

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. SUHARWOKO, M.Si
NIP : 19621215 199403 1 006
Pangkat/Gol : Pembina Tk I / IV/b
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas nama :

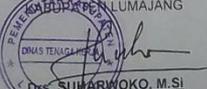
Nama : AZIZAH KHOIRUN NIKMAH
NIM : 140910301033
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fak/Universitas : FISIP / Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan No 37 Jember

Telah melakukan Penelitian Skripsi dengan judul "Implementasi PPA-PKH Tahun 2016 Untuk Mengembalikan Keberfungsian Sosial Pekerja Anak" di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 24 Desember 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 15 Januari 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LUMAJANG


Drs. SUHARWOKO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19621215 199403 1 006